www.balairungpress.com

Balairung

Edisi 52/XXIX /APRIL 2015

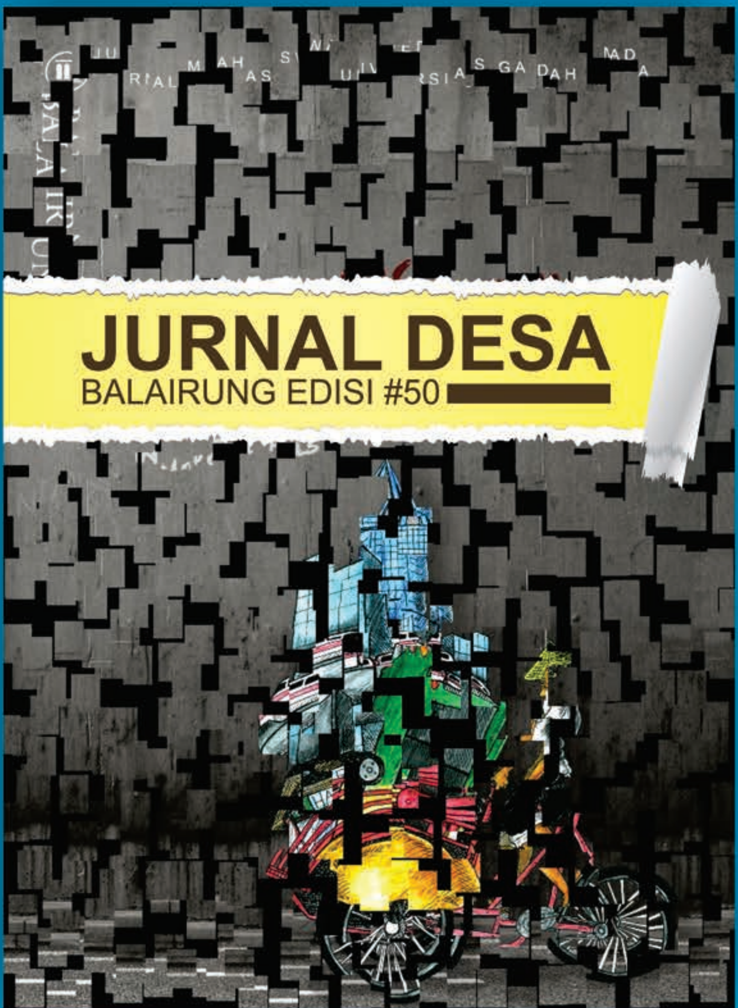


+RISET :
KALA WARGA MBURI HOTEL BERBICARA

KULINER :
SI KUSAM YANG MENYEHATKAN

Merebut Hak atas Kota

Badan Penerbitan Pers Mahasiswa
BALAIRUNG
UNIVERSITAS GADJAH MADA



COMING SOON!

Jurnal Balairung Edisi #50. UU Desa telah disahkan. Pemerintahan baru akan menggelontorkan triliunan rupiah untuk membiayai implementasinya. PP yang juga telah disahkan menuai banyak kontroversi. Maka dari itu, jurnal edisi kali ini akan membedah dari berbagai disiplin ilmu mengenai seluk - beluk "desa" sebagai subyek pembangunan.

Enter product keyword... Search

we're LOADING ..now

JOURNAL ON PROGRESS

JOURNAL LOADING...



Promo Jurnal Balairung

Telah hadir Jurnal Balairung Edisi 49 "Transportasi dalam arus Industrialisasi" narasi atas cacat modernisasi, hanya 30.000,-. Segera hadir Jurnal Balairung Edisi 50 membahas UU Desa 2014 Hanya 50.000,-. Dapatkan pula harga khusus dengan membeli 2 edisi Jurnal Balairung Hanya 65.000,-. Dan diskon 20% untuk pembelian 3 eksemplar Jurnal Balairung Edisi 50

Cerita
Kulit Muka

Di Daerah Istimewa Yogyakarta mudah dijumpai berbagai konstruksi bangunan baru yang menjulang tinggi. Kontruksi bangunan yang diketahui berfungsi sebagai hotel tersebut tidak lantas berdiri tanpa hambatan. Banyak persoalan terjadi yang melibatkan berbagai pihak hingga saat ini. Oleh sebab itu, Majalah BALAIRUNG edisi ini membahas benturan de jure dan de facto terkait pembangunan hotel yang terus menjadi polemik di masyarakat.

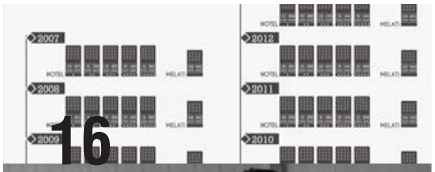
Kulit Muka dibuat oleh Nurrokhman

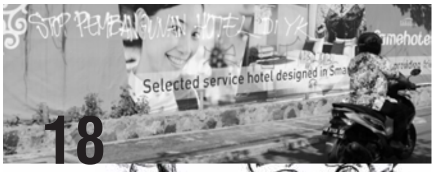


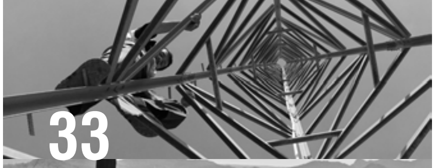
Daftar isi

Balairung
Edisi 52/XXIX/APRIL 2015



































BADAN PENERBITAN PERS MAHASISWA
BALAIRUNG
UNIVERSITAS GADJAH MADA

Pembina
Dr. Kusridho Ambardi, M. A

Pemimpin Umum
Nindias Nur Khalika

Koordinator Majalah
I Nyoman Agus

Tim Kreatif
Anggrelika Putri, Ardiansyah Bahrul Alam, Arifanny Faizal, Muhammad Bikharul A.

Pemimpin Redaksi
Khairul Arifin

Editor
Ahmad Syarifuddin, Danny Izza, Dian Puspita, Hamzah Zhafiri Dicky, Khairul Arifin, Linggar Arum Sarasati, M. Ageng Yudhapratama R., Nindias Nur Khalika, Shianne Anita Syarif, Yuliana Ratnasari

Penulis
Agung Hidayat, Arifanny Faizal, Budi Triwibowo Y.W., Catur Dwi Janati, Deddy Setyadi, Desinta W.K., Dessy Widya Astuti, Erni Maria Angreini, Ervina Lutfikasari, Fikri Fawaid, Ganesh Cintika Putri, Hanna Nur Haqiqi, I Nyoman Agus, Inda Lestari, Inez Christyastuti, Krisnia Rahmadhany, Nindias Nur Khalika, Nuresti Tristya Astarina

Kepala Riset
Dias Prasongko

Editor
Dias Prasongko, Ach Fikri Syahrul Mubarok

Penulis
Anis Putri Isnaeni, Gilang Pradhipta Sanggi, Rifki Afwakhoir, Auviar Rizky Wicaksanti, Moh. Taufiqul Hakim, Anggrelika P. Krestaryaningwidhy, Aryo Andityo Nugroho, Sofiyah Angrang Kusuma

Pemimpin Perusahaan
Ummi Khaltsum Ary

Staf Perusahaan
Muhammad Ramadhan, Dody Houston B., Muhammad Bikharul Ariva, Amanda Rachmaniar, Alief Kusuma Praja, Ihtar Faiq Muasida, Mila Nur Amalia

Kepala Produksi dan Artistik
Anugraheni Tri Hapsari

Redaktur Artistik
Bhayu Satria Andi Prayoga, Muhammad Nabil, Humam Fauzi

Fotografer
Aliftya Amarilisyarining, Nawang Wulan, Nurrokhman, Ryma Aulia Praharsiwi, Yesika Theresia Sinaga

Ilustrator
Arrijal Hanif, Aruni Hanin, Avivah Vega Meidienna, Halvin Octriadi Utama, Muhammad Nabil, Safira Jannah Azarina, Vincentia Trisna Yoelinda

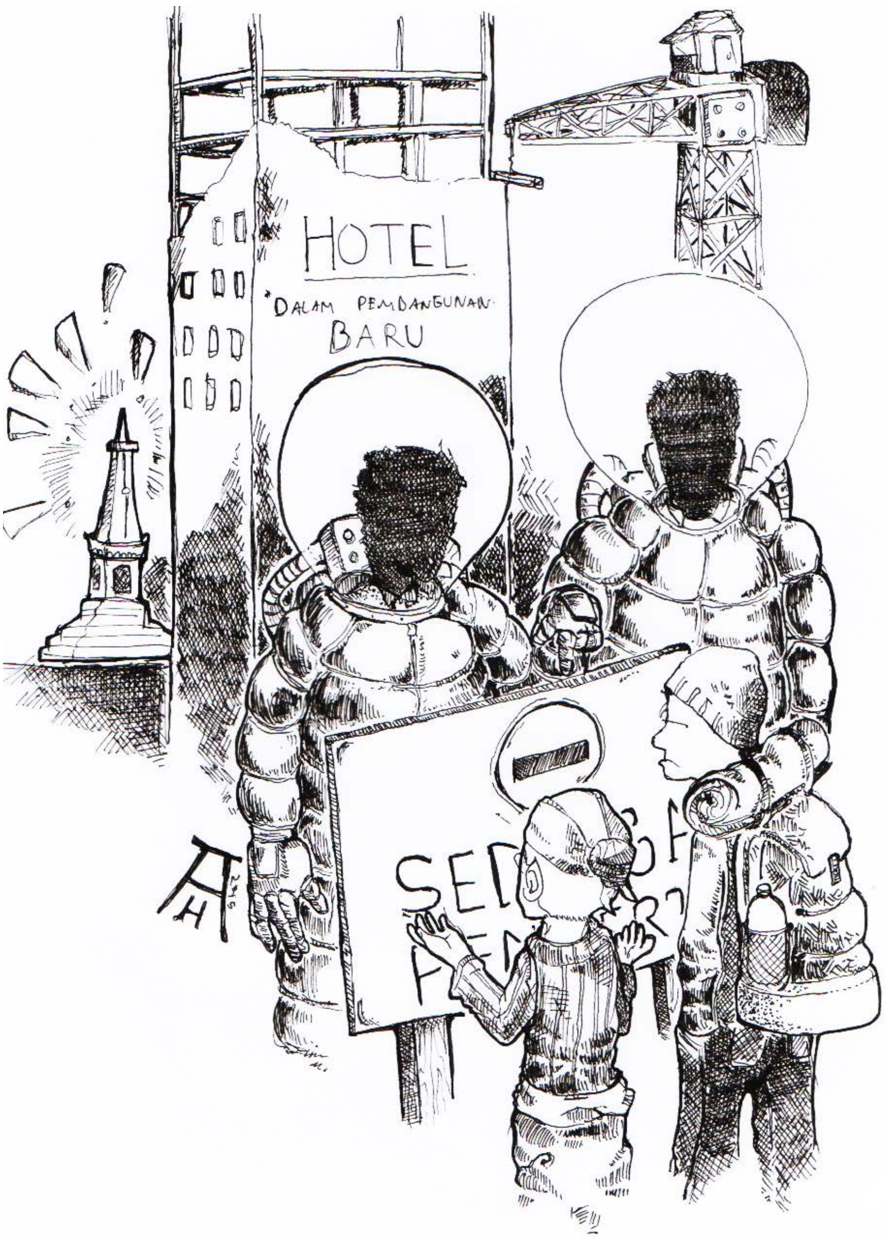
Layouter
Ardiansyah Bahrul Alam, Hamzah Ibnu Dedi, M. Syafiq Luthfiinnur

Alamat Redaksi, Sirkulasi, Iklan dan Promosi:
Bulaksumur B-21 Yogyakarta 55281
Website: www.balairungpress.com
E-mail: balairungpress@gmail.com

Kontak:
Muhammad Bikharul A. (081804236924)

Sinyalemen Matinya Kota

Oleh Khairul Arifin



Tahun 1938, Lewis Mumford, seorang sosiolog dan sejarawan asal Amerika Serikat melontarkan gagasannya mengenai sejumlah tahapan perkembangan kota. Lewat bukunya *The Culture of City*, ia menjelaskan bahwa kota mengalami proses kelahiran hingga kematian layaknya makhluk hidup.[1] Dalam penjabarannya, pembahasan Mumford sampai pada satu titik di mana kota sudah tidak lagi bisa mendukung kehidupan manusia. Kota Nekropolis, demikian Mumford menyebutnya, menjadi kota mati yang tidak lagi memberi tempat warganya untuk hidup. Ia menjadi bangkai, lantas ditinggalkan.

Ketika memvonis suatu kota masuk dalam kategori ini, Mumford menyampaikan beberapa prasyarat. Tanda paling penting, kota sebagai ruang hidup mulai kehilangan fungsinya. Memudarnya fungsi tersebut bisa terjadi karena porak porandanya kota akibat bencana besar dan rusaknya lingkungan. Bisa juga karena proses degenerasi serta penurunan moral penduduknya sehingga memunculkan serangkaian kekacauan.

Kerangka sinyalemen Mumford perihal matinya kota barangkali patut dijadikan perhatian. Sebab, Yogyakarta sebagai kota mulai menunjukkan wajah yang tidak bersahabat. Ruang kota sesak dijejali beton-beton bertingkat. Daya dukung lingkungan berkurang. Di saat bersamaan, berbagai tindak kekerasan tanpa alasan jelas menjadi teror yang kian meresahkan. Kini, warga mulai tidak nyaman beraktitivitas. Atas kondisi ini, mungkinkah kota ini akan mengalami kematiannya?

Tentu saja akan ada banyak perdebatan ketika menanggapinya. Namun, konsep

pembangunan yang dijalankan sejatinya punya pengaruh besar terhadap kondisi kota saat ini. Apabila merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Yogyakarta 2012-2016 hendak diarahkan menjadi kota pendidikan yang berkualitas, berkarakter, dan inklusif; kota pariwisata berbasis budaya; serta pusat pelayanan jasa berwawasan lingkungan dan ekonomi kemasyarakatan.[2] Ketiga sektor—pendidikan, pariwisata, dan jasa—menjadi penopang sumber ekonomi Yogyakarta. Ini juga sebagai penanda berlangsungnya serangkaian pembangunan fisik di dalamnya.

Dari ketiganya, pariwisata punya pengaruh besar bagi jalannya pembangunan di Yogyakarta. Pasalnya, industri pariwisata berkelindan dengan sektor-sektor jasa penopangnya. Ada industri kuliner, cinderamata, biro perjalanan, dan hotel yang tergantung pada banyak tidaknya jumlah kunjungan wisatawan. Hubungan antara sektor-sektor tersebut lantas membentuk jalinan industri penopang perekonomian daerah. Nilai budaya sebagai basis perekonomian daerah pun berhasil menjadi daya tarik yang mendatangkan banyak wisatawan.

Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan tiap tahunnya menjadi gula-gula manis yang dilirik banyak pihak.[3] Sepanjang tiga tahun terakhir, investasi di bidang perhotelan berkembang pesat. Serangkaian pembangunan hotel-hotel besar bertingkat marak ditemui di titik-titik dekat tempat wisata. Sebagai industri yang strategis, tentu ada berbagai kepentingan di belakangnya. Di satu sisi, pihak swasta melihat pasar besar ini sebagai sarana mengeruk kapital sebanyak-banyaknya. Sementara di sisi lain, besarnya investasi industri perhotelan menjadi sarana pemerintah mencapai target pendapatan daerah dengan cepat.

Sayangnya, pemerintah kurang melibatkan warga dalam proses pembangunan yang dijalankannya. Perijinan yang disertakan sebagai syarat pembangunan tidak mengakomodasi aspirasi mereka karena hubungan antara pengembang dengan warga hanya bersifat satu arah. Relasi sekadar sosialisasi, sebagai formalitas seremonial semata.

Akibatnya, gejolak pun muncul. Dari aspek lingkungan, penggunaan air tanah oleh hotel besar dalam jumlah banyak menyebabkan penurunan muka air tanah dalam waktu singkat. Oleh karenanya, sumur-sumur warga menjadi kering. Mereka harus bersusah payah mendapatkan air dari tempat lain, atau jika memiliki dana berlebih, harus mengeruk lagi sumurnya lebih dalam. Persoalan ini bahkan sempat diangkat dalam film dokumenter besutan Watchdog bertajuk *Belakang Hotel.*

Di sisi lain, pertumbuhan penduduk serta alih fungsi lahan turut mempersempit ruang publik. Beberapa tempat yang selama ini dijadikan penduduk sebagai pusat aktivitas beralih fungsi menjadi bangunan perumahan serta kawasan pertokoan. Jika pun masih ada, barangkali ruang publik telah berubah bentuk menjadi pusat-pusat perbelanjaan modern yang telah diprivatisasi.

Pada kondisi ini, kita menyaksikan suatu paradoks. Sektor pariwisata yang menjunjung tinggi adiluhung budaya terbentur dengan ancaman tergerusnya budaya penduduk setempat.[4] Pengembangan pariwisata pun tidak sesuai dengan modernitas sektor-sektor pendukungnya. Di antaranya, bangunan hotel besar yang didirikan tidak lagi mencerminkan, atau menunjukkan identitas kebudayaan Jawa. Kemewahan bangunan lebih ditonjolkan melalui ornamen-ornamen modern bergaya Barat. Jangan tanyakan bagaimana konsep tata bangunan hotel satu dengan yang lainnya. Konsep tata ruang konsentris yang menyangga tata ruang kota barangkali tinggal menjadi mitos.

Oleh karenanya, kami menganggap persoalan ini penting diangkat sebagai bahan diskusi. Menjadikan pariwisata sebagai *leading sector* pengembangan ekonomi daerah bukanlah sebuah kesalahan. Namun, selayaknya pengembangan pariwisata jangan melulu berorientasi keuntungan profit semata. Ada aspek budaya non-benda yang juga perlu dilestarikan. Nilai ini perlu dijaga dari dampak globalisasi agar identitas kebudayaannya tidak hilang.

Beruntunglah masih ada sekelompok warga yang peduli terhadap nasib kotanya. Mereka yang resah menyaksikan ketidaknyamanan hidup di kota membentuk aliansi gerakan. Tembok kota disulap jadi mimbar protes lewat mural bernada satire. Mereka juga menggelar aksi teatrikal dan mencetak publikasi untuk menyebarluaskan gagasannya. Suara-suara dari kelompok ini perlu didengar oleh para pemangku kebijakan. Sebab dengan mendengar kritikan itu, paling tidak masih ada usaha melibatkan warga dalam proses pembangunan meski pada takaran yang paling kecil.

ENDNOTES

1 Ada enam tahapan yang disampaikan Mumford, yaitu eopolis, polis, metropolis, megapolis, dan nekropolis.

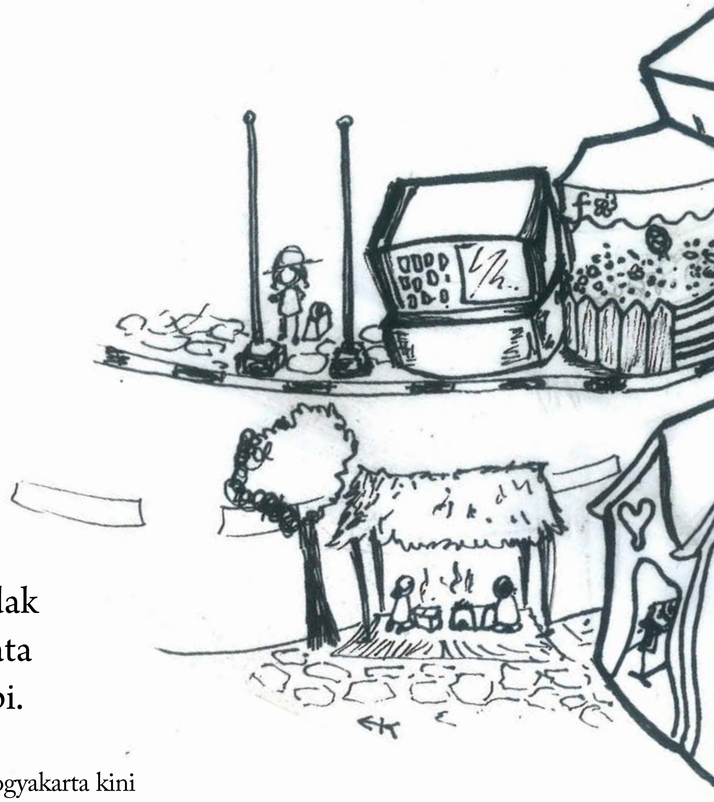
2 Lih. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

3 Dalam tiga tahun terakhir, jumlah kunjungan wisatawan ke DIY menunjukkan peningkatan secara signifikan. Selama tahun 2013, jumlah wisatawan mencapai 3,81 juta, terdiri dari 3,60 juta wisatawan domestik dan 207,28 ribu wisatawan asing. Lih. Statistik Daerah Istimewa Yogyakarta 2014: BPS DIY. Bisa diakses melalui http://yogyakarta.bps.go.id/index.php?r=arc/view_flipbook&id=32#/4/

4. Sebab, selain dalam wujud benda, wujud kebudayaan menurut Koentjaraningrat juga mencakup sistem gagasan dan pola aktivitas manusia di dalamnya. Lih. Koentjaraningrat. 1986. Pengantar Ilmu Antropologi. Jakarta: Rineka Cipta

Peraturan Tak Lengkap, Pariwisata Yogyakarta Belum Berkelanjutan

Oleh Nuresti Tristya Astarina dan Erni Maria A.



Regulasi pembangunan wisata Yogyakarta tidak komprehensif. Amanat mewujudkan pariwisata berkelanjutan karenanya masih sebatas mimpi.

"Tuk, plak, tuk, plak, tuk, plak, tuk, plak."

Langkah kuda delman terdengar seiring turunnya gerimis di penghujung 2014. Tepat pukul 7.00, Jalan Malioboro masih lengang pada Sabtu (27/12). Meski begitu, para pedagang bersemangat untuk menata lapak-lapak di pinggiran Jalan Malioboro. Beberapa jam kemudian, para wisatawan keluar dari hotel yang berada di Jalan Pasar Kembang. Sebagian wisatawan membeli jajanan di depan hotel, pergi ke arah mal, dan kebanyakan menghampiri penjual barang-barang. "Yogyakarta adalah daerah wisata termasuk wisata macet. Coba saja ke Malioboro!" seloroh Drs. Pande Made Kutanegara, M.Si., Dosen Jurusan Antropologi Fakultas Ilmu Budaya UGM.

Yetti Martanti, Kepala Bagian Promosi dan Kerjasama Pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta memaparkan, Yogyakarta kini menjadi destinasi pariwisata terfavorit setelah Bali. Hal ini terbukti dengan meningkatnya wisatawan yang datang. Berdasarkan data Dinas Pariwisata Provinsi DIY 2013, wisatawan mancanegara yang menyewa hotel berbintang tahun 2013 mengalami kenaikan sebesar 15,76% dibanding¬kan tahun 2012. Sementara itu, jumlah wisatawan domestik yang menyewa hotel berbintang tahun 2013 mengalami peningkatan sebesar 3,64% dibandingkan tahun 2012. Oleh karena itu, kepariwisataan menjadi salah satu dari tiga *leading sector* pembangunan Yogyakarta. "Pariwisata menjadi sektor kuat ketiga dalam pembangunan Yogyakarta selain kebudayaan dan pendidikan," ungkap Desta Titi Raharja, M. Si., Peneliti Pusat Studi Pariwisata UGM.

Pembangunan pariwisata pun telah diakomodasi lewat Undang-Undang Pariwisata. "Kita diamanati UU No. 10 Tahun 2009 tentang Pariwisata untuk mendukung jalannya industri pariwisata sesuai dengan perkembangan jaman," terang Drs. H. Haryadi Suyuti, Walikota Yogyakarta. Bagian pasal 8 undang-undang ini mengamanatkan, pembangunan pariwisata harus didasarkan atas rencana induk pembangunan kepariwisataan di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Pada pasal yang sama ayat dua juga dinyatakan, rencana pembangunan ini merupakan bagian integral dari rencana



pembangunan panjang nasional.

Penerbitan UU Pariwisata menimbulkan konsekuensi terhadap segala aturan pembangunan pariwisata di Yogyakarta. Tahun 2012, DPRD dan Gubernur telah mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) No. 01/2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPARDA) DIY. RIPPARDA ini mengatur pembangunan pariwisata berbasiskan budaya yang meliputi sektor destinasi, pemasaran, industri, serta kelembagaan. Adapun pembangunan industri pariwisata termasuk pengembangan subsektor perdagangan dan jasa, salah satunya penyediaan akomodasi berupa hotel. Ir. T. Yoyok Wahyu Subroto, M. Eng., Ph. D., Pengelola Program Magister Arsitektur Pariwisata Fakultas Teknik UGM mengatakan, RIPPARDA dibuat sebagai acuan berjalannya program pariwisata daerah. “Seharusnya daerah potensial seperti Yogyakarta ada RIPPARDA yang mengatur secara komprehensif,” ujarnya.

Akan tetapi, belum semua kabupaten/kota meresmikan RIPPARDA. Triatmi Heruwarsi, Kepala Seksi Bagian Dunia Usaha Bidang Perekonomian Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) DIY menyatakan, pihaknya sebagai penyusun Naskah Akademik (NA) RIPPARDA tidak sepenuhnya memiliki kekuatan. Lebih lagi, RIPPARDA yang dikeluarkan hanya mengatur hal-hal yang umum sedangkan landasan yang mendalam terdapat di NA. “Bappeda hanya merumuskan NA RIPPARDA provinsi, sedangkan aplikasinya tergantung pada pemerintah kabupaten/kota. Mereka akan mengacu pada RIPPARDA daerahnya,” paparnya.



Yetti Martanti, Kepala Bagian Promosi dan Kerjasama Pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta, mengungkapkan RIPPARDA Kota Yogyakarta hingga kini masih dalam bentuk kajian. Artinya, RIPPARDA Kota Yogyakarta belum disahkan menjadi Perda. "Namun, kami telah memiliki rencana strategis (renstra) instansi dan renstra daerah sebagai acuan selama ini," jelasnya.

Buah pahit yang diganjar salah satunya adalah pembangunan hotel yang terlampau pesat di Kota Yogyakarta. Industri perhotelan sebagai penyedia akomodasi pariwisata yang memenuhi kebutuhan para wisatawan justru terpusat di Kota Yogyakarta. "Hanya ada satu hotel berbintang di Kabupaten Bantul, sangat paradoks jika dibandingkan dengan jumlah hotel di Kota Yogyakarta," ungkap Aria Nugrahadi, S.T., M. Eng., Kepala Bagian Pengembangan Destinasi Pariwisata DIY.

Ketidakmerataan pembangunan hotel dipengaruhi oleh jumlah objek wisata di Kota Yogyakarta. "Wisatawan memilih memusat di kota karena banyak objek wisata. Mungkin itu alasan investor banyak membangun hotel," tutur Haryadi. Ia menegaskan, kepemilikan hotel berada di tangan swasta, bukan pemerintah. Untuk itu, dalam hal pengeluaran izin, Haryadi menyerahkan pada sistem yang ada. "Saya tidak menandatangani secara pribadi, semua berlaku secara legal melalui Dinas Perizinan," imbuhnya.

Timbulnya permasalahan ketidakmerataan pembangunan hotel ini didasari pada kekosongan pengaturan tentang zonasi hotel. Selain tidak diatur dalam RIPPARDA, pengaturan zonasi di Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) pun hanya mengatur secara umum. Pengaturan zonasi secara mendalam terdapat pada Rencana Detil Tata Ruang Kota (RDTRK) kabupaten/kota. "Pembangunan hotel apakah sesuai atau tidak seharusnya disesuaikan dengan RDTRK di suatu daerah," jelas Aria.

Padahal, dalam penerapannya, RDTRK Kota Yogyakarta dipakai saat pembangunan sudah dilaksanakan. Contoh konkretnya kebijakan moratorium pembangunan hotel tahun 2013. "Moratorium ini bertujuan mengendalikan pembangunan hotel yang tidak sesuai dengan RDTRK," ungkap Haryadi.

Selain itu, dari sektor destinasi wisata juga masih terkendala kekosongan regulasi. Sebab, RIPPARDA DIY masih menuai ketidakjelasan pengaturan zonasi destinasi

"BAHKAN PRODUK-PRODUK RENCANA TATA RUANG BERHENTI SEBATAS DOKUMEN PERENCANAAN DAN NASKAH KEBIJAKAN SEHINGGA TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM YANG MENGIKAT."

wisata karena penerapannya diserahkan pada pemerintah kabupaten/kota. "Pengaturan destinasi memang sudah ada di RIPPARDA namun penggunaannya merupakan keputusan pemerintah kabupaten/kota. Setelah RIPPARDA jadi, peran Bappeda hanya sebatas memberikan saran," ungkap Triatmi.

Hal ini membuat Sutaryono, Dosen Fakultas Geografi UGM angkat bicara. Ia berargumen, idealnya pembangunan industri pariwisata diselenggarakan dengan prinsip *one area, one plan, one management,* dan *one regulation*. Tetapi, prinsip itu belum sepenuhnya diberlakukan. Hal itu menurutnya ditunjukkan dengan banyaknya kekosongan regulasi. Pun regulasi yang ada belum berjalan efektif dan belum didukung oleh mekanisme penerapan serta pengawasan yang terukur. "Bahkan produk-produk rencana tata ruang berhenti sebatas dokumen perencanaan dan naskah kebijakan sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat," terangnya.

Upaya pemerintah menangani ketidakjelasan regulasi ini diwujudkan Dinas Pariwisata DIY dengan mengakomodasi pertemuan antarpelaku industri pariwisata. Pertemuan ini membahas arah pengembangan pariwisata setiap bulannya. "Pelaku tersebut antara lain dari Persatuan Hotel dan Restoran (PHRI), *Association of The Indonesian Tours And Travel Agencies* (Asita), Dinas Pariwisata Provinsi DIY, Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI), dan perwakilan masyarakat," ungkap Aria.

Wijaya Ladampa, Peneliti Pusat Studi Pariwisata UGM, menambahkan koordinasi antaraktor industri pariwisata dapat melahirkan kompromi yang menguntungkan para pengusaha perhotelan. Ketidaksetaraan status antaraktor memicu munculnya kesepakatan yang tak berimbang. "Pariwisata sebagai industri melahirkan koordinasi antaraktor yang membentuk sistem yang bergantung pada kompromi," terangnya.

Kompromi ini justru dapat melahirkan konflik. Misalnya, data dari Lembaga Ombudsman Swasta (LOS) DIY menunjukkan bahwa banyak hotel yang menggunakan air tanah dalam. Akibatnya, timbul kasus dengan masyarakat terkait berkurangnya sumber daya air di lingkungan mereka. "Kami sempat menjadi mediator kasus pengeboran sumur air tanah dalam oleh salah satu pengusaha hotel. Pihak hotel dan masyarakat yang dirugikan kami dudukkan bersama," papar Dwi Priyono, Komisioner LOS DIY.

LOS sendiri merupakan lembaga yang mengawasi tata kelola perusahaan. Kewenangan ini kemudian mampu melahirkan rekomendasi pada perusahaan yang dianggap merugikan masyarakat. Mengenai pelaksanaan rekomendasi itu diserahkan pada perusahaan. Dalam setahun belakangan, perhatian LOS pada industri pariwisata adalah pembangunan hotel di Kota Yogyakarta yang tidak terkendali.

Adanya kasus-kasus lingkungan mengindikasikan pariwisata Yogyakarta belum berlangsung secara berkelanjutan sebagaimana diamanatkan undang-undang. Made berpendapat, pariwisata berkelanjutan selalu menjadi alasan meningkatkan perekonomian daerah. Padahal, menurut Totok, pariwisata berkelanjutan memiliki dua konsekuensi, yakni berkelanjutan dari sisi pertumbuhan ekonomi dan dari segi lingkungan alam serta kebudayaan. "Secara ekonomi, ditunjukkan dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi masa kini hingga masa mendatang sedangkan secara lingkungan diartikan sebagai konservasi," tuturnya.

Varesczi dalam bukunya, *Guiding Principles for Local Authorities in Planning for Sustainable Tourism Development* (2001) menyimpulkan, untuk mencapai pembangunan pariwisata berkelanjutan diperlukan strategi. Pertama, perencanaan kondisi lingkungan yang sensitif terhadap perubahan serta beberapa komponen budaya dari masyarakat lokal. Kedua, perencanaan guna mengatasi perbedaan antarsektor yang berkepentingan. Ketiga, perencanaan untuk mengatasi dan melawan pengaruh negatif dari program kepariwisataan secara massal. Keempat, perencanaan guna menghadapi perubahan kondisi lingkungan yang tidak dapat berbalik. Hal itu untuk mencegah keadaan sebagaimana dikatakan oleh J. Greenwood Davydd dalam bukunya *Tourism as An Agent of Change : A Spanish Basque Case* (1972). Ia mengatakan pariwisata yang mengembangkan ekonomi justru memunculkan kelas menengah baru yang senantiasa berkompetisi dengan kelas menengah sebelumnya. Untuk itu, pembangunan pariwisata harus menyertakan masyarakat dari perencanaannya. "Pariwisata jika dikelola dengan baik akan menguntungkan semua pihak, termasuk masyarakat," ungkap Made.

Merebut Hak atas Kota

Jumlah hotel bintang di Yogyakarta tumbuh pesat tiap tahunnya. Alih-alih menguntungkan warga lokal, keberadaannya justru mengasingkan mereka dari pembangunan kota.

Oleh Ganesh Cintika Putri, Agung Hidayat

Ratusan kepala memenuhi gang selebar dua meter yang menghubungkan Jalan Parangtritis dan Jalan Sisingamangaraja. Sekumpulan ibu paruh baya menawarkan makanan tradisional apem yang dapat dicicip secara gratis. Sementara itu, anak-anak kecil dengan wajah bercat putih sibuk menyiapkan diri untuk pentas pantomim. Di ujung gang, sekumpulan pemuda tengah menggambar mural di dinding dengan tulisan "Jogja Asik". Prawirotaman malam itu sedang berpesta. Untuk semalam saja, tidak ada deru kendaraan yang lalu lalang mengantarkan turis menuju hotelnya masing-masing.

Pesta malam itu merupakan rangkaian acara *Car Free Night* #2 yang diselenggarakan warga RW 08 Kelurahan Brontokusuman Kota Yogyakarta akhir Mei 2014 silam. Di dalamnya terdapat pentas seni, *marching band*, mural, pembagian makanan tradisional gratis serta penampilan dari beberapa komunitas di Yogyakarta. Menurut Emmanuel Ivan, Ketua RW 08, *Car Free Night* merupakan ruang bagi warga Prawirotaman untuk terlibat dalam industri pariwisata kreatif. Ia menambahkan, acara

ini juga merupakan usaha mengangkat kearifan lokal yang kian terpojok seiring pesatnya pembangunan kota.

Tak hanya masyarakat, pemilik hotel melati juga memanfaatkan acara ini. Salah satunya adalah Hery. Ia memanfaatkannya sebagai media promosi hotel pada wisatawan. "Harapannya wisatawan makin mengenal hotel melati di kawasan ini," jelas Hery.

Selama ini Prawirotaman adalah kawasan yang terkenal sebagai kawasan padat perhotelan. Sejak 1970-an, banyak warga Prawirotaman yang mendirikan tempat penginapan. Kini, terdapat lebih dari tiga puluh hotel yang berdiri di kawasan ini. Sebagian besar merupakan hotel melati, sedang yang lain hotel bintang satu, serta sebuah hotel bintang empat yang baru saja berdiri.

Mulanya pemilik hotel adalah warga Prawirotaman sendiri. Beberapa hotel seperti Erlangga, Duta, dan Agung Hotel dimiliki oleh satu keluarga. Namun seiring perkembangan waktu, banyak pula pendatang yang berinvestasi di wilayah ini. Menurut Ivan, lokasi Prawirotaman yang dekat dengan kawasan wisata Keraton membuat wilayah ini kebanjiran turis.

Sayangnya, pasca Bom Bali I dan II minat kunjungan wisatawan di Yogyakarta menurun. Hal ini sangat mempengaruhi pendapatan hotel melati. Apalagi gempa di tahun 2006 kian memperparah krisis. Mereka yang kepayahan memenuhi biaya perawatan dan renovasi terpaksa menjualnya pada investor asing. Akhirnya, banyak hotel melati yang diklasifikasi ulang menjadi hotel bintang. "Salah satunya merupakan hotel Grand Rosela yang semula bernama Hotel Rose," papar Ivan.

Banyaknya pendatang memunculkan tantangan bagi pemilik hotel melati. Pasalnya, pendatang yang mendirikan hotel berbintang kerap memasang tarif murah. Kondisi ini memaksa para pengusaha kecil untuk menurunkan tarifnya agar bisa bersaing dengan mereka. Padahal untuk memenuhi kebutuhan operasional seperti listrik, air, dan pegawai biayanya tidaklah sedikit. Setiap bulannya rata-rata Hery harus mengeluarkan uang sebanyak Rp 15 juta untuk biaya operasional hotel. Sementara itu tidak setiap bulan besarnya pemasukan mampu mengimbangi pengeluaran. "Pemasukan impas dengan biaya operasional, bahkan pernah juga defisit," tutur Hery.

Sebagai gambaran, dengan tarif Rp 250 ribu, hotel melati menyediakan kamar dengan fasilitas AC dan kamar mandi dalam. Sedangkan hotel bintang dua semisal Pop! Hotel yang menyediakan fasilitas AC, kamar mandi dalam, jaringan Wifi, dan dibalut dalam desain interior mewah hanya mematok harga Rp 209.000,00.

Persaingan hotel lantas menurunkan tingkat hunian hotel melati. Menurut Istidjab M. Danunagoro, Ketua Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) wilayah DIY, tingkat hunian hotel melati hanya berkisar sekitar 10 persen di tahun 2013. Sedangkan tingkat hunian hotel bintang di kawasan Malioboro paling tidak 80 persen. "Dengan fasilitas mewah, orang jelas pilih hotel bintang *lah*," tutur Hery.

Tingginya tingkat huni hotel bintang juga dipengaruhi adanya ruang pertemuan serta restoran seperti yang diungkapkan oleh Wijaya, peneliti Pusat Studi Pariwisata (PUSPAR) UGM. Fasilitas ini menandai pergeseran fungsi hotel yang semula hanya sebagai penyedia akomodasi wisatawan. Kini, hotel juga menjalankan fungsi MICE (*Meeting-Incentive-Converence-Exhibiton*). Dengan menyediakan paket rapat, hotel berbintang dapat meraup keuntungan yang besar. "Fungsi ini yang tidak dapat dipenuhi hotel melati," terang Wijaya.

Menyikapi fenomena ini, Istidjab mengakui persaingan antarhotel merupakan hal yang tak terhindarkan. Sebagai kota pariwisata yang banyak didatangi wisatawan, kebutuhan hunian singgah makin meningkat. Persaingan hotel yang begitu tinggi menggerakkan para pemilik hotel untuk saling menyiapkan strategi. "Tak pelak, dengan fasilitas lengkap, harga kamar harus ditekan sedemikan rupa agar hotel menjadi laku," tutur Istidjab.

Hal senada diungkapkan Yetti Martanti, Kepala Dinas Promosi dan Kerjasama Parwisata Dinas Parwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta. Ia menganggap wajar persaingan antarhotel. Menurutnya, ada tiga hal penopang ekonomi Yogyakarta yaitu wisata, pendidikan, dan budaya. Kekhasan Yogyakarta ini menjadikan Yogyakarta sebagai destinasi wisata nasional kedua setelah Bali."Jelas kalau banyak investor yang ingin menanamkan modal dalam bentuk hotel," tutur Yetti.

Dinas Pariwisata Provinsi DIY mencatat jumlah hotel yang ada di Provinsi D.I. Yogyakarta mencapai 54 hotel berbintang dan 514 hotel melati. Selama 2011 hingga 2013 terdapat sepuluh hotel berbintang yang berdiri tiap tahunnya. Sayangnya, sektor perhotelan di DIY justru didominasi oleh pendatang, baik dalam negeri maupun luar negeri. Data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Provinsi DIY menunjukkan bahwa dari keseluruhan investasi hotel, sekitar 52 persennya dimiliki oleh 12 perusahaan asing. Investasi terbesar berada di tangan grup Mustika Princes Hotel yang mengelola Hotel Sheraton dan bernaung di bawah perusahaan Starwood Hotels & Resorts asal Amerika Serikat.

Dari segi pendapatan, investasi hotel secara keselurahan jauh lebih banyak dibanding sektor lainnya. Heru Suroso, SH., Kepala Bidang Pengawas Penanaman Modal BKPM DIY mengatakan bahwa investasi di bidang perhotelan dan restoran tahun 2013 mencapai Rp 2.278.720.565. Di bawahnya, terdapat sektor perdagangan sebesar Rp 1,2 Trilyun, industri tekstil sebesar Rp 863 juta, dan jasa lainnya sebesar Rp 779 juta.

Investasi yang besar lalu menjadi latar belakang pemerintah mempermudah proses perizinan. Menurut Heru, kemudahan izin diberikan agar investor makin tertarik menanamkan modalnya. Sebelumnya, investor harus mengurus izin secara terpisah di Dinas Perizinan, BKPM, dan BLH sebagai syarat mendirikan hotel. "Kami sedang berupaya membentuk layanan izin satu atap di masing-masing dinas perizinan kota/kabupaten. Sementara ini hanya pemerintah kota yang sudah menerapkan," jelas Heru.

Forum Pengamat Independen (FORPI) yang dibentuk Walikota Yogyakarta untuk mengevaluasi kinerja pegawai dinas mengomentari mekanisme perizinan ini. Menurut Winarta Hadiwiyono, koordinator FORPI, mekanisme perizinan satu atap perlu dievaluasi. Menurutnya, sejatinya perizinan dilakukan untuk





Foto: Yesika/BALAIRUNG

mengantisipasi gangguan yang mungkin terjadi. Oleh karena itu, warga yang berisiko terkena gangguan seharusnya dilibatkan. "Hakikatnya perizinan bukan ditujukan untuk pendiri hotel, tapi untuk masyarakat setempat yang akan terkena dampak pendirian hotel," jelas Winarta.

Sayangnya mekanisme perizinan di Yogyakarta tak pernah melibatkan masyarakat. Salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh investor adalah pemberitahuan pada warga sekitar mengenai rencana pendirian hotel. Namun, menurut Winarta peraturan ini memiliki kelemahan secara legal formal. Pihak pengembang tidak perlu meminta persetujuan dari warga sekitar. Sebab pengembang hotel hanya perlu mensosialisasikan atau minimal menginformasikan pendirian hotel pada masyarakat sekitar lokasi. Dalam praktiknya, berita acara sosialisasi pun dapat dipalsukan dengan mudah. "Akhirnya banyak pengembang yang menjadikan acara sosialisasi sebagai formalitas belaka," tutur Winarta.

Selain itu, Winarta menemukan banyak koreksi di bidang pengawasan lingkungan. Izin dari Badan Lingkungan Hidup (BLH) menjadi salah satu syarat mendapatkan IMB dari Dinas Perizinan. Terdapat beberapa izin yang wajib dikantongi dari BLH seperti dokumen AMDAL/UKL/UPL, izin pembuangan limbah, izin konstruksi bangunan serta izin pemanfaatan dan konstruksi sumur. Menurut data yang dihimpun dari website BLH D.I. Yogyakarta, masih terdapat beberapa hotel yang belum mengantongi izin tersebut. Hotel Novotel misalnya belum melengkapi 90 persen dari dokumen yang diwajibkan. Selain itu, Hotel Grand Cokro, Red Dot dan Cakra Kusuma belum mendapatkan izin pembuangan limbah cair. "Seharusnya hotel mematuhi peraturan yang ada agar tidak merugikan masyarakat lokal," tegas Very Tri Jatmiko, Kepala Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian Kualitas Lingkungan Hidup BLH DIY.

Salah satu hotel yang tidak tertib dan merugikan warga sekitar adalah Fave Hotel. Menurut investigasi FORPI, hotel ini tak mengantongi izin pemanfaatan air tanah meski telah berdiri selama satu tahun. Akibatnya, warga menyalahkan hotel atas kekeringan yang melanda sumur warga belakangan ini. Very mengatakan bahwa kendala terletak pada minimnya personil pengawas. Hanya ada tujuh orang yang bertugas mengawasi ratusan hotel di Yogyakarta. Minimnya pengawasan dan kepekaan pengembang hotel membuat banyak hotel tidak mengacuhkan peraturan ini.

Banyaknya permasalahan terkait hotel ditanggapi serius oleh Pusat Studi Pariwisata (Puspar) UGM. Wijaya Ladampa, salah satu peneliti Puspar menilai bahwa pemerintah kurang melibatkan warganya dalam pembangunan kota wisata. Di sisi lain, pola pikir warga Yogyakarta juga masih jauh dari pola pikir pariwisata. Wijaya mendefinisikan pola pikir pariwisata sebagai kreativitas warga untuk memanfaatkan pariwisata kotanya sebagai sumber penghidupan. Kondisi ini berbeda dengan warga Bali yang telah menyadari bahwa segala kegiatannya dapat dijadikan komoditas wisata. "Ini mengapa warga Bali tidak membiarkan pemandu wisata berasal dari luar Bali, karena menurut mereka hanya pemandu dari Bali lah yang mengerti budaya di Bali," tutur Wijaya.

Sayangnya, masyarakat Jogja masih jadi penonton. "Pemandu wisata saja kebanyakan warga pendatang. Warga lokal kadang malah tidak paham budayanya," ucap Wijaya prihatin. Sepakat dengan Wijaya, Winarta mengatakan bahwa



masyarakat Jogja justru menjadi korban dari pembangunan kotanya. Fenomena ini disebut Henri Lefebvre sebagai alienasi hak atas kota. Hak atas kota bukan sekedar hak untuk menikmati jalan dan ruang publik. Lebih dari itu, warga harusnya berpartisipasi dalam menentukan pembangunan kota. David Harvey dalam buku *Rebel Cities (2012)* mengatakan bahwa hak atas kota merupakan kerja kolektif rakyat—bukan individu atau kelompok. Sayangnya, kepentingan kapital justru mengasingkan rakyat dari haknya. Di saat seperti inilah rakyat akan melakukan *counter-hegemony* melawan kapital. Ini juga menandakan bahwa munculnya Gerakan Warga Berdaya, Jogja Ora Didol, serta Jogja Asat menjadi momentum rakyat menggugat hak atas kotanya.

Menanggapi kritik dari rakyat, Pemerintah Kota Yogyakarta berdalih telah melibatkan warganya dengan membentuk kampung-kampung wisata. Pemerintah telah menyediakan fasilitas seperti panggung seni serta turut mempromosikannya. Yetti mengatakan bahwa pemerintah juga merekomendasikan hotel untuk menyediakan hidangan khas Yogyakarta. Ini dimaksudkan untuk melibatkan masyarakat lokal dalam industri perhotelan. Namun, karena hotel memiliki kualifikasi yang tinggi untuk hidangannya, warga lokal seringkali tak memenuhi syarat untuk menjadi pemasok hotel. "Tapi *by process* masyarakat pasti belajar dan bisa jadi *supplier* hotel," sanggah Yetti.

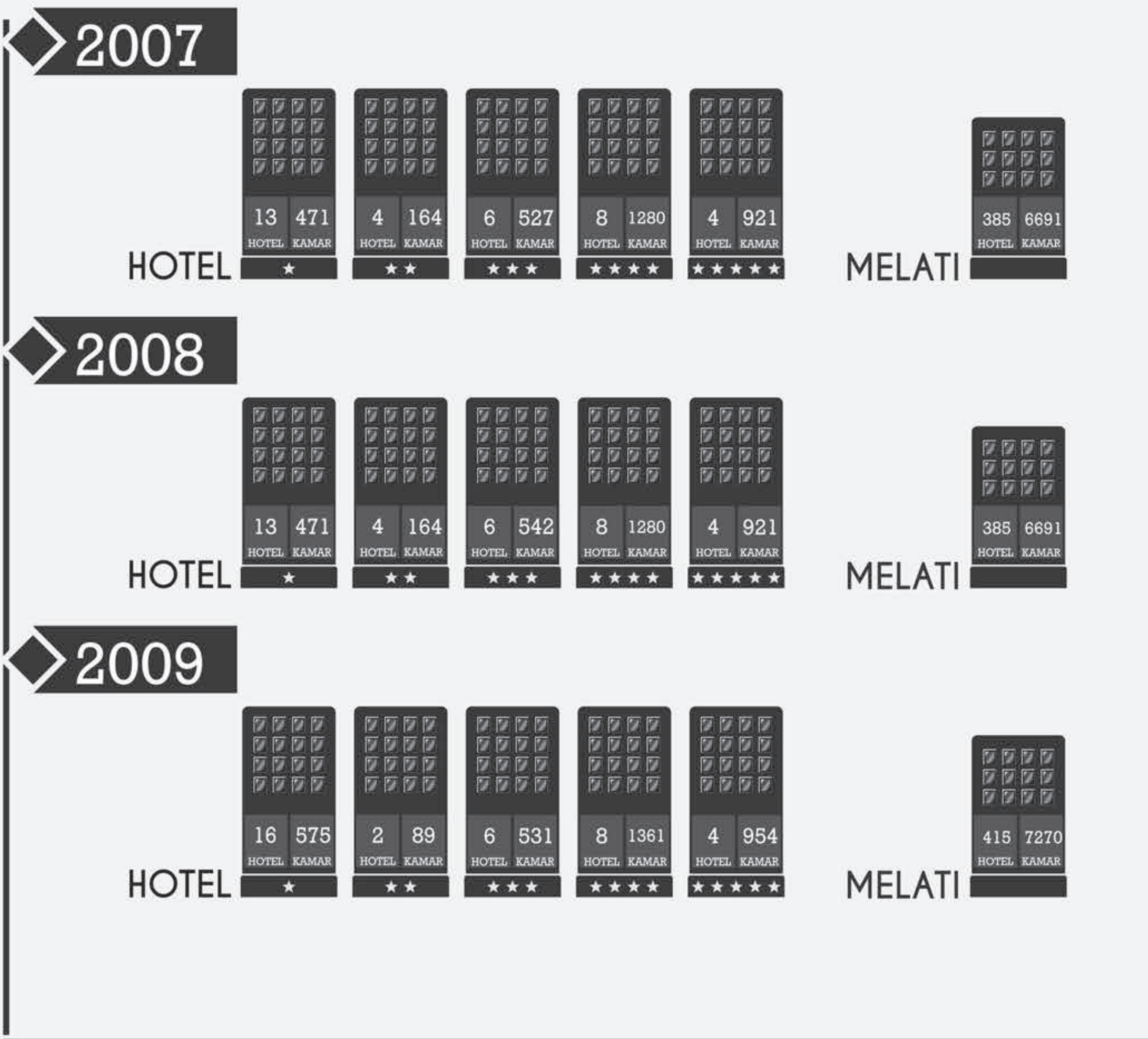
Membenarkan pendapat Yetti, Haryadi Suyuti, Walikota Yogyakarta turut ambil bicara. Menurutnya, moratorium pembatasan jumlah hotel menunjukkan sikap tegas pemerintah. Pada Desember 2013, Haryadi mengeluarkan Peraturan Walikota no 77 tahun 2013 tentang Pengendalian Pembangunan Hotel. Isinya, dari 1 Januari 2014 hingga 31 Desember 2015 pemerintah bertekat untuk tidak memberikan surat IMB bagi pendirian hotel. Menurut Haryadi, kebijakan ini dilakukan untuk mengendalikan pertumbuhan hotel yang tak wajar. "Jogja harus bisa menjadi kota nyaman huni dan nyaman dikunjungi," tegas Haryadi.

Akan tetapi sebelum 2013 berakhir, jumlah investor yang mengajukan pendirian hotel di Provinsi D.I. Yogyakarta justru mengalami peningkatan drastis. Data yang dilansir *kompas.com* menyebutkan ada 110 hotel yang mengajukan izin pendirian bangunan sebelum Desember 2013. Sementara itu data yang dimiliki oleh FORPI Kota Yogyakarta menyebutkan bahwa dari 110 hotel, 70 di antaranya ada di Kota Yogyakarta. Sejauh ini, sudah ada 40 hotel yang telah mendapatkan ijin IMB. "Sisanya pasti bisa dapat IMB kalau mekanisme perizinannya masih selonggar itu," tukas Winarta.

Seorang warga Gondolayu yang tidak bersedia disebutkan identitasnya merasa khawatir dengan pembangunan hotel yang masif di Yogyakarta. Ia mendengar bahwa kampungnya akan dibeli untuk didirikan sebuah hotel. "Kalau disuruh pindah ya saya segan. Soalnya saya sudah nyaman disini," tuturnya. Sementara itu, Ivan lebih khawatir kalau pembangunan yang pesat ini akan menggilas kearifan lokal. Alternatif yang paling tepat menurutnya adalah menjaga keberlanjutan *Car Free Night*. "Lebih baik kami bergerak sendiri untuk mengembangkan kreatifitas warga agar tak cuma pasif melihat Jogja yang makin modern," tegas Ivan.

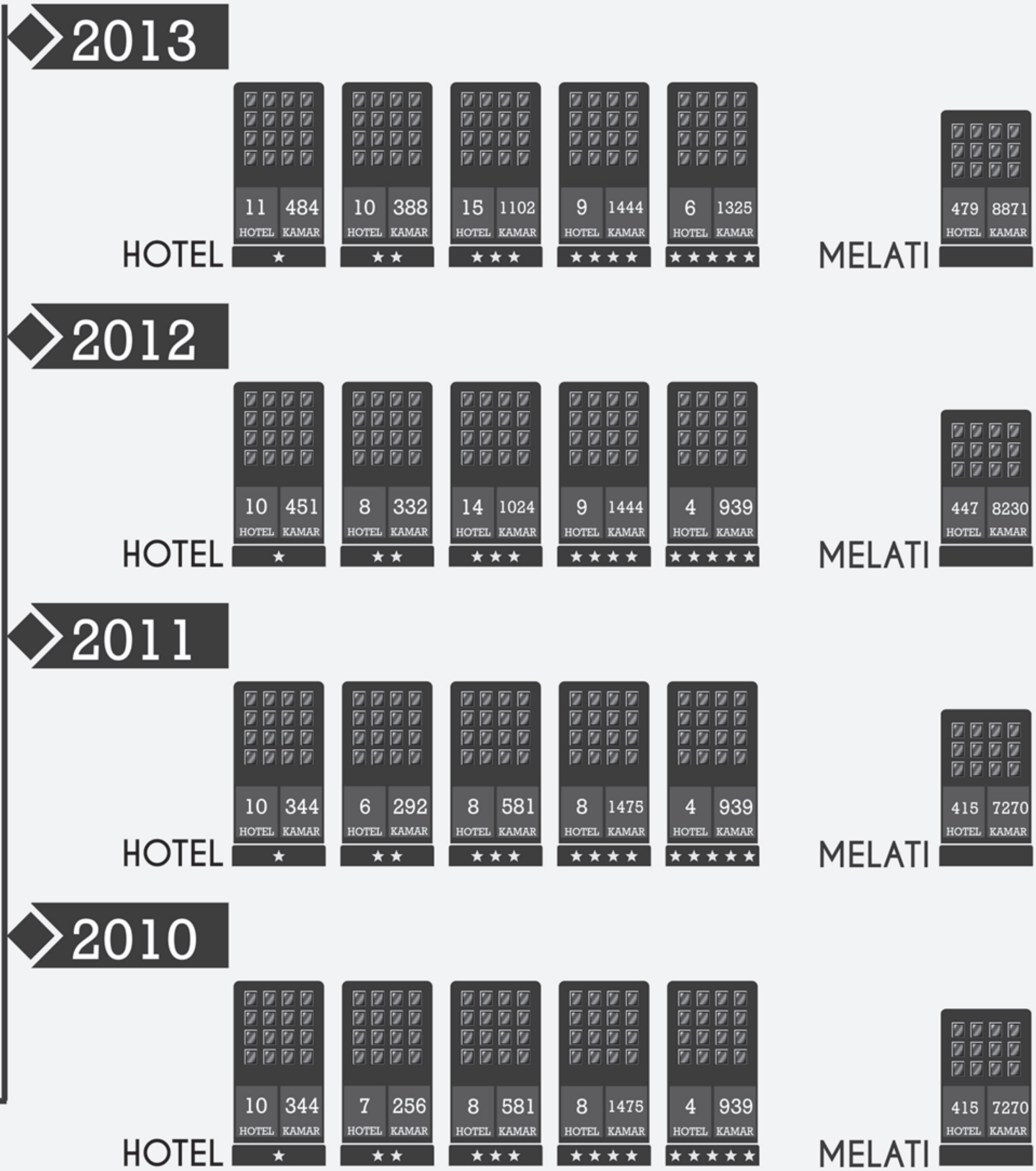


Laju Pertumbuhan Hotel di Daerah Istimewa Yogyakarta



PENGOLAH DATA : AUVIAR RIZKY WICAKSANTI
TATA LETAK : M. SYAFIQ LUTHFINNUR

Hasil Statistik Pariwisata yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Provinsi DIY 2007-2013 menunjukkan bahwa pembangunan hotel selalu dilakukan tiap tahunnya. Perbedaan antar tahun hanya terletak pada pembangunan hotel jenis apa yang sedang dibutuhkan oleh kondisi pasar pariwisata di Yogyakarta. Dalam hal ini, hotel yang dibangun merupakan hotel berbintang atau justru hotel kelas melati yang sedang dibutuhkan oleh para pelancong. Sayangnya, tidak ada aturan yang tegas untuk membatasi berapa banyak hotel berbintang atau hotel kelas melati yang boleh dibangun di Yogyakarta.





Asat di Kampung Miliran

Oleh Inda Lestari, Inez Christyastuti

"Namanya saja Miliran. Mili dalam bahasa Jawa artinya mengalir. Sejak dulu daerah ini dikenal sebagai sumber air yang besar," terang Dodok.



Foto: Nurrokhman/BALAIRUNG

Aksi vandalisme yang terletak diluar lokasi proyek pendirian hotel di Jalan Batikan, Yogyakarta (13/1). Coretan dinding bermuatan kritik terhadap pendirian hotel semakin marak terjadi di berbagai wilayah di kota Yogykarta

Sesosok laki-laki bertelanjang dada berdiri di depan hotel, Rabu (6/8/2014). Tangannya memegang gayung, di dekatnya ada sebuah ember. Di bawah kilatan cahaya kamera serta tatapan bingung orang-orang, ia mandi. Sebentar kemudian, lelaki itu mengambil sikat dan mulai menggosok gigi. Melakukannya di depan umum saja sudah terasa aneh, apalagi jika tidak menggunakan air saat 'bersih-bersih'. Ia melakukan semuanya dengan pasir. Kini, sekujur tubuh dan giginya berlumuran pasir.

Bukan tanpa alasan Dodok Putra Bangsa menggelar teatrikal "mandi pasir". Pasalnya, Kamis itu (31/7/ 2014) ia terkejut ketika mendapati penuturan istrinya bahwa air sama sekali tidak mengalir. "Untuk membuat kopi saja tidak bisa," ungkapnya. Ternyata, setelah ia bertanya ke tetangga, kondisi itu tidak hanya dialami Dodok, namun juga sejumlah warga lainnya. Sementara selama ini warga terbiasa mengandalkan air dari sumur artesis di rumah masing-masing. "Kalau pakai PDAM mahal," ungkap seorang ibu yang berjualan makanan tidak jauh dari rumah Dodok.

Padahal, ia menuturkan, sejak dulu sumur di rumahnya, di Miliran, Kecamatan Umbulharjo tidak pernah kering, bahkan ketika musim kemarau tiba. "Namanya saja Miliran. Mili dalam bahasa Jawa artinya mengalir. Sejak dulu daerah ini dikenal sebagai sumber air yang besar," terang Dodok. Ia menduga, keringnya sumur warga Miliran disebabkan letak sumur hotel yang berdekatan dengan rumah warga. Fave Hotel yang beroperasi di Jalan Kusumanegara, Yogyakarta sejak 2012 itu memang mempunyai sumur sedalam 80 meter. Sementara rata-rata kedalaman sumur warga Miliran 5-6 meter.

Dodok segera menggedor pintu Fave Hotel untuk meminta keterangan. Namun lelaki gondrong ini hanya ditemui oleh petugas keamanan. Esoknya ia kembali. Kali ini Dodok bertemu dengan pihak Human Resources Development Fave Hotel. Ia lalu mengadukan kondisi air sumur yang mengering di rumahnya. Namun, saat itu belum ada kesepakatan apa-apa. Pihak HRD tidak dapat mengambil keputusan.

Dodok lantas melapor pada Lembaga Ombudsman Swasta (LOS). "Setelah kami selidiki, hotel ini tidak punya izin mengenai pemanfaatan air tanah," terang Dwi Priyono, Komisioner LOS yang menangani kasus ini. Doni Prakasa Eka Putra, dosen Teknik Geologi UGM yang menjadi narasumber ahli atas kasus tersebut membenarkan. Menurutnya, Fave Hotel memang memiliki izin pengeboran air tanah.

Izin pengeboran dapat diberikan bila sebelumnya Fave Hotel, yang memiliki area kurang dari 10.000 meter2, telah mengantongi dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL). Namun, baik dokumen UKL maupun UPL (yang dibuat oleh pihak usaha ini) hanya melibatkan sedikit interaksi dengan warga. Hal ini berbeda dengan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) yang wajib dimiliki oleh usaha dengan luas area di atas 10.000 meter2.

Meski demikian, Fave Hotel sekalipun mempunyai izin pengeboran air tanah, ternyata belum mengantongi Izin Pemakaian dan Pengusahaan Air Tanah seperti diatur dalam Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 28 Tahun 2013. Peraturan lain, yaitu Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyediaan Air Baku Usaha Perhotelan di Kota Yogyakarta mengatur lebih spesifik. Di situ disebutkan bahwa penyediaan air baku untuk hotel di Kota Yogyakarta dapat bersumber dari PDAM dan air tanah. Lebih jelasnya tercantum dalam pasal 3 ayat 2; "Setiap usaha perhotelan di daerah yang terjangkau oleh jaringan PDAM harus menyediakan air baku yang bersumber dari PDAM." Namun sesuai pasal 3 ayat 2, hotel dapat menggunakan air tanah sebagai tambahan atas penyediaan air baku tersebut.

Hingga sebulan berikutnya, kasus ini terus bergulir. Senin (1/9/2014) Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta menyegel sumur milik Fave Hotel. Dua hari berikutnya, Dodok dan 30-an masyarakat Miliran menggelar aksi. Mereka bersama-sama melakukan "tapa pepe" (berjemur di bawah terik matahari). Sembari berjemur, mereka mengalungkan kertas bertuliskan kegelisahan hati lantaran air di sumur mereka mengering. Dalam aksi itu,

masyarakat juga sempat menyegel pintu belakang Fave Hotel yang menjadi pintu keluar karyawan dengan kain bertuliskan "Disegel Warga".

Akhirnya, sebuah pertemuan digelar antara pihak Fave Hotel, warga Miliran, dan sejumlah lembaga lain. Warga menuntut Fave Hotel memberikan ganti rugi terkait biaya yang telah mereka keluarkan, antara lain untuk mengganti biaya pembelian air selama keringnya sumur mereka; mengebor sumur supaya lebih dalam; dan membeli mesin pompa air. "Kami menuntut supaya air kembali. Ini bukan kompensasi, tapi biaya yang harus diganti," kata Dodok. Fave Hotel memenuhi 75% dari tuntutan yang ada senilai kurang lebih 16 juta rupiah. Minggu (7/9/2014), uang ganti rugi tersebut baru diberikan.

Beberapa hari setelah pertemuan dilaksanakan, sekitar seminggu setelah penyegelan sumur Fave Hotel oleh pemerintah, air kembali muncul. "Padahal hujan belum turun," ungkap Dodok. Hal ini mematahkan anggapan beberapa pihak yang mengatakan bahwa sumur di Miliran kering karena musim kemarau.

Supanut, Ketua RT 13 di RW 04, Miliran Kecamatan Umbulharjo, angkat bicara. "Sebelum dibangun, Fave Hotel telah mendapat izin dari RW, Lurah, Camat hingga birokrat di tingkat atasnya. Oleh karena itu, ketika meminta ke RT, izin tersebut diberikan." Namun, ia mengakui tidak ada pemberitahuan apa pun dari Fave Hotel terkait pemanfaatan air tanah.

Sementara peraturan yang ada di Kota Yogyakarta mewajibkan hotel melakukan pumping test untuk mendapatkan Izin Pemakaian dan Pegusahaan Air Tanah. Pumping test bertujuan mengecek, apakah ada dampak perubahan dari pemakaian air tanah oleh pihak hotel ke permukaan air di sumur warga. Proses itu diawali dengan pengambilan contoh air untuk dianalisa. "Dulu memang pernah ada dua orang yang mengambil sampel air di rumah saya. Beberapa hari kemudian mereka datang lagi tapi tidak ada tindak lanjut," terang Supanut.

Proses selanjutnya, hotel melakukan pemompaan terhadap air tanah yang berada di lapisan akuifer, selama 24 jam. Lapisan akuifer merupakan lapisan batuan yang dapat ditembus air sehingga menghasilkan air tanah. "Akan lebih baik lagi bila pemompaan dilakukan selama 2x24 jam sehingga dampak lebih terlihat ," kata Doni memberi saran.

Ia lalu menjelaskan mengapa kekeringan terjadi di sumur warga Miliran. "Saat hotel melakukan pemompaan, lapisan batuan di sekelilingnya akan menurun. Air yang ada di sekitar sumur hotel juga menjadi turun, tergantung pada kedalaman saringan (screen) di pipa," katanya. Dampak dari turunnya air tanah tersebut terjadi pada area 250-300 meter di sekitar sumur hotel. Namun, besaran kedalamannya berbeda-beda. "Semakin ke hulu, cakupan air yang turun semakin luas, tetapi cakupannya menjadi kecil saat mengarah ke hilir. Bentuknya seperti elips," kata Doni.

Sampai saat ini masih belum ada kesepakatan tentang pumping test. "Kita masih tarik ulur sampai sekarang. Masih belum sepakat," terang Supanut. Dodok pun sependapat, ia khawatir terjadi manipulasi dalam pumping test. "Kami menolak karena tidak tahu bagaimana pumping test dilakukan. Lagipula, bila dilakukan selama 24 jam, siapa yang akan menunggui?" jelasnya.

Untuk sementara, Fave Hotel telah menyetujui poin tentang penggunaan air. "10% dari debit air yang digunakan hotel akan diberikan pada warga bila terjadi kekeringan," kata Supanut membeberkan. Kesepakatan itu sebenarnya menjadi tanggung jawab pemegang izin (atau dalam hal ini pihak hotel), yang tercantum dalam Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 28 Tahun 2013 tentang Perizinan Air Tanah di Kota Yogyakarta. Lebih tepatnya, pada pasal 15 huruf g.

M.Pramono Hadi, dosen program studi Geografi dan Ilmu Lingkungan, Fakultas Geografi UGM menuturkan, konflik terjadi salah satunya karena minimnya pengetahuan masyarakat tentang kondisi air tanah. "Lapisan tanah di Yogyakarta terbentuk dari pyroclastic Merapi," terangnya. Tanah ini bersifat porus, yakni mudah meloloskan air, sedangkan akuifer yang terbentuk merupakan akuifer semi-tertekan (semi-confined aquifer). Dengan demikian, air tanah melimpah sehingga masyarakat cenderung membuat sumur sendiri-sendiri. Ketika satu sumur menyedot air lebih banyak, sumur lain dapat mengering. Jika keadaannya seperti ini, pemerintah kesulitan mengatur penyediaan air.

"Semakin modern kehidupan seseorang, makin tinggi pula kebutuhan airnya," papar Pramono. Doni menambahkan, kebutuhan air rumah tangga, terlebih masyarakat perkotaan cenderung terus meningkat. Makin maraknya pembangunan, baik kos, rumah kontrakan, pertokoan, mall hingga rumah sakit juga berimbas pada turunnya permukaan air tanah.

"Jika PDAM mampu memenuhi kebutuhan air, maka tidak akan ada lagi protes mengenai ketersediaan air di masyarakat," komentar Doni yang juga anggota BLH Kota Yogyakarta ini. Menurutnya, pemerintah harus memilih satu daerah sebagai tempat pusat pengambilan air. "Setelah itu dilakukan distribusi merata ke masyarakat," terangnya. Sedangkan Pramono memberi saran supaya pemerintah mengadaptasi cara yang dilakukan pemerintah Jepang untuk membangun tempat penampungan air seperti bendungan atau waduk. "Sehingga ketika kemarau, masyarakat dapat menggunakan air yang telah ditampung tersebut," urainya.

Jika ketersediaan air telah dapat dijamin oleh pemerintah, maka masyarakat tidak diperbolehkan membuat sumur sendiri. Bila membuat pun, haruslah menggunakan perizinan dari pemerintah. "Dalam hal ini, baik pemerintah dan masyarakat juga memiliki tanggung jawab untuk pengelolaan dan penggunaan air," ungkap Pramono.

Dodok mengingatkan, krisis air ini bisa terjadi di mana saja. Persoalan di Miliran hanya salah satu yang berhasil terangkat. Dosen sosiologi UGM, R. Derajad S. Widhyarto pun menilai, munculnya gerakan penolakan masyarakat yang mengangkat isu krisis air tidak lagi menjadi isu privat melainkan sudah menjadi isu publik. Hal ini disebabkan kepentingan umum yang terusik, terutama berkaitan dengan hak-hak kemanusiaan.

Kala Warga *Mburi* Hotel Berbicara

Oleh Gilang Pradipta S., Anis Putri I., Rifky Afwakhoir

Sebagai bagian dari mordernitas pembangunan seringkali memunculkan efek yang tidak terduga. Pembangunan dengan dalih kesejahteraan misalnya, seringkali justru meniadakan masyarakat sebagai bagian dari faktor penting keberlanjutan perbadaban modern itu sendiri.

Yogyakarta merupakan salah satu destinasi wisata favorit di Indonesia. Kota ini memang telah dikenal sebagai kota wisata budaya karena rekam jejak sejarahnya. Buktinya tercatat pada Agustus 2014 lalu jumlah wisatawan yang datang ke Yogyakarta hingga mencapai 327.850 orang[1]. Jumlah ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2013 yang berjumlah 242.643. Salah satu ikon terkenal wisata di Yogyakarta seperti Malioboro, misalnya setiap musim liburan selalu ramai oleh wisatawan. Selain Malioboro, masih banyak tempat wisata di kota budaya ini. Misalnya saja Kraton Kilen, Taman Pintar dan Tugu Yogyakarta.

Selain rekam jejak sejarah dan budayanya, transportasi yang memadahi membuat Yogyakarta ramai dikunjungi wistawan. Letaknya yang berada di tengah perjalanan antara Jakarta dan Surabaya membuat akses menuju kota budaya ini sangatlah mudah. Banyak transportasi umum untuk menuju Yogyakarta. Beberapa diantaranya sebut saja bus, kereta dan juga pesawat terbang. Status Bandara Adi Sutjipto yang merupakan bandara internasional juga berpengaruh terhadap kunjungan wisatawan mancanegara ke kota ini lewat jalur udara. Banyak penerbangan langsung dari berbagai kota besar di Indonesia semakin menambah kemudahan akses ke kota ini.

Sebagai kota tujuan wisata, Yogyakarta sudah memenuhi salah satu komponen penting dalam industri pariwisata, yakni komponen 4A. Keempat komponen ini antara lain attraction (atraksi wisata), accesibility (akses untuk mencapai daerah wisata), amenity (fasilitas dan jasa wisata), dan ancillary (kelembagaan dan sumber daya manusia pendukung kepariwisataan). Komponen yang sudah dipenuhi oleh kota Yogyakarta salah satunya pada komponen accesibility. Hal itu terlihat dari adanya berbagai macam transportasi untuk mencapai daerah tujuan wisata di kota ini nmisalnya trans Jogja, andhong dan juga becak.

Banyaknya tempat wisata di kota ini akhirnya menarik para investor untuk mendirikan akomodasi bagi wisatawan. Salah satu bentuk investasinya ialah hotel. Berdasarkan Keputusan Menteri No 94/HK103/MPPT 1987, hotel adalah salah satu jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau keseluruhan bagian jasa pelayanan penginapan, penyedia makanan dan minuman serta jasa lainnya bagi masyarakat umum yang dikelola secara komersil. Tujuan pembangunan hotel secara umum ialah sebagai bentuk investasi terhadap banyaknya wisatawan yang menginap dan berlibur di Yogyakarta. Saat ini jumlah hotel di kota Yogyakarta sudah mencapai 401 unit. Jumlah ini terdiri dari 362 hotel non bintang dan 39 hotel berbintang. Jumlah itu diperkirakan



Foto: Ryma/BALAIRUNG

meningkat, mengingat tahun lalu pemerintah menerima 104 permohonan IMB. Dari data BPS Yogyakarta 2012, jumlah kamar hotel di kota ini baik dari hotel berbintang maupun hotel berbintang mencapai 9201 kamar.

Peningkatan jumlah hotel yang tak terkendali ini seperti peribahasa 'besar pasak daripada tiang'. Hotel sebagai bentuk investasi seharusnya mengikuti permintaan namun kenyataannya sekarang, hotel terus tumbuh tanpa melihat permintaan dari jumlah wisatawan. Penciptaan penawaran yang tidak diikuti dengan naiknya permintaan akan menyebabkan tingkat hunian kamar hotel menurun. Jumlah kamar yang begitu banyak tidak seimbang dengan tingkat okupansi hotel. Tingkat okupansi hotel adalah tingkat keterisian kamar hotel.

Menurut data dari BPS 2014, tingkat hunian hotel bintang atau biasa disebut okupansi pada bulan November lalu rata-rata sebesar 65,26%. Pada periode yang sama, tingkat okupansi non bintang hanya sebesar 26.39%[2] . Tingkat okupansi tinggi hanya dicapai ketika musim liburan saja. Selain tidak imbangnya antara tingkat hunian hotel dan jumlah hotel, banyaknya hotel ini menimbulkan kesan negatif dari warga. Bahkan muncul sindiran dari warga jika Yogya bukan kota budaya, melainkan kota hotel. Seperti diberitakan Kompas.com, banyaknya hotel di kota Yogyakarta ini sampai 'mengundang komentar' dari Sri Sultan[3]. Selain itu, pembangunan hotel yang tak terkendali menyebabkan protes dari warga yang disampaikan melalui mural yang bertulisan "Jogja Asat". Hal ini lantaran pembangunan hotel bisa menganggu keberadaan sumur warga akibat disedot airnya oleh hotel.

Dari berbagai protes warga, lalu muncul regulasi pembatasan (moratorium) hotel di wilayah kota Yogyakarta. Moratorium perizinan bangunan hotel telah tercantum dalam Peraturan Walikota (Perwal) No. 77 Tahun 2013 tentang Pengendalian Jumlah Hotel dalam pasal 4 ayat 1 bahwa permohonan IMB yang masuk sebelum masa berlaku moratorium tetap akan diproses. Anehnya, Perwal mengatur tentang permohonan IMB hotel harus telah terdaftar pada Dinas Perizinan sebelum 1 Januari 2014. Ironisnya sebelum moratorium diberlakukan sudah ada 106 pengajuan IMB hotel yang terlanjur masuk. Berarti masih ada kemungkinan bahwa hotel akan terus bertambah[4]. Beberapa peristiwa yang saling terkait dengan pembangunan hotel ini membuat kami bertanya-tanya. Salah satunya kepada warga sekitar yang daerahnya dekat atau pun sedang dibangun hotel. Bagaimana sikap warga yang di sekitar tempat tinggalnya didirikan hotel? Bagaimana tanggapan warga terhadap maraknya pembangunan hotel di sekitar mereka? Untuk menjawab dua pertanyaan tersebut kami melakukan survei terkait pendapat warga yang tinggal di sekitar hotel khususnya di kota Yogyakarta. Secara lekas penelitian ini ingin mengetahui sikap warga yang tinggal disekitar hotel terhadap pembangunan hotel. Pengambilan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner di beberapa titik. Survei ini menggunakan teknik penarikan sampling purposif. Responden yang kami pilih adalah mereka yang berdomisili di sekitaran hotel. Kami mengambil sampel sebanyak 50 responden. Lebih lanjut,



Foto: Ryma/BALAIRUNG

penelitian ini tidak bisa menggambarkan semua sikap masyarakat kota Yogyakarta terhadap pembangunan hotel.

Selain menyebar kuisioner, kami tim riset Balairung juga mewawancarai beberapa tokoh masyarakat yang tinggal di area hotel sebagai informan tambahan. Dari berbagai titik lokasi dibanggunnya hotel, kami memilih beberapa titik lokasi sebagai penggalian informasi yaitu di sekitar Hotel Jambuluwuk, Hotel Tentrem, Fave Hotel, dan Ibis Styles Hotel. Berbagai hotel tersebut berdiri megah di tengah-tengah kota Yogyakarta. Jambuluwuk berlokasi di daerah Lempuyangan, Hotel Tentrem di daerah Jalan Monjali, Fave hotel di sekitar miliran, dan Ibis Styles hotel di Jalan Dagen. Setiap hotel mempunyai kisahnya masing-masing terkait dinamika pembangunannya. Keempatnya pun tergolong hotel baru lantaran baru dibangun kurang dari lima tahun yang lalu.

******

Secara toritis, sikap merupakan evaluasi terhadap berbagai aspek dalam dunia sosial. Evaluasi terhadap objek tertentu ini tidak selalu seragam positif atau negatif. Menurut W. Mc. Guire (dalam Masiming, 2008)[5] sikap ialah respon manusia yang menempatkan objek yang dipikirkan (objects of thought) ke dalam suatu dimensi pertimbangan (dimension of judgements). Objek-objek yang dimaksud adalah segala sesuatu yang dapat dinilai oleh manusia seperti benda, fenomena, isu, dsb.

Ada tiga karakteristik sikap menurut Perlman dan Cozby (1983 dalam Masiming, 2008) dalam As'ad (2004 dalam Masiming, 2008). Pertama, sikap bersifat relatif stabil, tahan lama, menetap pada individu dan sukar berubah. Kedua, sikap bukan merupakan bawaan tetapi hasil belajar dan merupakan proses yang dipengaruhi kehidupan individu. Ketiga, sikap diasumsikan mempengaruhi perilaku yaitu tindakan individu diyakini merupakan refleksi dari sikapnya terhadap objek tersebut. Dengan demikian, sikap merupakan suatu kecenderungan berperilaku terhadap suatu objek tertentu yang menunjukkan rasa suka dan rasa tidak suka, setuju dan tidak setuju serta mengandung tiga komponen yang mengorganisasikan sikap individu tersebut yaitu kognitif, afektif, dan konatif.

Evaluasi kognitif masyarakat terhadap pembangunan hotel mengarah pada kesadaran masyarakat mengenai pembangunan hotel. Sementara itu, evaluasi afektif masyarakat terhadap pembangunan hotel mengarah pada perasaan positif atau negatif masyarakat terhadap pembangunan hotel. Sikap afeksi ini menggambarkan hubungan perasaan emosional terhadap objek tertentu, yaitu suka/tidak suka atau setuju/tidak setuju terhadap objek yang dimaksud. Komponen sikap yang terakhir, yaitu evaluasi konatif ini merujuk pada tendensi sikap masyarakat untuk melakukan tindakan tertentu yang berhubungan dengan pembangunan hotel. Evaluasi konatif ini menunjukkan kecenderungan perilaku yang terdapat dalam diri individu.

Pembangunan hotel dalam tulisan ini secara umum berkaitkan dengan efek yang ditimbulkan oleh hotel. Pembangunan hotel ini dinilai memberikan dampak negatif pada lingkungan sekitar. Dampak tersebut antara lain adalah dampak sosial ekonomi, sosial budaya dan juga dampak lingkungan [6].Selain itu, kami menambahkan adanya

dampak fisik. Dampak fisik ini merupakan akibat yang ditimbulkan dari bentuk bangunan seperti tinggi bangunan, luas parkir dan juga luas bangunan.

******

Dari hasil analisis survei kami menggambil kesimpulan, evaluasi kognitif terkait pengetahuan masyarakat mengenai hotel ternyata sudah tinggi. Pengetahuan itu meliputi bentuk fisik seperti tinggi, luas, dampak lingkungan, dampak sosial ekonomi dan juga dampak lalu lintas yang ditimbulkan. Hasil sebaliknya ditunjukkan pada beberapa poin seperti pengetahuan warga mengenai hotel yang dibangun jauh dari permukiman warga. Artinya, hasil itu menunjukkan bahwa kebanyakan hotel dibangun dekat dengan area pemukiman warga. Selain itu, warga yang tinggal disekitar hotel ternyata tidak melihat adanya limbah yang dihasilkan dari hotel. Mereka yang mengetahui dan tidak mengetahui jumlahnya tidak terpaut jauh. Mereka yang mengetahui limbah yang ditimbulkan dari hotel berjumlah 53%. Sebaliknya, mereka yang tidak mengetahui berjumlah 47 % responden.

Terkait pendapat warga ketika ditanya suka atau tidak suka terkait pembangunan hotel rata-rata menyetujui pernyataan yang kami buat. Kesetujuan mereka pada beberapa poin. Diantaranya adalah warga setuju jika hotel dibangun kurang dari lima lantai. Selain itu, warga setuju jika hotel dibangun jauh dari permukiman. Kemudian warga setuju jika pembangunan hotel menimbulkan perubahan akses jalan ke rumah mereka. Selanjutnya, warga setuju jika hotel pasti menimbulkan limbah disekitar lingkungan mereka walaupun sebagian besar warga belum melihatnya secara langsung. Memang hal ini bertentangan dengan pengetahuan warga mengenai limbah yang ditimbulkan bagi hotel.

Warga juga menyatakan ketidak setujuannya pada beberapa hal. Beberapa diantaranya adalah mereka tidak setuju jika hotel dibangun lebih dari lima lantai. Jumlahnya ada 57 % warga tidak berharap hotel dibangun lebih dari lima lantai. Mereka beranggapan jika hotel dibangun lebih dari lima lantai akan menyulitkan akses mereka terhadap sinar matahari. Hal itu diperkuat dari hasil wawancara dengan salah satu informan, mereka berpendapat jika hotel dibangun lebih dari lima lantai akan mengganggu hak mereka untuk mendapatkan sinar matahari. Bahkan kompleks rumah yang berada dibelakang Hotel Ibis Styles sulit mendapatkan sinar matahari. Jika ingin mengeringkan pakaian, mereka hanya bisa menggunakan angin yang berhembus. Selain itu, angin akan dipantulkan kembali oleh hotel sehingga angin akan terjebak di permukiman warga. Angin yang terperangkap ini hembusannya sangat kencang. Hal itu dikeluhkan oleh warga yang berumah dibelakang hotel Jambuluwuk.

Sementara itu, ada 85 % warga berharap agar pembangunan hotel tetap memperhatikan kelestarian air tanah. Mereka tidak ingin air sumur yang biasa digunakan untuk konsumsi sehari-hari kering karena hotel yang menyedot air tanah. Ada 63 % warga juga berharap pembangunan hotel akan berdampak bagi kegiatan warga. Misalnya saja ketika ada acara warga, mereka ingin pihak hotel turut berpartisipasi tanpa perlu dipaksa. Dalam hal ekonomi juga demikian, 46 % masyarakat berharap pembangunan hotel berdampak pada ekonomi warga sekitar. Mereka ingin agar pembangunan hotel akan membuka lowongan pekerjaa bagi warga sekitar. Hampir seluruh warga berharap hotel yang dibangun memiliki tempat parkir yang luas. Hal ini agar tamu hotel tidak mengambil badan jalan sebagai tempat parkir. Selain mengganggu lalu lintas, hal itu akan membuat warga untuk masuk ke jalan menuju rumah mereka.

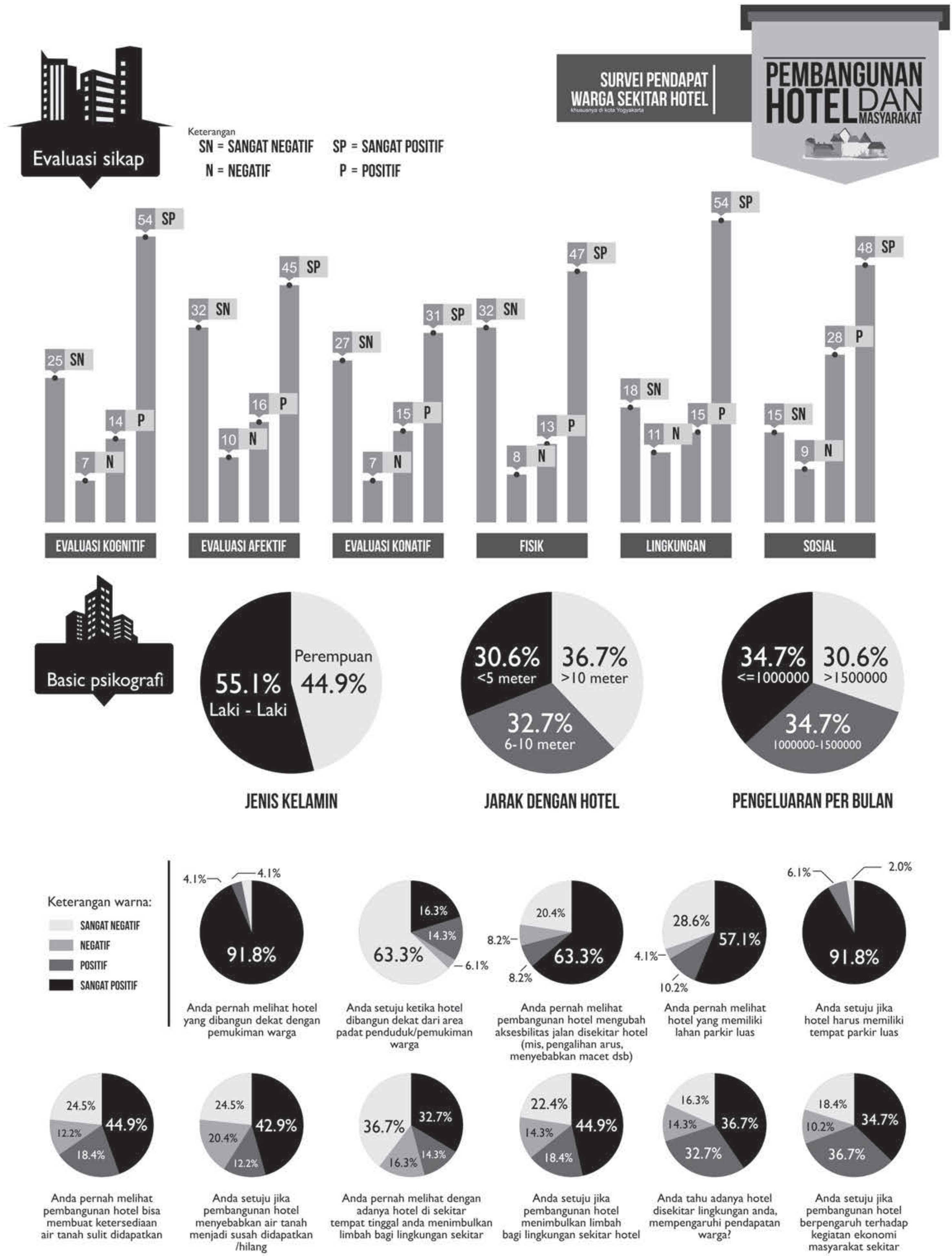
Seperti yang tadi sudah dikemukakan, pembangunan hotel ini memiliki berbagai efek. Kami mengkategorikan efek dalam beberapa jenis. Kategori pertama adalah efek lingkungan. Kami memasukkan pertanyaan mengenai limbah dari hotel dan juga mengenai air tanah sebagai kategori efek lingkungan. Kedua adalah efek fisik, tinggi, luas bangunan dan juga parkiran hotel masuk dalam kategori ini. Kami memasukkan ekonomi dan kegiatan warga yang terpengaruh dalam kaetgori efek sosial budaya.

Dari penilitian yang kami lakukan, ternyata masyarakat bersikap positif terhadap adanya dampak pembangunan hotel. Artinya mereka sadar bahwa pembangunan hotel memiliki efek terhadap lingkungan tempat tinggalnya. Hal ini dapat diketahui ketika dari hasil wawancara dengan beberapa informan. Hotel memiliki efek terhadap air tanah, beberapa sumur warga sempat kering beberapa hari bulan setelah hotel mulai beroperasi. Namun demikian, warga tidak melihat adanya limbah yang ditimbulkan oleh hotel. Umumnya limbah hote dibuang langsung pada saluran air bawah tanah sehingga tidak mengganggu warga.

Dampak sosial ekonomi[7] mengelompokkannya dalam sepuluh kelompok. Pertama dampak keterkaitan dan keterlibatan antara masyarakat setempat dan masyarakat yang lebih luas, termasuk otonomi atau ketergantungannya. Kedua adalah dampak terhadap hubungan interpersonal antara anggota masyarakat. Selanjutnya adalah dampak terhadap lembaga/organisasi sosial, migrasi dari dan ke daerah pariwisata, ritme kehidupan sosial masyarakat. Kemudian dampak terhadap pola pembagian kerja, stratifikasi dan mobilitas sosial, distribusi pengaruh dan kekuasaan. Kesembilan dampak terhadap meningkatnya penyimpangan-penyimpangan sosial dan terhadap bidang kesenian dan adat. Dalam penelitian ini kami tidak memasukkan semua dampak dari Cohen ini, melainkan hanya diambil tiga poin saja.

Responden yang kami tanyai mengenai efek sosial ekonomi bersikap positif. Sikap positif ini merujuk bahwa responden secara afektif, konatif dan kognitif berpandangan pembangunan hotel memberi kontribusi negatif pada kegiatan ekonomi dan bermasyarakat mereka. Misalnya saja di hotel Jambuluwuk yang berkurang drastis jumlah warga dalam satu RT. Tidak semua efek sosial ekonomi yang ditimbulkan oleh hotel ini negatif. Contoh positifnya adalah hotel turut menyumbang sejumlah uang untuk kas RW setiap bulannya.

Dari hasil wawancara berbagai informan, kami mendapat beberapa catatan menarik terkait dampak pembangunan hotel dari awal prosesnya hingga berdirinya hotel. Berbagai kerugian yang dialami oleh



SURVEI PENDAPAT
WARGA SEKITAR HOTEL
khususnya di kota Yogyakarta
PEMBANGUNAN
HOTEL DAN MASYARAKAT
Evaluasi sikap
Keterangan
SN = SANGAT NEGATIF
SP = SANGAT POSITIF
N = NEGATIF
P = POSITIF
25 SN
7 N
14 P
54 SP
EVALUASI KOGNITIF
32 SN
10 N
16 P
45 SP
EVALUASI AFEKTIF
27 SN
7 N
15 P
31 SP
EVALUASI KONATIF
32 SN
8 N
13 P
47 SP
FISIK
18 SN
11 N
15 P
54 SP
LINGKUNGAN
15 SN
9 N
28 P
48 SP
SOSIAL
Basic psikografi
55.1% Laki - Laki
Perempuan 44.9%
JENIS KELAMIN
30.6% <5 meter
36.7% >10 meter
32.7% 6-10 meter
JARAK DENGAN HOTEL
34.7% <=1000000
30.6% >1500000
34.7% 1000000-1500000
PENGELUARAN PER BULAN
Keterangan warna:
SANGAT NEGATIF
NEGATIF
POSITIF
SANGAT POSITIF
4.1%
4.1%
91.8%
Anda pernah melihat hotel yang dibangun dekat dengan pemukiman warga
16.3%
14.3%
6.1%
63.3%
Anda setuju ketika hotel dibangun dekat dari area padat penduduk/pemukiman warga
20.4%
8.2%
8.2%
63.3%
Anda pernah melihat pembangunan hotel mengubah aksesbilitas jalan disekitar hotel (mis, pengalihan arus, menyebabkan macet dsb)
28.6%
4.1%
10.2%
57.1%
Anda pernah melihat hotel yang memiliki lahan parkir luas
6.1%
2.0%
91.8%
Anda setuju jika hotel harus memiliki tempat parkir luas
24.5%
12.2%
18.4%
44.9%
Anda pernah melihat pembangunan hotel bisa membuat ketersediaan air tanah sulit didapatkan
24.5%
20.4%
12.2%
42.9%
Anda setuju jika pembangunan hotel menyebabkan air tanah menjadi susah didapatkan /hilang
36.7%
16.3%
14.3%
32.7%
Anda pernah melihat dengan adanya hotel di sekitar tempat tinggal anda menimbulkan limbah bagi lingkungan sekitar
22.4%
14.3%
18.4%
44.9%
Anda setuju jika pembangunan hotel menimbulkan limbah bagi lingkungan sekitar hotel
16.3%
14.3%
32.7%
36.7%
Anda tahu adanya hotel disekitar lingkungan anda, mempengaruhi pendapatan warga?
18.4%
10.2%
36.7%
34.7%
Anda setuju jika pembangunan hotel berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi masyarakat sekitar

masyarakat memiliki cerita tersendiri karena setiap hotel memiliki cerita yang berbeda. Salah satu informan yang tinggal di sekitar Hotel Jambuluwuk menceritakan tentang bangunan hotel yang cukup menganggu warga sekitar. Seperti bangunan fisik hotel yang sangat mepet dengan rumah penduduk. Proses awal pembangunan hotel terkait masalah material bangunan. Seperti kayu penyangga, triplek, maupun bambu yang tidak sengaja jatuh mengenai rumah warga. Bentuk rupa fisik bangunan hotel Jambuluwuk pun juga retak dapat dikhawatirkan mencelakai warga ketika terjadi gempa.

Ironisnya, Kerugian lain seperti dampak sosial masyarakat juga terjadi di sekitar Hotel Tentrem. Hotel ini berkelas bintang lima, memiliki luas sekitar 1000 m^2 dan berlokasi di sekitar jalan Monjali[8]. Hotel yang luas tentu saja membutuhkan lahan yang luas guna membangunnya. Sebelum dibangun hotel, lahan tempat berdirinya Hotel Tentrem adalah permukiman warga. Pengelola proyek membeli tanah warga dan hanya menyisakan beberapa rumah saja dalam satu RT. Hal ini menyebabkan terganggunya kegiatan warga. Salah satu warga disekitar hotel menceritakan bahwa kehidupan sosial masyarakat seakan mati suri. Rumah warga yang telah dibeli oleh Hotel Tentrem di RT 31 sisanya tinggal tiga rumah. Akibatnya, banyak rumah sekitar hotel yang akhirnya dikontrakkan atau dijual. Hal tersebut menjadi pengaruh yang cukup serius bagi kegiatan masyarakat. Kegiatan masyarakat seperti pengajian, hari raya, kematian, atau kegiatan yang lainnya menjadi sepi sehingga animo partisipasi



masyarakatnya menjadi berkurang.

Dinamika terkait pembangunan hotel juga terjadi di sekitar Miliran yaitu di sekitar Hotel Fave. Kondisi fisik Fave Hotel hanya memiliki tiga lantai dan cukup memiliki tempat parkir yang luas. Tetapi menurut salah satu warga sekitar hotel bercerita tentang berkurangnya kapasitas air sumur milik warga. Puluhan warga disekitar Hotel Fave, Miliran mengadakan aksi demo dengan membawa spanduk. Warga mengeluhkan sumur mereka kering sejak adanya hotel tersebut[9]. Warga juga menuntut hotel tidak diperbolehkan memakai sumur bor, tetapi harus memakai sumur air dalam. Selain masalah sumur, warga juga mnegeluhkan tidak ada komunikasi yang baik saa pihak hotel ingin mendirikn bangunannya. Warga disodori kertas kosong untuk ditanda tangani. Mereka tidak diberitahu tujuan penandatanganan ini, ternyata kertas tersebut adalah tanda persetujuan warga atas dibangunnya hotel dekat permukiman.

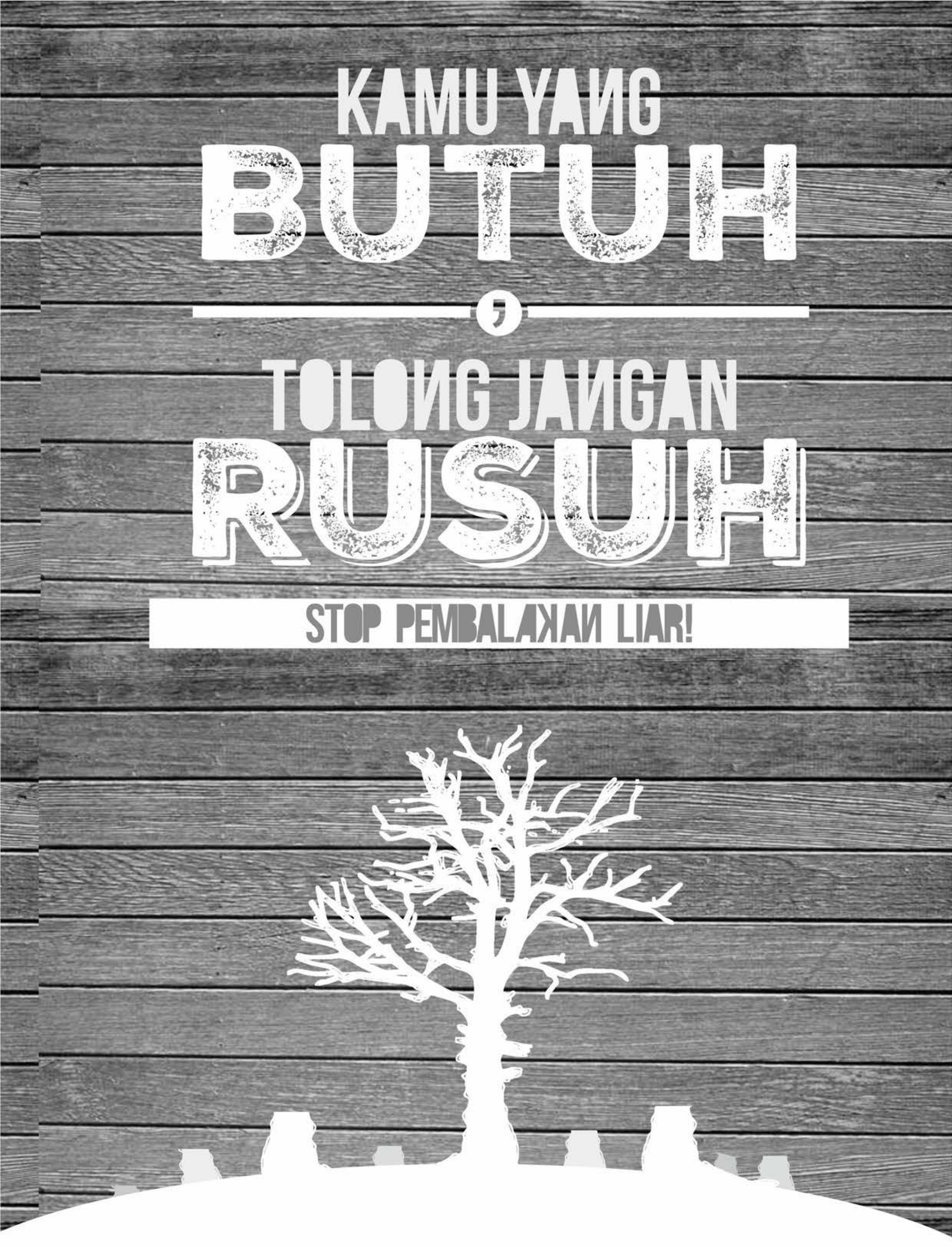
Secara umum hasil analisis menujukkan sikap warga yang positif terhadap efek pembangunan hotel di sekitar tempat tinggalnya. Hal ini bukan berarti mereka mendukung pembangunan hotel, namun mereka tahu akan dampak dari yang ditimbulkan hotel. Kebanyakan dari masyarakat disekitar hotel merasakan dampak-dampaknya. Walaupun ada beberapa warga yang tinggal disekitar hotel bersikap mendukung, tetapi lebih banyak warga yang bersikap negatif sekitar 50 % lebih. Adanya warga yang bersikap mendukung terhadap pembangunan hotel sangat boleh jadi karena mendapat keuntungan langsung dari beridirinya hotel. Salah satunya diberikan uang kompensasi lebih banyak dari pihak hotel. Selain itu, tanah mereka juga berharap dibeli dengan harga tinggi oleh pihak manajemen hotel.

Dari penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa warga lebih condong bersikap negatif atas berbagai efek yang ditimbulkan oleh pembangunan hotel. Di samping itu, mereka sebagai bagian dari pembangunan cukup memiliki pengetahuan mengenai bentuk fisik hotel dan melihat efeknya bagi mereka. Secara afektif mereka menyutujui jika pembangunan hotel benar-benar memiliki efek bagi mereka. Artinya, sedikit banyak pembangunan hotel turut merubah kondisi sosiokultural masyarakat di sekitar pembangunan hotel. Akan tetapi secara konatif, mereka tidak berharap pada pembangunan hotel. Selain itu, mereka merasakan dampak diberbagai sisi. Misalnya, dari sisi fisik, warga terganggu dengan tinggi dan luas hotel yang semakin menghimpit tempat tinggal mereka. Sinar matahari menjadi hal yang langka di rumah mereka. Kemudian dari sisi sosial budaya mereka juga terkena dampaknya. Pembangunan hotel membuat kehidupan sosial ekonomi masyarakat berubah. Hotel merubah demografi perkampungan disekitarnya.

Dari segi ekonomi, hotel memberikan dianggap memberi efek yang positif. Misalnya, warga berpendapat, hotel memberikan pajak kepada daerah dan menyerap tenaga kerja. Hotel juga memberikan multiplier effect[10] yang besar. Namun begitu juga dengan dampak negatif yang dibawanya. Hal positif dan negatif dari pembangunan hotel bak dua sisi uang logam. Alangkah baiknya jika pemerintah memperhatikan masyarakat yang tinggal di kawasan yang akan dibangun hotel.

ENDNOTES

1. Pikiran Rakyat Senin, 26 Jan, 2015. Wisatawan Memadati Jalanan Yogyakarta. http://www.pikiran-rakyat.com/node/309790 Diakses pada 26 Januari 2015 15.25
2. Data BPS No. 03/01/34/Th.XVII, 2 Januari 2015
3. Sultan HB X: Kendalikan Pembangunan Hotel, 23 Agustus 2014 http://regional.kompas.com/read/2014/08/23/12165641/Sultan.HB.X.Kendalikan.Pembangunan.Hotel
4. Moratorium Pembangunan Hotel di Yogyakarta Dinilai Tidak Efektif http://nationalgeographic.co.id/berita/2014/07/moratorium-pembangunan-hotel-di-yogyakarta-dinilai-tidak-efektif diakses pada 26 Januari 2015 pukul 18.43 WIB
5. Pitana, Gayatri. Sosiologi Pariwisata. 2005. Andi Offset:Yogyakarta
6. Masiming, Zulfitria. 2008. Sikap Masyarakat Terhadap Perletakan Tempat Jemur Kaitannya Dengan Estetika. Jurnal SMARTek, Vol. 6, No. 1, Hal. 53-62.
7. Pitana, Gayatri. Sosiologi Pariwisata. 2005. Andi Offset:Yogyakarta
8. Keterangan dari Pak RT 31, Kampung utara Hotel Tentrem
9. Puluhan Warga Miliran Umbulharjo Demo Hotel Fave Kusumanegara, http://www.tribunnews.com/regional/2014/09/03/puluhan-warga-miliran-umbulharjo-demo-hotel-fave-kusumanegara Diakses pada 27 Januari 2015 Pukul 15.17
10. Glasson (1990) multiplier effects adalah suatu kegiatan yang dapat memacu timbulnya kegiatan lain. Berdasarkan teori ini dapat dijelaskan bahwa industri pariwisata akan menggerakkan industri-industri lain sebagai pendukungnya. Komponen utama industri pariwisata adalah daya tarik wisata berupa destinasi dan atraksi wisata, perhotelan, restoran dan transportasi lokal. Sementara komponen pendukungnya, mencakup industri-industri dalam bidang transportasi, makanan dan minuman, perbankan, atau bahkan manufaktur. Semuanya dapat dipacu dari industri pariwisata.


KAMU YANG
BUTUH
,
TOLONG JANGAN
RUSUH
STOP PEMBALAKAN LIAR!

SELAMAT KEPADA:
para awak balairung

M. Misbahul Ulum, S. IP.
Pemimpin Umum 2013

Yolanda Fajar Nurmanto, S. IP.
Pemimpin Perusahaan 2013

Hary Prasojo Syafa'atillah, S. S.
Kepala Produksi dan Artistik 2013

Muhammad Sofwan Hadi, S. IP.
Biro Pengembangan 2009

Ahmad Musthofa Haroen, S. IP.
Kepala Riset 2009

Robertus Roni Setiawan, S. IP.
Redaktur Bahasa 2010

Ahmad Choirudin, S. IP.
Pemimpin Umum 2009

Didik Sri Hartopo, S. IP.
Staf Divisi Redaksi 2013

Rifqi muhammad, S. Fil.
Staf Divisi Redaksi 2006

Fransiska Damaratri, S.T
Staf Divisi Redaksi 2012

Ratih Wilda Oktafiana, S. IP.
Staf Divisi Redaksi 2013

Hanindya Naafiani, S.S.
Staf Divisi Redaksi 2013

Muhammad Adib, S. IP.
Staf Divisi Redaksi 2013

Tommy Gustaviano Yeza, S.P.
Redaktur Artistik 2013

Herman Siswanto, A. Md
Webmaster-Staf Divisi Perusahaan 2014

Maria Rosarina, S. IP.
Staf Divisi Perusahaan 2009

Anggi Purbawisesa, S. Sos.
Kreatif Divisi Redaksi 2010

Nabilah Munsyarihah, S. IP.
Sekretaris Umum 2010

Hesa Adrian Kaswanda, S.H.
Staf Divisi Redaksi 2010

Ghofur Muhammad, S. IP.
Kepala Riset 2008



Akhirnya LULUS juga 2015

"Sometimes the hardest part isn't letting go but rather learning to start over"

Badan Penerbitan Pers Mahasiswa BALAIRUNG Universitas Gadjah Mada

Mengucapkan selamat kepada para awak kami yang sudah menyelesaikan studinya di Universitas Gadjah Mada

Pariwisata sebagai Salah Satu Kekuatan Ekonomi Daerah

Peluang perkembangan sektor turunan pariwisata patut untuk segera ditindaklajuti. Sektor tersebut yang nantinya diharapkan mampu menyokong sektor pariwisata secara keseluruhan.

Oleh Aryo Andityo

Pertumbuhan ekonomi telah menjadi perhatian pemerintah Indonesia cukup lama untuk menekan angka pengangguran dan kemiskinan di masyarakat. Investasi merupakan salah satu motor penggerak dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi. Lewat pertumbuhan ekonomi diharapkan menciptakan lapangan kerja yang lebih luas. Dengan begitu, meningkatnya lapangan pekerjaan akan meningkatkan pendapatan yang berujung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Bab invastasi terutama penanaman modal juga diamanatkan dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, menciptakan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan daya saing dunia usaha nasional, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan, dan mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi yang riil.

Aktivitas investasi ternyata juga menjadi perhatian bagi Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta. Untuk meningkatkan investasi di Yogyakarta, Pemkot membuat pemetaan sektor-sektor yang bisa memberikan peluang usaha dan bisa dimanfaatkan bagi para investor. Dalam usaha untuk menyusun informasi investasi atau peluang usaha di Yogyakarta penelitian dengan judul Penyusunan informasi Peluang Usaha Sektor Prioritas 1 di Kota Yogyakarta kemudian dilakukan. Penelitian ini dibuat oleh Pemkot Yogyakarta, dalam hal ini adalah Bagian Perekonomian Pengembangan Pendapatan Asli Daerah bekerjasama dengan Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta dan Pusat Studi Pariwisata UGM. Secara lebih spesifik, penelitian ini akan lebih banyak membahas peluang-peluang usaha pada sektor pariwisata berserta turunannya.

Selain memiliki tujuan yang sifatnya strategis, penelitian ini juga merupakan mandat dari Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No.14 Tahun 2011. Hal itu juga didukung lewat Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2010 dalam Pelaksanaan Investasi pada Kepariwisataan. Sasaran yang dicapai yaitu diperolehnya data statistik terkait sektor pariwisata, mendapatkan kajian yang mendalam tentang sektor tersebut, mengindentifikasi banyaknya peluang usaha, adanya kajian yang mendalam tentang peluang tersebut, tersusunnya data tersebut dan data rekomendasi atas data tersebut. Dalam penelitian ini menggunakan metode gabungan antara metode penelitian deskriptif kualitatif dan kuatitatif. Dalam hal ini, analisis kuantitatif diperuntukan guna melakukan analisa peluang usaha. Sedangkan analisis kualitatif digunakan untuk mendapatkan data gamabaran yang lebih mendalam terkait peluang usaha dan investasi.

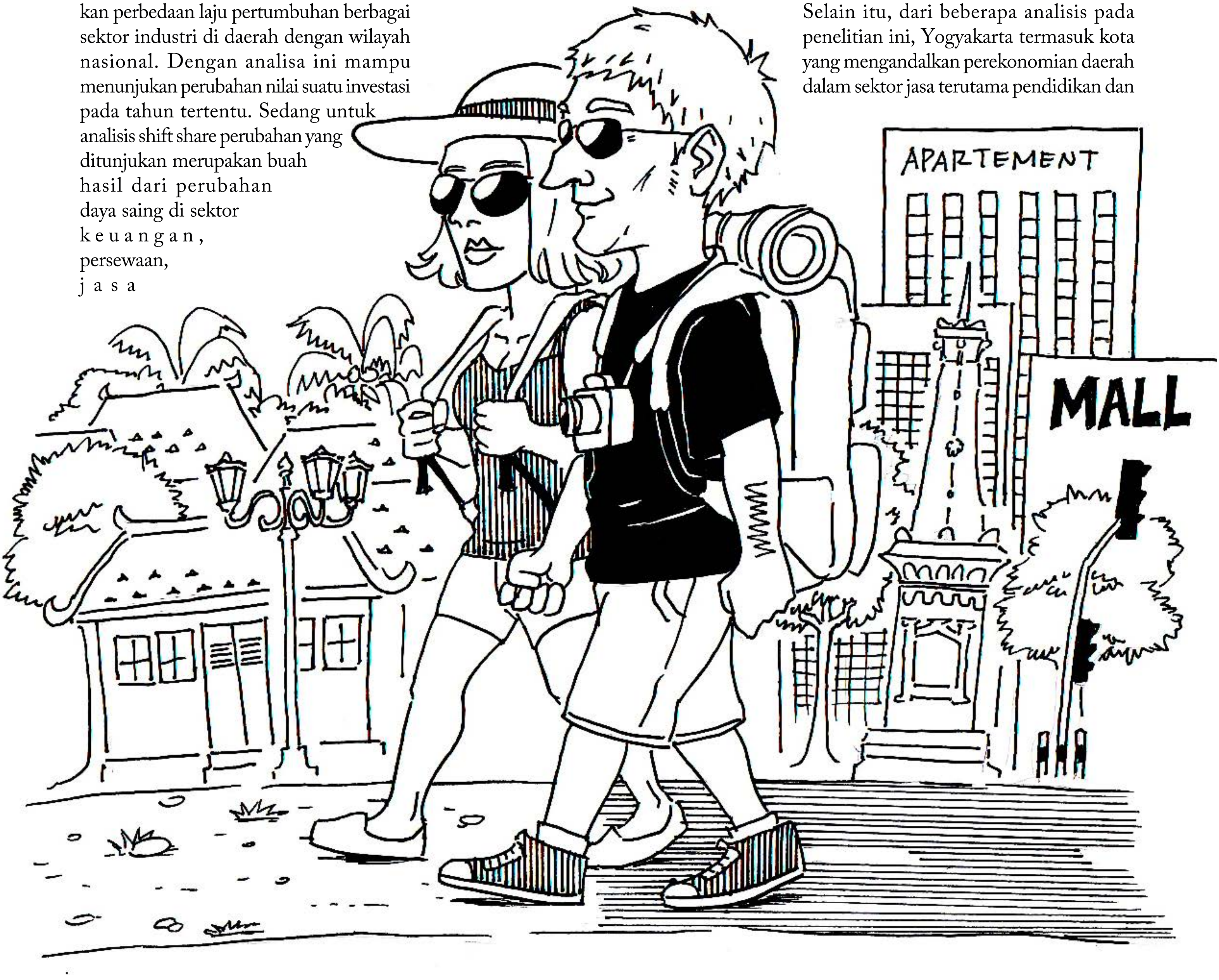
Penelitian ini mampu menunjukan bahwa pada rentang waktu 2010-2013, kota ini memiliki keunggulan usaha pada banyak sektor. Misalnya seperti sektor angkutan dan komunikasi, keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, listrik, gas dan air bersih, perdagangan, serta restoran dan hotel. Dari sektor-sektor tersebut, sektor yang pariwisatalah yang ternyata memliki pertumbuhan yang cukup signifikan. Angka pertumbuhan sektor tersebut mencapai 5,97% per tahun selama 4 tahun terakhir berdasarkan analisis tipologi klasen. Analisis tipologi klasen merupakan analisa yang dilakukan dengan cara membandingkan tingkat kemajuan suatu wilayah dengan wilayah lain dalam suatu lingkup referensi yang sama. Secara teknis, metode ini mengelompokan wilayah berdasarkan dua karakteristik yang dimiliki wilayah tersebut yaitu Produk Domestik Regional Bruto(PDRB) perkapita dan laju pertumbuhan ekonomi.Dari analisis itu, dihasilkan bahwa sektor pariwisata dapat dikelompokkan mejadi empat kategori. Pertama, kategori maju. Misalnya sektor angkutan dan komunikasi. Kedua, kategori

berkembang dalam hal ini adalah listrik, gas dan air bersih, perdagangan, restoran, dan hotel, keuangan, persewaan dan jasa perusahaan jasa. Ketiga, kategori potensial. Di dalam kategori ini tidak menemukan adanya sektor yang masuk pada kategori ini. Keempat, kategori terbelakang. Sektor yang masuk dalam kategori ini misalnya pertanian, pertambangan, industri pengolahan, dan bangunan.

Penguatan hasil penilitian juga ditunjukan dari analisis Shift Share selama rentang waktu 2011-2013. Analisis shift share merupakan analisis untuk mengetahui perubahan struktur dengan membandingkan perbedaan laju pertumbuhan berbagai sektor industri di daerah dengan wilayah nasional. Dengan analisa ini mampu menunjukan perubahan nilai suatu investasi pada tahun tertentu. Sedang untuk analisis shift share perubahan yang ditunjukan merupakan buah hasil dari perubahan daya saing di sektor keuangan, persewaan, jasa perusahaan dan industri pengolahan.

Dalam pelaksanaannya, aktivitas investasi yang berlangsung pada suatu daerah bersinggungan dengan proses transformasi struktur ekonomi. Hal itu diawali dengan dominasi sektor primer menuju sektor sekunder. Di Yogyakarta, sektor primer tersebut adalah pertanian dan pertambangan sedangkan sektor sekunder adalah industri. Transformasi struktur ekonomi ini akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi baik segi infrastruktur maupun sosial. Pertumbuhan ekonomi inilah yang akan mendorong peningkatan pendapatan perkapita daerah Yogyakarta.

Perolehan data perekonomian Yogyakarta pada 2011-2013 menunjukan bahwa sektor primer mengalami penurunan 0,32% dan kian menurun hingga 0,02% pada 2013. Penurunan ini dibarengi oleh penurunan sektor sekunder dan peningkatan sektor jasa. Sektor sekunder mengalami penurunan 19,66% pada 2011 dan menjadi 18,68% pada 2013. Berdasarkan tahapan industri, suatu daerah dikatakan "daerah industri" apabila sektor industrinya melebihi 30%. Sedangkan apabila sektor industrinya berkisar 20%-30% merupakan daerah semi industri. Mengacu pada hal tersebut Yogyakarta merupakan kota semi industri. Selain itu, dari beberapa analisis pada penelitian ini, Yogyakarta termasuk kota yang mengandalkan perekonomian daerah dalam sektor jasa terutama pendidikan dan



pariwisata.

Adanya kedatangan wisatawan dan banyaknya investor pada bidang pariwisata menciptakan suatu peluang baru dalam mengembangkan suatu usaha. Peluang ini merupakan titik temu antara kebutuhan investasi daerah dengan banyaknya minat wisatawan terhadap fenomena yang ada. Tidak salah apabila pemerintah daerah Yogyakarta memberikan dorongan keras bagi aktivitas ekonomi di sektor pariwisata.

Menurut penilitian yang selesai pada september 2014 ini, terdapat lima hal yang menarik bagi perhatian para wisatawan asing dan wisatawan domestik yaitu: obyek pariwisata, suasana, budaya, pendidikan dan sejarah. Proporsi dari kelima hal tersebut adalah pariwisata dengan tingkat perolehan angka 22,9%, suasana sebesar 16,4%, budaya sebesar 13%, pendidikan dengan 11% dan yang terakhir adalah sejarah dengan 9,3%. Dari kelima hal tersebut, serta untuk memudahkan kepentingan manajemen, pemerintah Yogyakarta telah mengelompokkan area tersebut pada titik yang strategis secara geografis.

Hal-hal yang menjadi ketertarikan wisatawan secara sendirinya memunculkan suatu turunan bisnis yang potensial bagi investor. Turunan bisnis tersebut datang dari atraksi wisata 88%, makanan dan minuman 1,4%, oleh-oleh 1,4%, suvenir 2,4% dan gedung pertemuan 2,6%. Dari aktivitas tersebut dapat di korelasikan dengan tingkat banyaknya pengeluaran wisatawan rata-rata dalam menikmati pariwisata Yogyakarta. Pengeluaran yang paling besar adalah untuk transportasi sebesar 53%, kemudian akomodasi 15%, makan dan minuman 10%, oleh-oleh sebesar 7,2% dan hiburan-hiburan lainnya sebesar 6%. Tingkat pengeluaran wisatawan tersebut diukur dari proporsi pembelanjaan wisatawan yang melancong ke Yogyakarta.

Dari kelima turunan bisnis itu memunculkan peluang-peluang usaha untuk menyokong pariwisata. Beberapa Usaha Jenis Pariwisata (UJP) yang diteliti menunjukan bahwa pada sektor aktivitas bisnis makanan dan minuman hanya mengalami pergerakan modal sebesar lima juta rupiah sampai dua puluh lima juta rupiah. Hal ini masih merupakan angka yang ralatif kecil bagi UJP umumnya. Selain itu, dengan adanya pengaruh persaingan usaha jenis lain, UJP masih belum memiliki posisi yang kuat dalam pasar.

Barang yang biasa diminati turis asing maupun domestik adalah makanan ataupun suvenir. Tetapi sayangnya, hal tersebut belum tercukupi oleh UJP makanan dan minuman pun toko – toko suvenir selama ini. Banyaknya permintaan pembeli akan oleh-oleh ini belum bisa dipenuhi oleh produsen makanan dan minuman pun juga produsen suvenir. Alat-alat sederhana dan konvensional ditambah harga bahan-bahan untuk membuat makanan dan minuman yang fluktuatif menjadikan kendala bagi produsen dalam menghasilkan produk andalan. Efisiensi inilah yang perlu diperhatikan pemerintah Yogyakarta dalam mendorong produksi oleh-oleh bagi penikmat Yogyakarta.

Kendala utama UJP berada pada hampir seluruh komponen dalam pendirian suatu entitas bisnis. Mulai dari pengurusan ijin usaha, akses permodalan, perluasan lahan, pelatihan tenaga kerja, media promosi dan pemasaran produk produk UJP. Selain itu, belum juga permasalahan yang ditumbulkan dari sewa tempat usaha yang membuat operasional UJP menjadi kendala. Akan tetapi dengan kendala tersebut seharusnya menjadikan pembelajaran bagi Pemkot untuk mengembangkan sektor pariwisata.

Upaya untuk meningkatkan produksi dari sektor makanan dan minuman maupun souvernir ini masih banyak keleluasaan untuk ditingkatkan. Dengan meilhat banyaknya pasar potensial yang belum terpenuhi membuat bisnis ini relatif menjanjikan untuk kedepannya. Dalam mendorong peningkatan produksi pemerintah sebaiknya menyediakan suatu fasilitas alat produksi yang modern. Dengan begitu para produsen dapat mengoptimalkan kegiatan produksinya.

Dilihat dari pemerataan tingkat potensi bisnis pariwisata saat ini, terdapat empat lokasi yang paling strategis. Keempatnya yaitu XT Square, Malioboro, Stasiun Tugu dan Stasiun Lempuyangan bagi UJP makanan dan minuman. Untuk lokasi Daerah Tempat Wista (DTW) kebutuhan para pengunjung akan akomodasi, transportasi dan hiburan sangatlah tinggi. Di sisi lain terdapat permasalahan terkait terbatasnya transportasi lokal yang disediakan pemerintah daerah. Akses kendaraan umum yang layak dan nyaman jumlahnya dapat dihitung dengan jari. Hal tersebut yang memicu para pengguna jalan menggunakan kendaraan pribadi dalam aktivitas sehari-hari. Dampaknya banyak kendaraan pribadi yang memenuhi jalan dan menciptakan kemacetan yang berimbas ketidaknyamanan.

Kemudian korelasi positif ditunjukan dari hubungan aktivitas turunan bisnis dengan tingkat pengeluaran wisatawan. Dengan adanya korelasi positif ini menunjukan, suatu besarnya aktivitas yang dilakukan wisatawan akan mendorong besarnya pengeluaran wisatawan. Dengan begitu semakin atraktif wisata yang diberikan kepada wisatawan akan menimbulkan feedback yang sama besarnya. Oleh karena itu, terdapat potensi perolehan pendapat yang besar pula bagi Pemkot, masyarakatmaupun investor seiring dengan pariwista yang kian atraktif.

Dari penilitian ini dapat ditunjukan bahwa kota Yogyakarta masih memerlukan pembenahan beberapa sektor yang potensial. Misal dari manajemen, distribusi dan produksi.Hal ini bisa sangat mempengaruhi terhadap pemenuhan permintaan konsumen. Selain itu, pengadaan alat-alat yang modern juga sangat diperlukan bagi pelaku bisnis dalam mencapai suatu efisiensi.Dari tafsiran penilaian tingkat pengeluaran para wisatawan, dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah perlu melakukan perbaikan pada sektor transportasi umum. Transportasi merupakan sarana akses wisatawan untuk mengunjungi tempat-tempat wisata yang menjadi andalan. Selain itu, kenyamanan sarana transportasi akan meningkatkan ketertarikan wisatawan untuk berkunjung ke Yogyakarta. Meningkatnya kuantitas dari pengunjung ini tentu membantu pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan daerah. Dengan begitu, peluang potensi bisnis yang bisa muncul juga bertambah. Singkatnya,jika semua hal itu dilakukan diharapkan memberi kesejahteraan bagi masyarakat.



Energi Alternatif untuk Kebutuhan Aplikatif

Oleh Nurrokhman & Ryma Aulia Praharsiwi

Angin berhembus kencang pagi itu, puluhan kincir berjajar rapi mengitari area Pantai Baru Pandansimo. Sebagian lancar berputar, sebagian lagi diam tak bergerak. Puluhan kincir yang dikelola oleh Pembangkit Listrik Tenaga Hybrid(PLTH) Bayu Baru ini merupakan salah satu ciri khas dari Pantai Baru Pandansimo sebagai penyuplai energi listrik.Tenaga Hybrid disini merupakan gabungan dua pembangkit listrik yaitu tenaga surya dan angin.

Pembangunan PLTH Bayu Baru berawal pada November tahun 2010 lalu sejalan dengan dibukanya Pantai Baru Pandansimo di Ngentak, Poncosari, Srandakan, Kabupaten Bantul, DIY. PLTH ini merupakan satu-satunya pembangkit listrik bertenaga angin yang dikombinasikan dengan panel surya di DIY. Proyek ini dikoordinasi oleh Bapak Kriswantoro, seorang staf dari Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) yang mendapat dukungan oleh berbagai pihak seperti Badan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul, Dinas Kelautan dan Perikanan dan Universitas Gadjah Mada.



Panel surya yang terletak di sisi timur PLTH ini mampu menghasilkan daya sebesar 4 KW dengan 40 unit yang dimilikinya. Dengan daya yang dihasilkannya, panel surya ini dapat menghidupi sekitar 18 rumah makan yang ada di pesisir pantai.



Es balok yang dihasilkan oleh ice maker cukup diproduksi dalam waktu 20 menit selama sekali proses. Pada dasarnya lama proses pembuatan es batu dapat diatur oleh ice maker, semakin singkat proses pembuatannya maka akan semakin cepat pula es tersebut leleh begitu pula sebaliknya.



Es balok dijual kepada masyarakat dengan harga Rp 1.000,00/kg yang nantinya digunakan untuk mengawetkan ikan laut dan membuat minuman dingin. Dengan tiga buah Ice maker yang tersedia dapat diperoleh keuntungan rata-rata satu juta rupiah setiap bulannya.



Ada 32 kincir angin yang turut menyumbangkan energinya dalam PLTH Bayu Biru. Semua kincir tersebut tidak secara menyeluruh diaktifkan karena disesuaikan dengan daya kebutuhan listrik.



Ada 32 kincir angin yang turut menyumbangkan energinya dalam PLTH Bayu Biru. Semua kincir tersebut tidak secara menyeluruh diaktifkan karena disesuaikan dengan daya kebutuhan listrik.

Pak Mul selaku petugas PLTH sedang mengukur tegangan yang dihasilkan dari alat inverter arus listrik. Inverter berguna untuk mengubah arus listrik yang disimpan dalam aki menjadi arus yang dapat menghidupkan peralatan elektroni.







Salah satu bentuk pemanfaatan PLTH yaitu lampu penerangan jalan. Lampu penerangan dibiarkan menyala selama 24 jam sebagai upaya preventif untuk mencegah korsleting dari dampak korosif angin laut.



Minuman es jeruk hasil dari pemanfaatan alat ice maker. Banyak pengelola rumah makan yang menambahkan daftar menu minuman dingin karena kemudahan memperoleh es balok yang siap konsumsi.



Energi listrik yang tersalur ke warung-warung makan di sekitar pantai dimanfaatkan pemilik warung untuk berbagai macam hal.Salah satunya adalah kipas angin guna menyalakan arang yang digunakan untuk membakar ikan pesanan pembeli.







Yogyakarta, 17 Februari 2015
Wisuda Periode Februari





SELAMAT LULUS MAHASISWA BIASA DARI KAMPUS YANG BIASA-BIASA SAJA



"Family isn't about whose blood you have. It's about who you care."
T. Parker & M.Stone











Foto: Yesika/BALAIRUNG

Jogja Berhenti Nyaman,

Ungkapan Kegelisahan atas Yogyakarta

Pembangunan layaknya pisau bermata dua. Sebenarnya pembangunan ditujukan untuk memberikan kontribusi positif bagi masyarakat tapi di sisi lain justru mendatangkan polemik yang mengancam kenyamanan - Sutaryono

Oleh Anggrelika Putri K.

Kampus Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) Yogyakarta belum terlihat lengang sore itu. Beberapa mahasiswanya masih nampak berlalu lalang dan menjalankan aktivitas lapangan. Jumat (08/01) awak Balairung menjumpai Dr. Sutaryono yang merupakan dosen tetap di STPN Yogyakarta. Perangai beliau begitu ramah memberi sambutan atas kedatangan awak Balairung. Beliau pun mempersilakan awak Balairung untuk duduk bersama di ruangan dan bercakap mengenai beberapa hal terkait dengan pembangunan hotel. Figur Sutaryono bukan sosok yang awam dalam kancah pembangunan kota Yogyakarta. Beliau merupakan penggiat penelitian dengan basis ketersediaan ruang. Beliau juga telah menulis beberapa buku, diantaranya adalah *Dinamika Penataan Ruang dan Peluang Otonomi Daerah*, *Pemberdayaan Setengah Hati: Subordinasi Masyarakat Lokal Dalam Pengelolaan Hutan*, serta *Arah Baru Pendidikan Tinggi Agraria*. Tidak hanya itu gagasan beliau mengenai ruang telah dilansir di beberapa media masa seperti Majalah Sandi, Koran Tempo, SKH Kedaulatan Rakyat, dan sejumlah jurnal ilmiah. Berikut kutipan wawancara awak Balairung dengan beliau.

Sebenarnya keadaan geografis di Yogyakarta itu secara umum bagaimana?

Secara umum unik dan lengkap dari gunung hingga pantai. Tidak ada provinsi yang selengkap ini. Jika ditinjau dari bentang lahan atau *landscape*, Yogyakarta sangat eksotis mulai dari hamparan gunung, laut, hingga pegunungan kapur (formasi karst). Dalam konteks pesona alam, Yogyakarta memiliki potensi yang lengkap. Bahkan saat ini Yogyakarta telah mendapatkan julukan baru sebagai Heritage City atau Kota Pusaka. Oleh karena itu, wajar jika Yogyakarta kemudian menjadi salah satu destinasi wisata yang utama di Indonesia selain Bali.

Bagaimana dinamika ketesediaan ruang yang ada di Yogyakarta saat ini?

Ketersediaan lahan ini merupakan akar dari problematika yang ada. Muncul pameo "Jogja Berhenti Nyaman" yang mulai saya tulis dan dilansir di Kedaulatan Rakyat awal 2014 lalu. Tajuk tersebut menjadi pralambang pesatnya pembangunan Yogyakarta saat ini. Sekarang ruang semakin terbatas dan sayangnya pembangunan tetap saja tumbuh. Secara teoritik kota memiliki lima fungsi, diantaranya sebagai hunian, tempat bekerja, rekreasi, *pleasure*, dan keberlanjutan lingkungan. Saat ini daya dukung lingkungan Yogyakarta tidak sepenuhnya memenuhi kelima fungsi tersebut. Keadaan yang mulai memprihatinkan tersebut tidak hanya ditandai dengan permasalahan kepadatan hunian dan terbatasnya ruang tapi juga kemacetan lalu lintas. Buktinya muncul keluhan di media masa dari beberapa agen transportasi yang mengecam kurangnya ketersediaan lahan parkir. Belum lagi ketika kunjungan wisata direspon dengan pendirian hotel-hotel yang seakan tidak terkendali. Polemik tersebut kenyataannya hingga saat ini belum dapat diselesaikan dengan baik. Tidak heran jika pada beberapa titik pendirian hotel masih menimbulkan kontra dari masyarakat.

Bagaimana gambaran umum dari maraknya pembangunan hotel?

Banyaknya pengunjung wisata memiliki implikasi terhadap kebutuhan hunian, ruang, dan tanah yang meningkat. Hal tersebut nampaknya berdampak pada pembangunan yang tak terelakkan. Khususnya pembangunan hotel sebagai penompang pariwisata. Tingginya okupansi tingkat hunian menimbulkan permasalahan tersendiri yakni persebaran hotel seolah tidak didesain dengan baik. Pun demikian halnya dengan analisis kebutuhan hotel dengan melihat keseimbangan antara hotel melati dan hotel berbintang yang tidak dipikirkan dengan serius. Meskipun kota Yogyakarta sudah menerapkan moratorium perizinan pembangunan. Namun demikian, perlu diketahui sebelum kebijakan tersebut diputuskan ada 107 izin hotel yang sudah terbit. Sekitar 30 diantaranya bahkan sudah dalam tahap pembangunan. Sementara itu, menjamurnya pembangunan hotel juga berdampak pada fenomena perang harga di mana harga berhasil ditekan turun. Fenomena harga yang kompetitif tersebut memungkinkan hotel melati dan penginapan skala kecil atau rumahan tergusur popularitasnya.

Apa dampak lingkungan yang mungkin muncul terkait pembangunan hotel?

Sumur-sumur warga yang kering disinyalir merupakan imbas dari pembangunan hotel itu sendiri. Diperlukan sebuah kajian yang detail untuk melakukan pembuktian atas dampak pembangunan hotel terhadap keringnya air tanah yang dikonsumsi warga tersebut. Beberapa riset menyebutkan bahwa muka air tanah di Yogyakarta turun sekitar 5 -30 cm dari tahun ke tahun. Artinya, ketika muka air tanah turun hal tersebut mengindikasikan tingkat konsumsi air yang tinggi. Masyarakat cenderung menggunakan air tanah dangkal dalam partai kecil karena biasanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan harian. Namun bagi hotel dengan bangunan yang tinggi akan membutuhkan banyak kesediaan air. Mestinya hotel mengambil air dari lapisan air tanah dalam (artesis) bukan dari air tanah dangkal. Namun sayangnya untuk mendapatkan air tanah dari lapisan artesis perlu dilakukan pengeboran sedalam 80 meter dengan biaya lebih banyak. Jika hotel secara tertib mempergunakan sumber air artesis maka kemungkinan tidak menimbulkan masalah. Sayangnya tidak ada pihak yang kemudian memastikan bahwa hotel-hotel tersebut telah mempergunakan air tanah artesis. Tidak adanya monitoring ini diperkuat dengan kasus hotel di daerah Miliran yang mengundang protes dan demo treatrikal. Itulah problem lingkungan yang saat ini belum selesai untuk Yogyakarta.

Sebenarnya apa masalah lain yang menjadikan polemik pembangunan hotel ini terus terjadi ?

Sebenarnya masalah utama terletak pada bagaimana penggunaan 'ruang' yang terbatas tersebut. Desain penataan ruang kemudian menjadi sebuah hal yang penting. Terlepas dari permasalahan sosial dan lingkungan, permasalahan regulasi masih terus bergulir. Di Yogyakarta belum terdapat instrumen pengendalian pemanfaatan ruang yang definitif atau disahkan oleh Perda. Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kawasan stategis DIY justru belum termasuk dalam Perda sehingga pengaturan terhadap tata ruang masih belum optimal. RDTR dalam lingkup kota mungkin telah ada namun di lingkup Yogyakarta secara lebih luas hal tersebut belum dilegitimasi. Dengan kata lain permasalahan regulasi sendiri belum jelas dan masih dalam proses. Selain itu, sektor transportasi juga menjadi bermasalah karena kepadatan lalu lintas yang terjadi.

Apakah dampak terburuk yang dapat terjadi jika polemik mengenai pembangunan hotel ini tetap bergulir?

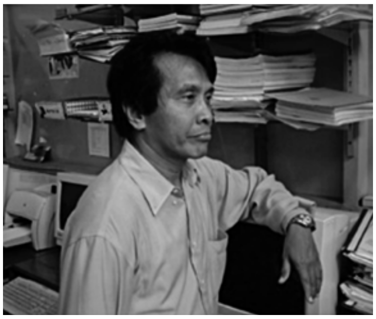
Secara marfologi Yogyakarta tergolong dalam *underbonded city*. Perkembangan fisik kota sudah melebihi batas administrasi. Perkembangan yang tidak dibatasi akan berpotensi mengalihfungsikan lahan pertanian menjadi bangunan-bangunan tertentu. Lahan pertanian yang subur pada dasarnya menjadi lahan resapan air. Khususnya di daerah bagian utara Yogyakarta yang merupakan lahan resapan air, jika tanah berganti menjadi beton maka kemungkinan air tanah akan langka. Masalah lahan resapan juga dapat menimbulkan banjir saat musim penghujan. Selain mengancam sektor pertanian, pembangunan hotel yang tidak terkendali dapat mengancam sektor pariwisata itu sendiri. Pada 2014 lalu, Yogyakarta menempati posisi ke-4 dalam *the most livable city* di bawah Kota Solo, Malang, dan Balikpapan. Jika permasalahan tak kunjung terselesaikan maka kenyamanan wisata di Yogyakarta dapat menurun secara gradual.

Bagaimana idealnya pelaksanaan pembangunan hotel di Yogyakarta?

Intinya perlu adanya penyeimbangan. Pemda DIY atau Pemkot perlu melakukan kajian tentang kebutuhan akan hotel dan ketersediaan hotel. Kajian tersebut meliputi analisis tingkat kunjungan dan distribusi kawasan wisata sehingga dapat tercipta sebuah efektivitas pembangunan. Selain itu, juga dibutuhkan pembatasan secara tegas terhadap jumlah hotel atau jumlah mall demi menjaga kenyamanan lingkungan. Berbicara mengenai kenyamanan, hal tersebut juga merupakan hal utama yang mendukung sektor pariwisata. *Trade mark* Yogyakarta sebagai kota wisata selayaknya dapat mengundang wisatawan untuk kembali dengan kenyamanan bukan dengan kemacetan.

Terakhir, apakah yang dapat dilakukan Pemda untuk dapat mengentaskan permasalahan dalam pembangunan hotel?

Pemerintah Provinsi DIY harus sinkron dengan pemerintah Kota Yogyakarta. Sedangkan dari sisi instrumen, perlu adanya instrumen penataan ruang yang tegas dan definitif. Mekanisme penataan ruang juga harus diperhatikan. Kemudian terkait dengan infrastruktur seberti jalan dan lahan parkir sebaiknya difasilitasi agar lebih nyaman. Saat ini mulai terlihat upaya penataan jaringan jalan dengan menerapkan sistem *one way* dalam berlalu lintas. Kemudian pengadaan ruang terbuka hijau merupakan harmoni yang barangkali dibutuhkan. Satu sisi perlu diambil hikmahnya bahwa selain mendatangkan keuntungan ada dampak negatif yang perlu diselesaikan agar Yogyakarta tetap berhati nyaman.



Pembangunan Hotel Wajib Utamakan Aspek Lingkungan

Oleh Eko Sugiharto

Tim Ahli Pusat Studi Lingkungan Hidup (PSLH) UGM

Pembangunan hotel yang semakin marak, tak bisa dipungkiri masyarakat pun merasakan manfaat pembangunannya. Kebutuhan hotel akan tenaga kerja membuka peluang bagi masyarakat untuk memperoleh pekerjaan. Tak hanya itu, pedagang kecil dan tukang becak yang berada di sekitar hotel juga menikmati rezeki dari turis domestik maupun mancanegara yang bermalam di sana.

Membaca peluang tersebut, pembangunan hotel di Yogyakarta dari waktu ke waktu semakin massif. Hal ini ditandai dengan banyaknya investor yang berlomba membangun hotel. Kebijakan pemerintah dalam hal membolehkan kalau tidak mau disebut mengharuskan hotel dijadikan tempat pertemuan dan rapat oleh para pebisnis maupun pegawai pemerintahan.

Bagaimana dampak negatif akibat pembangunan hotel yang berlebihan? Saat ini pengelolaan lingkungan di Indonesia telah memasuki Era Ketiga, yaitu Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Diikuti dengan PP No. 27 tentang Izin Lingkungan dan peraturan-peraturan Menteri Lingkungan Hidup terkait AMDAL. Setiap rencana kegiatan yang termasuk kategori mempunyai dampak positif dan negatif. Termasuk hotel dengan luasan tertentu harus mempunyai dokumen lingkungan. Salah satu jenis dokumen lingkungan yaitu Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang terdiri dari K.A , ANDAL, dan RKL-RPL.

Rencana kegiatan yang termasuk wajib AMDAL tidak akan mendapatkan izin usaha sebelum mendapatkan izin lingkungan. Izin lingkungan tidak akan didapatkan sebelum dokumen AMDAL mendapatkan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan. Surat Keputusan tersebut dikeluarkan apabila dalam penilaian dokumen telah memenuhi sepuluh kriteria kelayakan lingkungan, yaitu:

Pertama, dokumen AMDAL harus dilengkapi dengan bukti formal dari instansi yang bertanggung jawab di bidang penataan ruang (BKPTRN atau BKPRD) serta analisis spasial mengenai kesesuaian lokasi rencana usaha dengan Peta Indikatif Penundaan Izin Baru (PIPIB) yang tercantum dalam Instruksi Presiden. Pelanggaran terhadap tata ruang akan terkena sanksi pidana.

Kedua, penilaian harus memperhatikan kesesuaian antara rencana kegiatan dengan kebijakan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) serta sumber daya alam (SDA). Misal, sebuah hotel memerlukan air tanah dalam jumlah besar maka jangan sampai membuat penduduk kekurangan air tanah akibat pendirian hotel tersebut.

Ketiga, apabila rencana usaha yang diusulkan mengganggu kepentingan pertahanan dan keamanan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, rencana kegiatan tersebut harus ditolak.

Keempat, pengusaha harus mencermati dampak positif maupun negatif dari aspek geo-fisik-kimia, biologi, sosial, ekonomi, budaya, dan kesehatan masyarakat pada tahap prakonstruksi, konstruksi, operasi, dan pasca operasi. Sebab dalam proses penyusunan AMDAL tidak boleh diabaikan keterlibatan masyarakat. Hal ini telah tercantum dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 17 Tahun 2012. Dalam Peraturan tersebut, investor harus mengumumkan rencana kegiatan, menggali pendapat dari masyarakat, melakukan konsultasi publik dengan tiga kelompok masyarakat sebelum menyusun kerangka acuan.

Kelima, dokumen AMDAL harus memuat hasil evaluasi secara holistik sehingga diketahui perimbangan dampak positif dan negatif. Perimbangan tersebut disajikan dalam daftar beserta arahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sehingga dapat menjadi referensi bagi penilai.

Keenam, dalam dokumen RKL-RPL harus mencantumkan pihak terkait yang bertanggung jawab dalam menanggulanggi dampak negatif dengan pendekatan teknologi, sosial, dan kelembagaan. Hal ini perlu diperhitungkan oleh penilai.

Ketujuh, rencana usaha dan/atau kegiatan tidak boleh menganggu nilai-nilai sosial budaya atau pandangan masyarakat (emic view). Misalnya, kegiatan usaha tidak boleh berresiko menghilangkan situs purbakala atau tempat yang dikeramatkan oleh masyarakat setempat.

Kedelapan, rencana usaha tidak boleh mengganggu entitas ekologis. Misalnya, ketika kegiatan usaha akan didirikan di sekitar daerah Gumuk Pasir, Parangtritis, Kabupaten Bantul yang merupakan entitas ekologis langka, maka perlu mempertimbangkan kelayakan lingkungannya.

Kesembilan, rencana usaha tidak boleh menimbulkan gangguan terhadap usaha yang telah ada di sekitar rencana lokasi maupun tapak proyek. Misalnya, bangunan diskotek sebuah hotel tidak boleh berdekatan dengan tempat ibadah yang sudah ada.

Kesepuluh, AMDAL perlu memperhitungkan dampak negatif dari kegiatan yang tidak melampaui daya dukung dan daya tamping lingkungan hidup sekitarnya.

Apabila selama proses penyusunan terdapat langkah yang tidak dilakukan dan/atau penilaian AMDAL cacat hukum, masyarakat dapat menggugat ke Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) sesuai dengan amanat UU No. 32 Tahun 2009 pasal 38. Apabila cacat hukum terbukti, Izin Lingkungan bisa dicabut sehingga Izin Usaha juga otomatis akan tercabut.

#REST-IN-PEACE



IFTINA RASYIDA IKSANTI

15 SEPTEMBER 1994 - 21 MARET 2015

Sekretaris Divisi Produksi dan Artistik 2014

Setangkai mawar tergeletak di meja usang
Harumnya menguap di setiap sudut ruangan
Hinga suatu hari, setangkai mawar itu hilang
Tapi, harumnya masih terkenang

Selamat jalan Fifin,
Hadirmu akan selalu kami kenang
di dalam hati...



Kebangkitan atau Keterpurukan Nasional?

Oleh Harizul Akbar Nazwar

Mahasiswa Perencanaan Wilayah dan Kota UGM, 2010
Menteri Koordinator Internal BEM KM UGM 2014

Arah Perjalanan Bangsa Dalam Perspektif Ekonomi dan Politik

Prolog : Spektrum Kebangkitan Nasional

Kita sadar bahwa perjalanan kebangkitan bangsa Indonesia sudah mencapai lebih dari satu abad dihitung sejak 20 Mei 1908. Jika dikutip dari id.wikipedia.org, definisi kebangkitan nasional adalah masa di mana bangkitnya rasa dan semangat persatuan, kesatuan, dan nasionalisme serta kesadaran untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Masa ini ditandai dengan dua peristiwa penting, yaitu berdirinya Boedi Oetomo (20 Mei 1908) dan ikrar Sumpah Pemuda (28 Oktober 1928). Namun, barangkali jangan kita pusingkan apa itu definisi harfiah Hari Kebangkitan Nasional. Hal terpenting adalah bagaimana kita memaknai substansi dan hakikat kebangkitan nasional lalu meneruskan perjuangan para pendahulu kita.

Barangkali sulit mengingkari kenyataan sejarah bahwa upaya mewujudkan cita-cita merdeka, yakni lepas dari kekangan pemerintah kolonial harus ditebus dengan pengorbanan tenaga, pikiran, jiwa, dan raga para perintis republik ini. Jika dihitung, Indonesia sudah mengalami 107 kali Hari Kebangkitan Nasional pada tanggal 20 Mei 2015. Tentu hal itu bukan perjalanan yang pendek dan lurus tanpa hambatan melainkan panjang penuh rintangan.

Terdapat beberapa kekhawatiran yang dirasakan saat ini, salah satunya adalah lunturnya kecintaan terhadap kebangsaan dan ke-Indonesia-an di tataran masyarakat. Kondisi tersebut merupakan peringatan awal akan perjuangan para pendahulu khususnya untuk pemuda dan mahasiswa yang mengagungkan dirinya sebagai *agent of change and social control*. Sebab, pemuda cenderung mengikuti *role* model dari ikon-ikon negara Asia timur dan negara barat menjadi orientasi kebudayaan kebanyakan masyarakat Indonesia saat ini. Namun, dari luasnya spektrum kebangkitan nasional, yakni dari segi nasionalisme lalu disusul dengan bidang ekonomi, politik, sosial, hukum dan budaya, maka penulis ingin mengupas secara parsial namun sangat fundamental tentang kondisi politik dan ekonomi bangsa Indonesia.

Kondisi Perpolitikan Indonesia

Kita semua sadar bahwa tahun 2014 adalah tahun politik di mana pesta demokrasi diselenggarakan dan setiap warga negara Indonesia memiliki hak yang sama untuk memilih. Sedikit mengungkit sejarah, kebangkitan politik di Indonesia sudah pernah dilakukan oleh para *founding fathers* dalam rangka memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Mereka adalah Ir. Soekarno, Dr. Tjipto Mangkunkusomo, Ki Hajar Dewantara, dr. Douwes Dekker, Sultan Sjahrir, dan para pejuang lainnya.

Akan tetapi, jika dilihat dari berbagai macam survei, salah satunya adalah hasil temuan Lembaga Survei Indonesia (LSI) selama tahun 2012 diketahui bahwa politik nasional telah mengalami keterpurukan. Apabila ditelaah lebih lanjut barangkali kepercayaan masyarakat menurun akibat banyaknya kasus korupsi yang melibatkan para politisi atau pun tokoh partai baik di level nasional maupun daerah. Belum lagi kasus lainnya seperti kolusi, nepotisme, pornografi, atau bahkan kekerasan yang dilakukan para tokoh politik bangsa ini. Hal ini menunjukkan bahwa perpolitikan di Indonesia mengalami kemunduran.

Penulis melihat bahwa moral para elite politik di negara ini sudah sangat buruk karena terpaaan badai nalar seperti materialisme, pragmatisme, dan populisme. Menjaga martabat dan wibawa sebagai pemimpin bangsa mulai sirna dan oleh karenanya rasa kejujuran dan kemanusiaan tampaknya telah bias dalam kinerja di pemerintahan.

Akan tetapi, bobroknya sistem politik di Indonesia juga tidak lepas dari tantangan yang dihadapi pemerintah sekarang. Misalnya, proses demokratisasi mulai dari pengembangan peran serta masyarakat, pelembagaan organisasi, pemilihan umum, sampai dengan proses lobi-lobi politik, yang memakan waktu dan biaya mahal telah menuntut pemerintah lebih memperhatikan proses politik. Hal ini menyebabkan proses konkret dari demokratisasi seperti pembangunan terlupakan. Sebagai akibatnya, harapan masyarakat untuk mendapat bantuan atau upaya nyata pemerintah menyejahterahkan rakyat semakin sulit dilakukan. Sebaliknya, justru para elite politik menikmati hasil dari tumpah darah reformasi.

Kondisi Perekonomian Indonesia

Globalisasi ekonomi merupakan kecenderungan internasional saat ini. Pada era akhir 1980-an terdapat dua model sistem ekonomi yang dapat diaplikasikan pada negara-negara di dunia, termasuk Indonesia. Dua sistem ekonomi tersebut adalah sistem ekonomi liberal atau pasar bebas yang mana merupakan ciri dari perekonomian negara-negara industri maju dan sistem ekonomi yang sentralistik atau sosialis yang biasanya dianut oleh negara-negara blok komunis. Tetapi penulis mencatatat bahwa semenjak tahun 1990-an sebagai kelanjutan dari runtuhnya komonisme, banyak negara-negara ketiga yang berpaling ke Blok Barat dan menganggap sistem ekonomi pasar yang mampu menciptakan kesejahteraan bangsa (Samego, 2008).

Ketika globalisasi ekonomi terjadi, maka batas-batas suatu

negara akan menjadi kabur dan keterkaitan antara ekonomi nasional dengan perekonomian internasional akan semakin erat. Sesungguhnya tidak jelas kapan globalisasi dan liberalisasi mulai ada di Indonesia, namun yang perlu dicatat adalah bergabung dengan ekonomi global dapat diibaratkan dengan menjadikan negara sebagai perusahaan publik yang pemegang sahamnya adalah setiap orang, dimanapun orang itu berada. Bila para pemegang saham ini berpendapat penyelenggara negara suatu negara tidak lagi kredibel maka mereka beramai-ramai akan menjual saham sehingga mengakibatkan goncangan pada perekonomian dan bahkan dapat menjatuhkan pemerintah negara seperti misalnya terjadi di negara Asia termasuk Indonesia pada tahun 1997-1998. Pada tataran globalisasi ekonomi, maka dana mengalir dari satu negara ke negara lain secara cepat, bergerak melewati batas-batas negara.

Bicara globalisasi, tentu bicara tentang keterbukaan investasi. Iklim investasi yang baik memberikan kesempatan dan insentif kepada dunia usaha untuk melakukan investasi yang produktif, menciptakan lapangan kerja dan memperluas kegiatan usaha. Investasi memainkan peranan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kemiskinan. Memperbaiki iklim investasi adalah masalah penting yang dihadapi pemerintahan di negara berkembang (Sitompul, 2010). Sedangkan penulis mencatat bahwa di Indonesia terdapat masalah besar yang dihadapi pemerintah dalam menciptakan iklim investasi yang baik yaitu kemungkinan terjadinya benturan antara kepentingan dunia usaha dan kepentingan masyarakat. Kepentingan dunia usaha dan kepentingan masyarakat ternyata sering kali berbeda, antara lain adalah perbedaan preferensi dan prioritas antara dunia usaha dan masyarakat.

Penulis melihat bahwa globalisasi di bidang ekonomi dampaknya cukup luas terhadap perubahan ekonomi di dalam negeri. Meski pemerintah telah menjalankan perannya dengan baik sekalipun, godaan-godaan pasar bebas benar-benar mengubah tatanan ekonomi masyarakat, khususnya ekonomi masyarakat kelas bawah. Bila di masa lalu, khususnya di zaman orde baru negara masih memiliki pengaruh kuat dalam menentukan perubahan masyarakat, maka sekarang perubahan masyarakat ditentukan oleh pasar.

Epilog: Kebangkitan atau Keterpurukan?

Setelah sedikit membahas tentang kondisi perpolitikan dan perekonomian Indonesia, maka barangkali sekarang saatnya melihat arah gerak Indonesia yang mau tidak mau, siap tidak siap telah menjadi bagian dan memainkan peran cukup penting daripada proses *continuum* globalisasi. Dahulu, kita harus akui bahwa pemerintah masih sangat berperan dalam proses pembentukan negara ini, namun sekarang pemerintah dihadapkan pada berbagai kesulitan. Salah satunya adalah sumber daya politik dan ekonomi yang makin lama makin berkurang. Pemerintah kian menghadapi kesulitan untuk memobilisasi dukungan masyarakat karena terjadi ketimpangan antara kemampuan dengan tuntutan publik. Jika dilihat dari ideologi negara ini yakni yang tertuang pada UUD 1945, maka pemerintah semestinya mampu menjadi sebuah lembaga yang mengatur *social welfare*. Tetapi pada kondisi empirik, khususnya sejak krisis moneter pada pertengahan 1990-an sampai sekarang, pemerintah terlihat tidak berdaya menghadapi tuntutan pembangunan.

Lebih dalam pada sisi ekonomi, penulis melihat bahwa kehadiran investasi asing sebagai konsekuensi liberalisasi yang merupakan dampak daripada globalisasi bisa jadi merupakan pisau bermata dua. Liberalisasi dapat menjadi pendorong tumbuhnya sektor-sektor ekonomi tertentu tetapi sekaligus dapat meminggirkan pengusaha lokal dan masyarakat berpenghasilan rendah (Sitompul, 2010). Namun sebenarnya beberapa kasus di negara lain menunjukkan bahwa terpinggirnya pengusaha lokal bukan disebabkan kehadiran investor asing semata. Kebijakan pemerintah yang seringi kali menghambat atau paling tidak mempersempit peluang wirausaha lokal untuk mendapatkan akses ke pasar. Akibatnya kecurigaan terhadap investor asing menjadi meningkat. Investor asing dengan kekuatan modal dan keahliannya dapat lebih mudah mengatasi distorsi yang diciptakan pemerintah sehingga terlihat sebagai pemangsa pengusaha lokal. Apabila pemerintah dapat mempermudah akses ke dunia usaha maka diharapkan kehadiran asing dapat dimaksimalkan manfaatnya.

Seperti yang dibahas sebelumnya tentang kondisi perpolitikan Indonesia, maka penulis melihat bahwa terdapat jurang politik yang sangat mematikan jika saja politik pertikaian masih menjadi budaya para elit politik dan juga para penyelenggara negara, bukannya malah melakukan upaya-upaya rekonsiliasi dan rekonsilidasi politik. Rebutan kekuasaan dan suasana saling mencurigai serta ketidakpercayaan (*distrust*) menjadi warna penyelenggaraan negara saat ini. Eksekutif dan legislatif gemar menuduh, bukannya bermitra dalam mengarahkan perubahan. Ditambah lagi bahwa berkat berkah reformasi, maka sentralisme digantikan dengan desentralisme. Kekuatan politik sudah menyebar ke tatanan masyarakat, baik di partai politik, organisasi massa, pers, dan LSM. Hal ini baik karena demokrasi adalah hak semua orang, namun yang disayangkan adalah warna warni politik di Indonesia ini bukannya membangan kemajemukan dalam mengawal perubahan ke arah lebih baik seperti warna-warni pelangi yang tidak terpisah, tetapi malah menyuburkan konflik dan perseturuan yang tidak kunjung henti.

Barangkali pada tulisan kali ini penulis ingin sekali memberikan saran dan ajakan tidak hanya kepada pemerintah, namun juga untuk seluruh elemen bangsa, bahwa dalam menyambut Hari Kebangkitan Nasional tahun 2014 ini maka sudah seharusnya seluruh elemen bangsa baik buruh tani, buruh pabrik, guru, anggota partai, mahasiswa, akademisi, ekskutif dan legislatif benar-benar melakukan rekonsiliasi nasional. Seluruh elemen bangsa harus percaya bahwa masih terdapat potongan-potongan harapan yang jika disatukan dapat menjadi satu keyakinan baru pada Bangsa Indonesia. Momentum pergantian pemimpin pada 2014 silam seharusnya bisa digunakan untuk melakukan rekonsiliasi dan menemukan formula yang paling baik demi menjaga keberlanjutan bangsa. Ini merupakan tugas berat sebagai pemuda terbaik bangsa. Oleh karena itu jangan pula kita sebagai anak bangsa hanya pasrah melihat dari kejauhan dan malah pura-pura buta dan tuli. Melainkan diperlukan aksi nyata yang konkret walau dengan skala kecil yang berorientasi pada perbaikan bangsa dan negara.

Si Kusam yang Menyehatkan

Dibanding lainnya, mi ini terlihat tak menarik karena berwarna kusam. Tapi rasa lezat dan bahan dasar yang sehat membuatnya tetap dipilih banyak orang

Oleh Arifanny Faizal



Foto: Nawang/BALAIRUNG

Malam itu (12/12), lalu lalang kendaraan tampak dari sebuah bangunan. Tampak petugas parkir berusaha mengatur keluar masuk kendaraan-kendaraan roda dua dan empat. Beberapa orang terlihat keluar dari kendaraan dan bergegas memasuki bangunan. Di dalam, para pengunjung telah duduk di bangku-bangku berwarna coklat dan mengobrol santai sambil menunggu pesanan mereka. Sementara itu, pelayan sibuk keluar masuk dapur untuk mengantarkan pesanan ke meja-meja yang ada. Tak lama setelah memesan, sepiring makanan dengan menu *mi godok* (mi rebus) sudah terhidang di hadapan. Secara kasatmata, mi dengan irisan sayuran ini tampak sama dengan *mi godok* umumnya. Akan tetapi, jika lebih diperhatikan warna mi ini lebih kusam. Berbeda dengan mi lain yang biasanya berwarna bening atau kuning pekat.

Mi yang berwarna kusam tersebut dikenal dengan nama mi lethek. Mi lethek memang sudah banyak dijual di Yogyakarta. Meskipun demikian Hanung Sudibyono, salah satu pengelola, mengatakan bahwa mi lethek yang ia jual berbeda dengan lainnya. "Kita *full* pakai mi lethek, enggak dicampur dengan mi kuning seperti yang lain," jelasnya. Menurutnya mi kuning harus dihindari karena mengandung pengawet dan pengembang.

Warung Mi Lethek itu telah berdiri sejak setahun lalu. Kendati demikian cikal bakal Warung Mi Lethek sudah ada sejak tahun 1960. Saat itu Mbah Sajem, eyang Hanung, mulai berjualan mi lethek di Sorobayan, Gadingsari, Sanden, Bantul. Usaha tersebut lantas dilanjutkan oleh saudara yang lain karena Mbah Sajem meninggal dunia.

Akhirnya pada 16 Oktober 2013

Hanung Sudibyono, Hany Susilo dan beberapa saudara mengembangkan usaha mi lethek Mbah Sajem dengan membuka bisnis yang sama di Jalan Ring Road Utara, Maguwoharjo. "Kita punya *feeling* orang-orang ingin *back to nature*," Hanung mengutarakan alasan berdirinya usaha mi lethek bernama Warung Mie Lethek Bantul Mbah Mendes ini. Nama Mbah Mendes dipilih karena karakter Mbah Sajem ketika berjualan dulu terkenal galak tapi ramah alias mendes. Tapi sekarang sebutan mendes sering kali diplesetkan menjadi "Memang Ndeso".

Berbagai menu pun disiapkan Warung Mie Lethek Bantul Mbah Mendes untuk memenuhi antusiasme pengunjung atas mi lethek. Pemilihan bahan mi lethek juga tak berubah. Sejak zaman Mbah Sajem mi tetap diambil dari pabrik di Bendo, Trimurti, Srandakan, Bantul. Pabrik yang memproduksi mi lethek sejak tahun 1940-an ini merupakan usaha turun temurun keluarga Umar Bisyir Nahdi. Namun, usaha tersebut sempat berhenti selama 20 tahun pada sekitar tahun 1983 hingga pertengahan 2003. Saat ini pabrik tersebut dihidupkan kembali oleh Yasir Ferry Ismatrada yang merupakan cucu dari Umar Bisyir Nahdi.

Di pabrik inilah bahan baku diproses sedemikian rupa hingga menjadi mi lethek. Pertama, singkong dan tepung tapioka yang merupakan bahan utama dicampur dan diaduk. Batu silinder seberat 1 ton yang digerakkan oleh tenaga sapi mencampur dan mengaduk bahan-bahan tersebut. Setelahnya, bahan utama dimasukkan ke tungku kukusan berupa oven berbahan bakar kayu. Lalu bahan diaduk lagi untuk mengatur kadar airnya. Jika sudah selesai maka adonan dipres (untuk menghilangkan kadar air-red.) dan dikukus lagi.

Proses terakhir berupa pencetakan dan penjemuran mi hingga kering. Awalnya alat pencetak mi menggunakan alat bernama "tarikan" yang harus dioperasikan secara manual oleh delapan pekerja. Saat ini alat itu telah diganti menggunakan mesin dengan tiga orang operator. Penjemuran pun hanya mengandalkan panas matahari selama hampir 18 jam. Proses produksi yang demikian menjadikan mi lethek sama sekali tidak menggunakan pemutih sehingga warnanya terlihat kusam. Warna kusam hasil penjemuran itulah yang menjadi cikal bakal nama mi lethek. Di Warung Mie Lethek Bantul Mbah Mendes, mi mentah yang kusam itu dimasak menjadi aneka makanan yang nikmat.

Tak perlu khawatir dengan rasa Mi Goreng dan Mi Godok berbahan mi lethek ini. Rasa keduanya tak berbeda dengan mi lainnya. "Mi Goreng dan Mi Godok menjadi menu favorit karena rasanya yang gurih," jelas Hanung. Menu lainnya yang juga berbahan mi lethek adalah Plencing. Secara umum bahan-bahan seperti sayuran yang digunakan pada Plencing sama dengan Mi Goreng dan Mi Godok. Perbedaan antara keduanya adalah rasanya yang manis dan pedas. Kuahnya terasa lebih manis sementara rasa pedas berasal dari cabai. Selain itu, tahu putih juga ditambahkan untuk menu Plencing ini.

Untuk mengakomodasi tingginya permintaan pengunjung, 100 ball mi lethek dipesan setiap minggunya ke pabrik. "Satu hari bisa habis 5 sampai 6 ball," jelas Hanung sambil menunjukkan rak tinggi yang penuh plastik berisi mi lethek. Setiap 1 ball setidaknya dapat digunakan untuk memasak 50 porsi. Oleh karena itu, setiap harinya Warung Mie Lethek Bantul Mbah Mendes bisa menjual lebih dari 200 porsi. Bahkan pada waktu-waktu tertentu seperti hari libur sekolah 7 sampai 8 ball bisa habis dalam satu hari.

Selain menu berbahan baku mi lethek, ada pula menu Nasi Goreng Mendes. Menu ini berbeda dengan nasi goreng lainnya karena menggunakan beras jagung. "Disini enggak pakai beras dan gandum," jelas Hanung sambil menunjukkan kotak beras jagung One Day No Rice (ODNR). Hanung menyebutkan bahwa beras jagung dipilih karena memiliki kadar gula lebih rendah. Beras putih yang biasa dikonsumsi tidak digunakan karena lebih cepat menaikkan kadar gula darah. Sebenarnya tidak ada perbedaan pada rasa beras jagung dan beras putih ketika disantap. Hanya saja pada saat memasak beras jagung memerlukan lebih banyak air. Kalau tertarik, pengunjung bisa membeli beras jagung ODNR dengan harga Rp 20.000,- per kotak.

Apabila bosan dengan hidangan-hidangan tersebut, magelangan dan omlet juga bisa menjadi alternatif santapan. Semua menu yang tersedia cukup terjangkau yakni antara Rp 12.500,- sampai dengan Rp 15.000,-. Beberapa pilihan menu minuman juga bisa menjadi teman sembari menunggu makanan datang atau santai sejenak setelah makan. Ada teh, teh poci, jeruk nipis, es kencur mbah brojo, wedang uwuh, wedang secang, wedang tape singkong, kopi hitam dan kopi putih. Minuman pun bisa dinikmati dengan harga murah meriah, yakni sekitar Rp 2.500 sampai dengan Rp 4.000,-.

Warung Mie Lethek Bantul Mbah Mendes terus gencar memromosikan dan mendekatkan diri kepada masyarakat melalui berbagai media sosial. Di antaranya melalui twitter dan facebook. Selain itu, promosi juga dilakukan melalui blog dengan alamat mielethek.blogspot.com.

Tak hanya itu, pada tahun 2014 Warung Mie Lethek Bantul Mbah Mendes sempat mengikuti kompetisi Berani Jadi Milyarder (BJM). Kompetisi itu ditayangkan di salah satu stasiun televisi swasta. Meski tak keluar sebagai pemenang, Warung Mie Lethek Bantul Mbah Mendes mengalami peningkatan jumlah pengunjung setelah kompetisi. Bahkan pengunjung ada yang berasal dari daerah-daerah di luar DIY seperti Jakarta dan Pontianak. Usaha-usaha untuk menjangkau penggemar kuliner juga dilakukan melalui penambahan lokasi bisnis. "Awal tahun 2015 ini Warung Mie Lethek Bantul Mbah Mendes telah membuka cabang barunya di daerah Wates," kata Hanung mengakhiri.



Sejauh mata memandang, bentangan alam yang menghijau pun menyambut. Sebuah karya agung dari Sang Pencipta terhampar luas bak belum terjamah manusia. Inilah gambaran pertama saat menikmati keindahan panorama alam yang disuguhkan Kalibiru.

Adalah Kalibiru, sebuah objek wisata hutan alam yang berada di puncak bukit itu. Wisata alam ini menyuguhkan panorama yang dapat membawa pengunjung menyaksikan Kabupaten Kulon Progo dan sekitarnya dari ketinggian bukit. Pengunjung yang sampai di tempat ini akan dapat melihat bentangan alam tanpa terhalang oleh ilalang atau beton-beton yang terus menjamur seperti di kota. Kondisi masyarakat pedesaan yang dikelilingi pepohonan yang rimbun dan Waduk Sermo yang berada di bawahnya adalah keindahan yang dapat disaksikan oleh wisatawan.

Objek wisata ini terletak di Kabupaten Kulonprogo, berjarak 40 kilometer dari Kota Yogyakarta. Sewaktu menuju kawasan Kalibiru, wisatawan akan melewati jalan berlika-liku yang terjal dan menanjak. Terutama setelah melewati Kecamatan Wates dan memasuki Kelurahan Hargowilis. Sebab, tempat ini berada di perbukitan Kulonprogo yang memiliki ketinggian sekitar 450 meter dari permukaan air laut. Maka dari itu, dibutuhkan kondisi kendaraan yang baik untuk dapat sampai sana.

Sebagai objek wisata, Kalibiru sebenarnya kawasan hutan negara yang tidak terawat oleh pemerintah, namun memiliki keindahan alam yang menakjubkan. Harjono, salah seorang petugas karcis setempat mengemukakan bahwa masyarakat melirik keindahan hutan yang belum dimanfaatkan ini sebagai potensi pariwisata yang bisa dikembangkan. Mereka kemudian mendapat izin untuk mengelola hutan itu.

Jalan setapak, mushola, kamar mandi, dan tempat menginap lantas dibangun dengan gotong royong. Penyediaan fasilitas umum ini diperlukan untuk mendukung Kalibiru sebagai tempat wisata. Tidak perlu mengeluarkan banyak dana, dengan tiket masuk sebesar Rp. 3.000 saja pengunjung sudah dapat menikmati wisata alam Kaliburu ini dengan bebas. Apabila pengunjung ingin menikmati tempat ini lebih lama, terdapat enam *cotage* yang dapat disewa dengan harga Rp. 200.000 setiap malamnya. Selain itu, ada tiga joglo dengan kapasitas 100-an orang yang dapat digunakan untuk kegiatan yang membutuhkan tempat yang luas.

Berbagai fasilitas yang disediakan ini kerap dijadikan pertimbangan mahasiswa menyelenggarakan kegiatan. Apalagi, selain memanjakan pengunjungnya dengan keindahan bentangan alam, fasilitas outbond yang tersedia di sini juga bisa

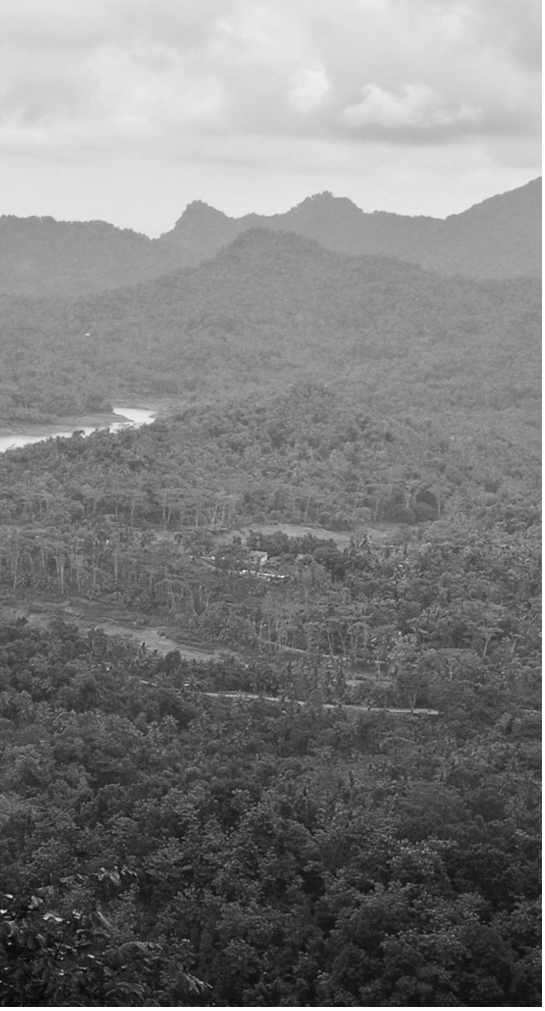


Foto: Nawang/BALAIRUNG

Tamasya Alam Sampai ke Puncak

Oleh Fikri Fawaid

Melakukan piknik tidak lagi sekadar merasakan suasana alami. Panorama semesta pun dinikmati hingga puncak Kalibiru.

digunakan untuk mengisi kegiatan.

Ramahnya masyarakat sekitar kawasan wisata menambah semarak pengunjung untuk dapat menikmati suasana desa. Terdapat pula paket wisata pedesaan yang ditawarkan untuk menikmati kehidupan masyarakat desa. Pengalaman ini sangat cocok bagi masyarakat yang sudah lama tidak menikmati suasana desa.

Dari sekian banyak fasilitas yang ditawarkan, ada satu tempat di atas pohon dengan latar pemandangan Waduk Sermo yang banyak dijadikan tempat mengabadikan gambar para pengunjung. Untuk mencapainya, mereka harus menaiki sebuah pohon yang telah dilengkapi tangga dengan papan kayu di atasnya. Di papan ini wisatawan dapat merasakan deburan angin yang semilir dan menyejukkan diri.

Banyaknya pemberitaan di media sosial semakin mengenalkan Kalibiru sebagai wisata alam alternatif yang tidak kalah kualitasnya. Pengunjung yang datang pun juga terus meningkat dari tahun ke tahun. Peningkatan ini memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar karena dapat meningkatkan taraf perekonomian mereka. Masyarakat setempat pun dapat berjualan dan menyediakan rumahnya sebagai tempat bermalam.

Sayangnya, peningkatan jumlah pengunjung itu tidak dibarengi dengan penyediaan informasi yang lebih jelas di situswebnya. Sebenarnya banyak program wisata yang dapat dipilih ketika ingin berwisata ke Kalibiru. Namun, situsweb Kalibiru belum menyediakan informasi tersebut dengan baik. Akibatnya, pengunjung harus datang ke Kalibiru dulu untuk dapat mengetahui lebih detail progam yang tersedia di tempat wisata ini.

Minimnya informasi itu menyebabkan banyak pengunjung belum paham Kalibiru secara keseluruhan sehingga sekadar dianggap tempat melihat panorama alam dari ketinggian. "Kita harus datang kesini dulu untuk mendapat informasi yang jelas, karena blog atau media sosial yang ada tidak memberikan gambaran jelas," tutur Wahyu, salah seorang pengunjung. Menurutnya, perlu upaya segera dari pihak pengelola untuk memperbaiki situs jejaringnya sehingga calon wisatawan mendapat informasi yang jelas.

Perbaikan tersebut perlu diupayakan pihak pengelola untuk dapat memberikan pelayanan yang baik terhadap pengunjung. Hal itu dilakukan agar pengunjung wisata Kalibiru mau datang kembali. Para wisatawan diharapkan rindu dengan suasana dan pengalaman yang ditawarkan Kalibiru.

Metode Baru Cegah Demam Berdarah Dengue

Hingga saat ini, belum ditemukan vaksin yang mampu menanggulangi infeksi virus dengue penyebab demam berdarah. Metode pemanfaatan bakteri Wolbachia hadir sebagai cara preventif penyebaran penyakit ini.

Oleh Krisnia Rahmadany

Masih lekat di ingatan Sudi bagaimana ia hampir kehilangan anak sulungnya. Pada 2008 lalu, si sulung yang saat itu masih duduk di bangku Sekolah Dasar mengalami demam yang tak kunjung reda. Sudi lalu memeriksakan anaknya ke dokter. Diagnosis dokter menyebutkan anaknya menderita tifus dan diperbolehkan rawat jalan. Namun bukannya sembuh, kondisi anaknya justru kian memburuk. Lagi-lagi dokter pun dirujuk, kali ini dokter yang berbeda. Si sulung ternyata divonis mengidap demam berdarah dan akhirnya mendapat penanganan yang tepat. "Untung waktu itu segera tahu demam berdarah, *lha* kalau telat sedikit saja mungkin nggak ketolong," tutur Sudi.

Sudi adalah warga RT 7 Dusun Jomblangan, Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul. Ia mengungkapkan, daerahnya termasuk langganan demam berdarah dengue (DBD). "Setiap tahun ada saja warga yang kena demam berdarah," ujarnya. Sudi cemas jika suatu hari DBD menjadi wabah di daerahnya. Disebabkan karena tingginya angka DBD di dusun ini, Jomblangan pun dijadikan lokasi riset untuk meneliti populasi Aedes aegypti. Riset ini diselenggarakan sejak 2012 lalu oleh Eliminate Dengue Project (EDP) Indonesia.

"EDP adalah program pemberantasan dengue yang menggunakan metode Wolbachia," ujar Bekti Dwi Andari, peneliti Sosial-Kemasyarakatan EDP Indonesia. Mulanya, EDP digagas oleh ilmuwan dari Monash University Australia. Program ini kemudian berkembang di lima negara, yaitu Vietnam, Indonesia, Australia, Brasil dan Kolombia. Penelitian EDP Indonesia sepenuhnya dilakukan oleh Pusat Studi Kedokteran Tropis, Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada dengan dukungan dana dari Yayasan Tahija.

"EDP digagas karena belum ada cara efektif untuk menghambat penyebaran demam berdarah," tutur Bekti. Sejauh ini, upaya preventif pencegahan DBD dilakukan dengan pengasapan yang bertujuan mengurangi populasi nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Kedua nyamuk itu adalah agen utama yang menularkan virus dengue penyebab demam berdarah pada manusia. Meskipun telah ada pengasapan, metode ini belum dapat menanggulangi penyebaran infeksi dengue secara efektif. Sayangnya, vaksin yang mampu mencegah demam berdarah pada manusia belum ditemukan.

Hal tersebut terjadi karena sifat empat tipe dengue yang merupakan agen utama penyebab DBD. Dengue memiliki empat tipe stereotipe virus, yakni DENV-1, DENV-2, DENV-3, DENV-4 (Rothman, 2010:5). Dalam buku Demam Berdarah: *A Survival Guide*, dr. Genis Ginanjar memaparkan beberapa sifat infeksi virus dengue. Menurutnya, infeksi oleh salah satu tipe virus dengue akan menyebabkan kekebalan terhadap infeksi virus dengan tipe yang sama di masa mendatang. Namun, imunitas ini bersifat sementara terhadap tipe virus lainnya.

Penelitian terhadap dengue juga menunjukan karakteristik khas infeksi dengue pada manusia. Jika seseorang pernah terinfeksi salah satu tipe virus dengue, kemudian terinfeksi kembali oleh tipe virus yang berbeda, maka gejala klinis yang timbul akan lebih berat dan seringkali fatal (Ginanjar, 2007:20). Adanya variabel infeksi virus dengue tersebut menyebabkan sulitnya menciptakan vaksin penangkal infeksi. Penelitian terhadap formulasi vaksin yang mampu menciptakan imunitas terhadap seluruh tipe virus dengue pun tetap berlanjut hingga saat ini.

Belum ditemukannya vaksin anti-infeksi dengue menjadi alasan EDP melakukan pencegahan DBD dengan pendekatan berbeda. Proyek pemberantasan demam berdarah ini dilakukan dengan memanfaatkan bakteri Wolbachia. Bakteri ini secara alami ditemukan pada sekitar 60 persen serangga dari berbagai spesies. Namun, Wolbachia tidak ditemukan dalam tubuh Aedes aegypti. Tim ilmuwan Monash University dengan peneliti utama Prof. Scott O'Neill kemudian menindaklanjuti hal ini dengan menyuntikkan Wolbachia ke dalam telur Aedes aegypti dan meneliti dampaknya.

"Penelitian ini ternyata hasilnya positif," tutur Bekti. Peneliti EDP Indonesia ini mengungkapkan, Aedes aegypti yang mengandung Wolbachia memiliki umur lebih pendek. Rentang hidup Aedes aegypti yang pendek menyebabkan turunnya kemungkinan nyamuk ini menularkan virus dengue ke tubuh manusia. Selain memperpendek umur nyamuk, Wolbachia juga memiliki sifat yang mampu menghambat replikasi dengue di dalam tubuh Aedes aegypti. Kegagalan replikasi menyebabkan virus ini tidak dapat berkembang di tubuh

nyamuk Aedes aegypti yang memiliki Wolbachia.

Hasil penelitian itu menjadi dasar bagi EDP untuk memilih Wolbachia sebagai metode pemberantasan demam berdarah. Sejauh ini, EDP Indonesia telah melaksanakan risetnya di beberapa wilayah Sleman dan Bantul. Pemilihan wilayah ini dilakukan dengan mempertimbangkan faktor geografis, biologis dan sosial.

Secara geografis, daerah penelitian EDP haruslah memiliki kepadatan sekitar 900-1200 unit rumah/km^2. Selain itu, wilayah penelitian juga harus terisolasi oleh batasan fisik dari daerah lainnya. "Jika melihat kawasan penelitian EDP dari citra satelit, maka kawasan-kawasan itu pasti berbatasan dengan Jalan Ringroad dan dikelilingi vegetasi alami," papar Bekti . Ia beralasan batasan fisik ini diperlukan untuk mencegah migrasi nyamuk dari luar ke dalam daerah penelitian.

Selain itu, secara biologis, kawasan yang dipilih sebagai daerah penelitian cenderung memiliki populasi nyamuk Aedes yang tinggi. "Sebelum dilakukan pelepasan Aedes aegypti ber-Wolbachia, kami sudah riset awal selama kurang lebih dua tahun di daerah tersebut untuk memetakan populasi Aedes" tutur Bekti. Ia menambahkan jika faktor di atas terpenuhi maka dukungan masyarakat setempat juga diperlukan untuk menyukseskan program ini. "Setelah riset awal, empat padukuhan di Bantul dan Sleman itu jadi wilayah penelitian EDP," tutur Bekti.

Di Sleman, pelepasan nyamuk Aedes aegypti ber-Wolbachia dilaksanakan di Dusun Kronggahan, Ponowaren dan Karangtengah . Pelepasan Aedes ber-Wolbachia di dusun ini didahului dengan meminta persetujuan warga. Setelah mendapat persetujuan warga, sebanyak delapan sampai sepuluh ekor Aedes aegypti ber-Wolbachia dilepas di setiap rumah. Pelepasan dilakukan sebanyak dua puluh kali dimulai pada awal Januari hingga Juni 2014. "Hasil penelitian di Sleman ini sangat menjanjikan, populasi Aedes ber-Wolbachia diketahui naik 60-90%," tandas Bekti. Ia menambahkan, penelitian di Kronggahan dan Nogotirto ini akan tetap dilaksanakan hingga akhir Desember 2015.

Selain di Sleman, penelitian EDP ini juga dilaksanakan di Bantul, yakni Dusun Jomblangan dan Singosaren. Berbeda dengan pelepasan Aedes ber-Wolbachia dewasa di Sleman, penelitian EDP di Bantul ini dilakukan dengan melepas telur nyamuk Aedes ber-Wolbachia. Pelepasan telur ini dilakukan secara simbolis oleh Wakil Gubernur DIY Paku Alam IX dengan meletakkan ember berisi lima puluh telur Aedes ber-Wolbachia di rumah warga Dusun Jomblangan pada 8 Desember 2014 lalu.



Foto: Dokumentasi Pribadi

"Di Jomblangan dan Singosaren, kami memilih melepas telur nyamuk karena lebih praktis," ungkap Bekti. Ia menjelaskan, pelepasan Aedes dalam bentuk telur juga menyediakan waktu lebih baik bagi nyamuk untuk beradaptasi di lingkungan barunya. "Selain itu, pelepasan telur nyamuk dinilai lebih nyaman buat warga karena telur-telur nyamuk itu tidak akan menetas bersamaan," papar Bekti

Sudi sendiri menginginkan agar program pemberantasan dengue ini berhasil mencegah DBD. Namun, bapak dua anak ini masih menyimpan kekhawatiran soal dampak dari penelitian EDP. "Bagaimana nanti jika manusia yang digigit nyamuk malah sakit karena kena Wolbachia?," ujar Sudi khawatir.

Kekhawatiran warga ini dijawab oleh Bekti. Ia menjelaskan bahwa Wolbachia hanya dapat hidup di sel serangga. Selain itu, ukuran probosis (belalai penghisap) Aedes lebih kecil dari ukuran Wolbachia, sehingga tidak memungkinkan penularan bakteri tersebut ke tubuh manusia. Karena telah terbukti keamanannya, Bekti pun ingin agar EDP dapat berkembang ke wilayah lainnya.

Sejak dimulainya riset awal di tahun 2007, EDP Indonesia tetap berusaha menjalin hubungan baik dengan masyarakat. Bekti mengungkapkan, dukungan dari masyarakat ini penting sebagai salah satu indikator kesuksesan program ini. Sebagai salah satu warga Jomblangan, Sudi pun menaruh harapan besar agar program EDP dapat memberi dampak positif. "Buat saya EDP itu cara preventif mencegah DBD, makanya saya pribadi mendukung penuh program ini," tandasnya.

Gerakan Sehat ala Slowfood

Oleh Hanna Nurhaqiqi



Foto: Ryma/BALAIRUNG

Bahan makanan segar dan organik sebagai solusi hidup sehat dari slowfood

Slowfood menawarkan gaya hidup sehat sekaligus mengajak masyarakat untuk turut paham pada asal usul makanan yang tersaji di meja.

"Siapa bilang proses pembuatan makanan tidak berpengaruh pada tubuh? Semakin baik proses pengolahan makanan, semakin baik pula psikologis konsumennya," ungkap Ibnu Prasetya, pegiat gerakan *Slowfood* Yogyakarta. Ia memberi contoh, pembudidayaan lahan sayuran organik yang dikelola sesuai dengan musim, akan berpengaruh pada kualitas sayuran. Tubuh konsumen akan turut merespon dengan baik sesuai dengan pengolahan awal sayuran organik tersebut. *Slowfood*, merupakan salah satu gerakan pola hidup yang juga mempelajari proses pengolahan makanan sehat.

Selain menawarkan pola makan sehat, gerakan ini juga berusaha kritis terhadap makanan. Kritis disini adalah mencari tahu asal usul makanan dan proses pengolahannya sejak awal produksi. *Slowfood* sendiri merupakan sebuah gerakan berbasis ragam latar belakang yang mengajak peran serta masyarakat menyebarkan pola hidup sehat.

Sesuai dengan namanya, *Slowfood*, gerakan ini membawa gagasan yang melawan konsep *fastfood*. *Fastfood* memiliki konsep menawarkan cita rasa lezat dalam waktu penyajian yang singkat. Produk olahan cepat saji ini mampu dikonsumsi dengan cepat karena mengandung bahan pengawet dan penyedap yang tinggi. Banyak konsumen mengetahui bahwa *fastfood* membawa konsekuensi kesehatan yang tidak baik. Disinilah *Slowfood* berupaya menggerakkan masyarakat untuk tertarik melakukan gaya hidup sehat dan tidak mengonsumsi *fastfood*.

Menurut Sandra Ariestiawati, ketua *Slowfood* Yogyakarta, *Slowfood* ini tidak hanya sebuah struktur yang menawarkan gaya hidup sehat kepada individunya. Namun juga mengajak para anggotanya

berpikir *co-producer*, yakni memahami proses pengolahan makanan dari bahan dasar hingga hasil akhir produk. Bagaimana cara pemerolehan bahan dari lahan pertanian, proses memasaknya hingga pada distribusi produksi yang menjangkau konsumen langsung. "Pola pikir *co-producer* akan mengajak masyarakat bergerak secara mandiri untuk mencari tahu asal-usul makanan yang dikonsumsinya," jelasnya.

Slowfood Yogyakarta merupakan cabang keempat di Indonesia, setelah *Slowfood* Ubud, Kemang, dan JBDTK (Jakarta, Depok, Bogor, Tangerang, Karawang). Semua itu berawal dari *Slowfood International* yang berpusat di Bra, Italia. Carlo Petrini, pada 1918 mendirikan sebuah gerakan untuk mengajak para anggotanya memperlakukan makanan dengan baik dan layak. Petrini mengembangkan gerakan ini dengan melibatkan banyak orang untuk lebih menghargai makanan khususnya makanan lokal. Ia menghubungkan kesenangan makanan yang baik dengan komitmen kepada masyarakat dan lingkungan. Hingga kini, telah berkembang di 150 negara di seluruh dunia.

Sandra menerangkan bahwa gerakan ini memegang teguh tiga prinsip, yakni baik, bersih, dan adil. Prinsip baik dan bersih diterapkan dengan mengetahui makanan yang diperoleh melalui proses pengolahan dan berbahan dasar yang baik. Bahan dasar baik adalah bahan yang tidak berpestisida, minim kandungan pengawet, serta diolah oleh pabrik yang menerapkan *Good Manufacturing Practice* (GMP). GMP merupakan sistem yang memastikan suatu produksi pangan telah konsisten dan sesuai dengan standar kualitas. Kemudian, yang tidak kalah penting ialah memperlakukan petani dengan adil, dimana biaya produksi yang ditentukan memang sesuai dengan proses produksi yang baik. "Pola makan sehat itu diawali dengan menerapkan prinsip tersebut," terang Sandra.

Para anggota *Slowfood* yang terdiri dari berbagai latar belakang pun turut mengaplikasikan ketiga prinsip dengan cara yang berbeda-beda. Dhana, mahasiswa yang juga merupakan petani organik, menerapkan prinsip baik dan bersih, dengan menanam sayuran organik. "Harga sayuran organik lebih mahal dari sayuran biasa, tetapi memberikan hasil produksi yang berkualitas dan bersih," papar Dhana. Sandra menambahkan bahwa prinsip adil juga dapat diterapkan pada hasil pertanian melalui kesetaraan antara biaya produksi dengan kualitasnya. "Seperti kentang di Wonosobo yang tidak menggunakan pestisida, harganya sedikit lebih mahal dari kentang di pasar, meski begitu kentang organik ini layak untuk dibeli," papar Sandra.

Dalam upaya untuk menarik masyarakat menerapkan gaya hidup sehat, Dhana juga memperkenalkan pola hidup sehat dengan bertanam sayuran organik bersama siswa-siswi SD. Para siswa terjun langsung untuk belajar menanam bibit serta cara memanen sayuran organik. Kemudian, anak-anak juga membuat kelompok untuk bediskusi tentang apa saja yang telah dipelajari. "Dari situ akan muncul pemahaman sejak dini tentang pentingnya pola hidup sehat serta cara bertanamnya," tambah Dhana.

Menurut Imma Rahmawati, perintis *Slowfood*, menyebarluaskan konsep gaya hidup sehat yang tidak sederhana ini bukanlah hal mudah. Terutama untuk mengajak masyarakat berpikir tentang konsep *co-producer* sebagai konsep gaya hidup sehat utama, serta berjuang untuk mempertahankan makanan lokal. Dimana baik bahan makanan dan proses produksinya dilakukan secara lokal dan mandiri dengan tidak melakukan impor. "Gaya hidup sehat itu selain mengonsumsi makanan yang baik, juga harus mempertahankan makanan lokal di Yogyakarta," paparnya.

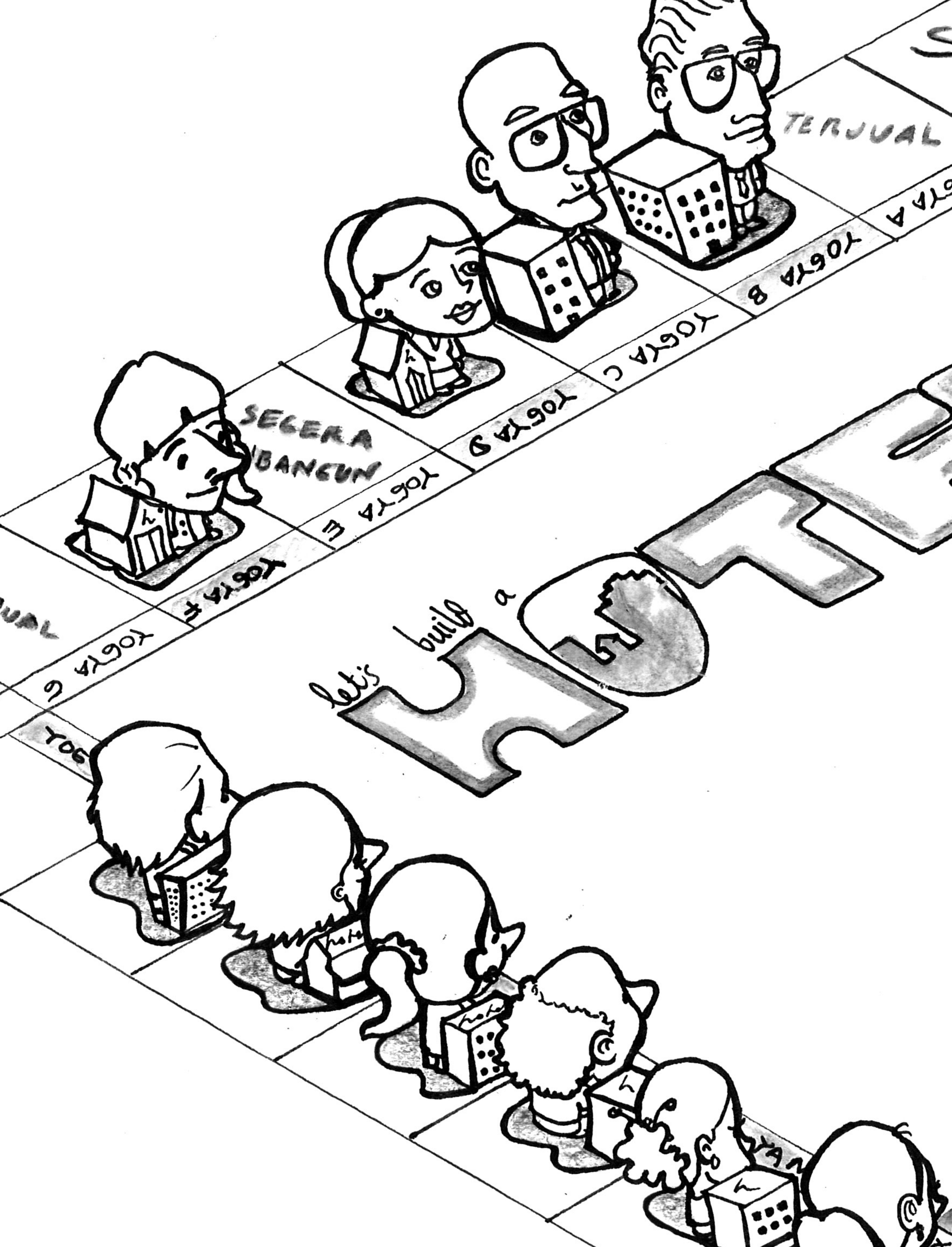
Imma menambahkan, *Slowfood* sendiri memiliki strategi dalam memperkenalkan makanan-makanan lokal kepada masyarakat luas. Seperti kegiatan Terra Madre Day, yakni acara yang memperkenalkan kembali makanan-makanan yang hampir punah ataupun belum banyak diketahui oleh masyarakat Yogyakarta. Acara yang dihelat pada Desember 2014 ini, memperkenalkan Plasma Nutfah Pisang yang berasal dari Giwangan. "Di Indonesia kini telah mengimpor kedelai, tepung, dan jagung. Ada wacana pisang pun akan diimpor, padahal kita memiliki 70 persen varietas pisang di dunia. Hal ini jangan sampai terjadi," ujarnya.

Pangan lokal itu penting untuk dipahami masyarakat luas ditambah lagi produk-produk cepat saji dari luar negeri yang terus menggerus pangan tradisional Yogyakarta. Oleh karena itu, makanan tradisional yang juga pangan lokal harus diangkat kembali. Gerakan ini berupaya melestarikan produk olahan makanan tradisional ataupun sumber hayati lokal. "Pelestarian itu tidak hanya menjadi jejak sejarah, namun juga dapat diturunkan kepada generasi ke depan mengenai variasi pangan yang ada di Indonesia," pungkas Imma. Upaya melestarikan pangan lokal diharapkan dapat mewariskan wawasan luhur kepada generasi muda kedepan.

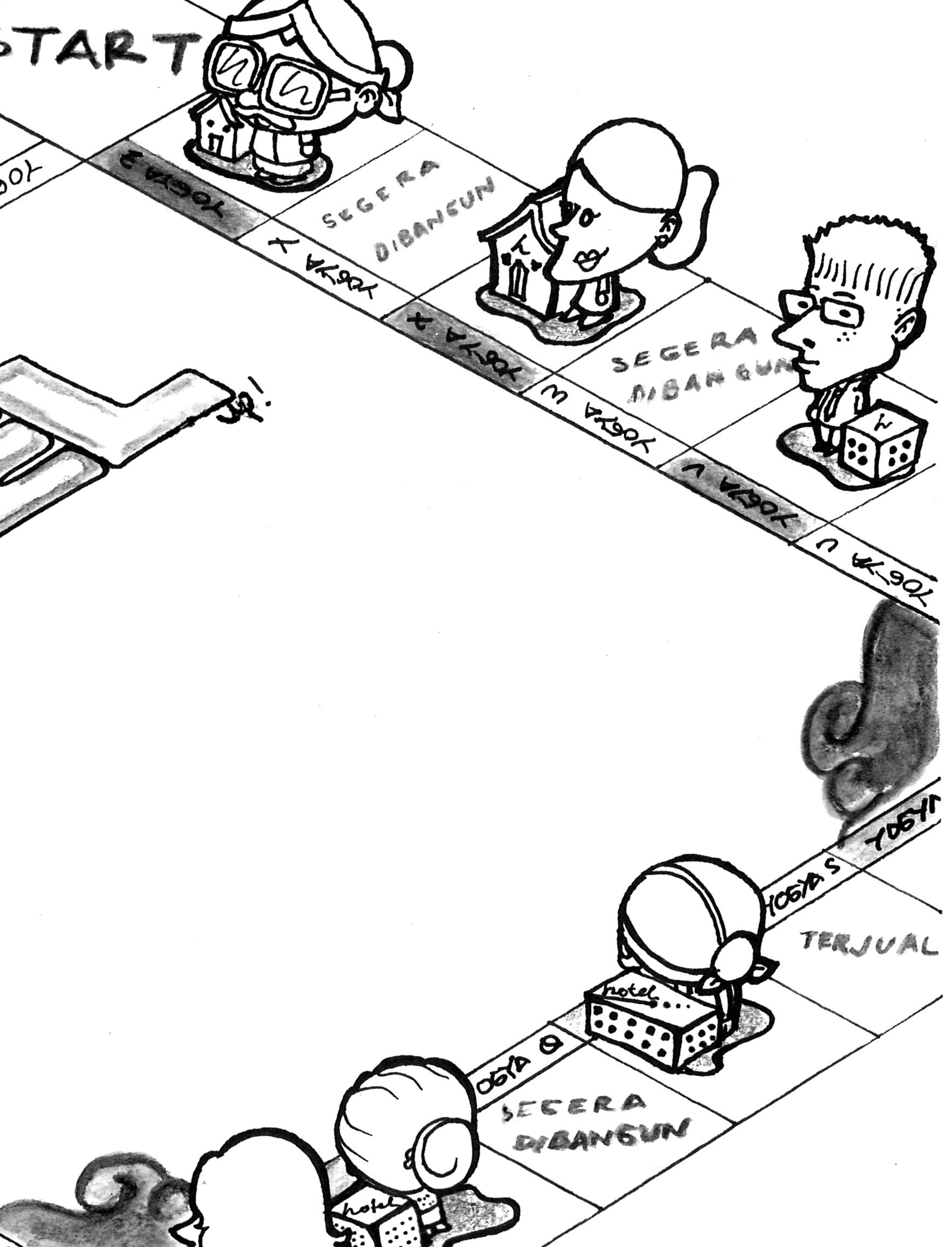
Pelestarian pangan lokal ini tidak terlepas dari peran petani setempat untuk terus berproduksi. Hal tersebut harus dihargai oleh masyarakat serta tetap tersimpan dalam suatu arsip khusus agar dapat diteruskan pada generasi muda mendatang. Maka dibentuklah program *Ark of Taste*, sebuah katalog *online* yang dibentuk *Slowfood* pusat untuk mempertahankan pangan lokal, bahan pangan, ataupun makhluk hayati.

Generasi muda juga memiliki peran dalam menyebarluaskan pola memperlakukan makanan yang baik. Bagi Ibnu, anggota *Slowfood* yang juga mahasiswa, generasi muda seharusnya tidak serta merta memakan produk apa saja yang ada di sekitar. Tetapi juga kritis dalam mencari asal-usul proses pengolahannya dengan konsep baik, bersih, dan adil. Menurutnya pengembangan riset tentang gaya hidup sehat serta sosialisasi kepada masyarakat sangat penting. "Mahasiswa juga harusnya lebih paham dan mengerti tentang memperlakukan makanan. Lebih banyak lagi melakukan riset tentang pangan lokal sekaligus mencari cara untuk melestarikanya," jelasnya.

Gerakan ini terdiri dari berbagai elemen masyarakat, dengan berbagai spesialisasinya masing-masing. Keberadaannya tersebar di wilayah Yogyakarta untuk menyebarluaskan konsep gaya hidup sehat. Hal ini membuat pola hidup sehat tidak hanya untuk konsumsi individu, sekaligus menjadi usaha mempertahankan makanan lokal yang ada.

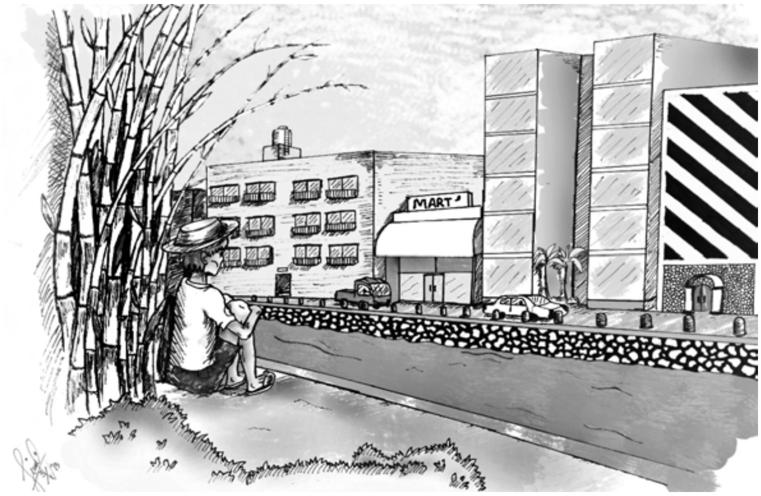


TERJUAL
YOGYA A
YOGYA B
YOGYA C
YOGYA D
SEGERA DIBANGUN
YOGYA E
YOGYA F
YOGYA G
let's build a


START
SEGERA DIBANGUN
SEGERA DIBANGUN
TERJUAL
SEGERA DIBANGUN
hotel
hotel

Nasib Penjual Tanah

Oleh : Catur Dwi Janati,
Mahasiswa Fakultas Pertanian UGM



Susuri jalan aspal ini
Kau akan bertemu dirinya
Tinggi melebihi tugu
Lapang tempat bermain besarnya
Kokoh kuat seperti beringin tua
Juga penampilannya mewah

Tempat ia berdiri sekarang mulanya milikmu
Pemberian buyutmu yang kau tukar
Dengan harapan sesaat tentang kemegahan
Tentang hidup tentang nasib duniamu

Waktu itu iming-iming kekayaan telah membunuh akalmu
Kau setuju lalu yakinkan keluargamu hidup lebih baik
Sepakat lantas kau jual tanahmu kau dekap uangnya
Lalu kau berjudi
Lalu kau tenggak ciu
Lalu kau menyanyi
Wanita mengitarimu
Dan begitulah hari-hari berjalan
Berakhir miskin kau punguti sampah tiap hari

Susuri bantaran sungai ini
Kau akan bertemu milikmu
Melintasi titian ke sisi lainnya
Tepat di pangkuan pohon bambu
Pancang tertancap ini
Diselimuti bambu teranyam
Kau tambal dengan kardus
Kau beri atap dari rentenir
Beranak-pinak di sana

Disitulah kau dihinakan sekarang
Sama dengan ikan kali di hadapanmu
Makan dari sampah dan mudah terseret arus

Tempat kau berdiri sekarang
Tegak di titian kali ini
Kau menengadah otot lehermu terlihat
Terpejam kau dalam khayal
Mati tanpa menimpali keluargamu lagi kesengsaraan
Kau ceburkan ragamu dan hanyut
Dengan harapan sesaat tentang kemegahan
Tentang hidup tentang nasib duniamu

Lagu Burung Prenjak

Oleh : Krisnia Rahmadany,
Mahasiswa Sastra Inggris UGM 2012



Di dahan randu, seekor prenjak pilu mengadu
soal padang berpupur semen, bergincu plamir
juga dikeruknya tegalan dan kebun waru.

Ilalang pun sudah dibunuh dalam sujud
digilas dan dihinakan truk batu kapur.

Di dahan randu, seekor prenjak pilu mengadu
tentang hidup yang digagahi tiang pancang
juga angin yang bergidik asap pabrik.

Sungai pun sudah dikencingi aliran limbah
maka anak-anak mujair mati sebelum tua.

Di dahan randu, dilantunkan lagu soal pilu
juga kelaliman yang diperadabkan
lalu kerakusan diangkat jadi raja-raja.

Jagat pun sudah dijangkiti keserampangan
maka ketertindasan jadi laku kewajaran.

Di dahanrandu, si prenjak pun melagu:
tamak, tamak, tamak; syairnya.

"*WEE LHA DALLAH*, APA KAU INI KETULARAN PAHAM DEMOKRASI YANG SEDANG DIPUJA-PUJA ITU KAKANG SEMAR, RAKYAT YANG BERKUASA DAN BEBAS MENENTUKAN NASIBNYA SENDIRI?" TIMPAL BETHARA NARADA."

SEMAR

Oleh *Danang T.P.*)*

"Semar di manakah kau berada?" Teriak dalang itu keras sekali. Satu dari berberapa puluh wayang yang telah disipakan dalam kotak hilang. Siapakah yang telah meyembunyikan wayang Semar?

Malam itu dingin terasa benar menusuk tulang. Bulan purnama bersinar. Tetapi pada puncak lakon, satu wayang hilang, entah kemana. Tidak ada yang tahu. Sang dalang Ki Padmono mulai panik. Tangannya dengan cekatan mengeluarkan semua wayang dari dalam kotak. Membolak-balinya satu persatu. Mencari sosok semar.

Kelir, gambaran dunia, arena dalang mengudar cerita dengan wayangnya untuk sementara waktu dilupakan. Para *penabuh* gamelan pun tertular kepanikan Ki Padmono. Semua alat musik berhenti dibunyikan. Para sinden turut berhenti melantunkan gending.

Di atas kelir yang terhampar, Arjuna, Gareng, Petruk, dan Bagong ditinggalkan dalang. Ia tidak tahu harus bertindak bagaimana. Sementara itu malam tidak bisa dihentikan, semakin larut. Namun, wayang Semar yang hilang belum ketemu.

" *Walah…walah*, bagaimana *to* ini?" celetuk salah satu penonton.

Orang-orang tua yang duduk berkalung sarung menekuk lutut di sekitar pangung mulai bubar. Pulang ke rumah masing-masing.

" Lanjutkan saja ceritanya tanpa Semar!" celetuk salah satu pemuda.

"Apa ya bisa lakon dilanjutkan tanpa Semar?" timpal pemuda yang lain.

"*Huss, ngawur*. Tak ada riwayatnya lakon wayang tanpa Semar." jawab seorang tua yang mengenakan songkok hitam.

Sementara itu, di atas panggung dalang dan para *penabuh* gamelan semakin panik.

"Itu-itu, tengkurapkan semua gamelan dan kotak-kotaknya. Siapa tahu Semar bersembunyi dibalik gamelan," sang dalang berteriak memerintahkan para *penabuh* gamelan. Dengan cekatan kotak dijungkirbalikkan. Semua gamelan ditengkurapkan.

"*Piye-piye?* Ketemu atau tidak?" para *penabuh* gamelan saling bertanya.

" Enggak ada. Kosong melompong."

"Aduh, *gimana* ini."

Sang dalam terdiam sejenak. Berpikir haruskah lakon ini tetap dilanjutkan tanpa Semar. Sementara dalang terdiam, penonton tinggal beberapa orang saja. Sebagian besar sudah pulang menuju rumah masing-masing.

Di tengah perjalanan pulang bapak-bapak, ibu-ibu, remaja, hingga anak-anak mengeluh tidak jelas. Mencela dalang dan para kru-nya.

"Kok, ya, bisa-bisanya Semar hilang."

"*Lha iyo*, kok bisa. Apa tidak disiapkan segala sesuatunya sebelum pentas?"

"*Wah, wah*. Lain kali jangan mengundang dalang itu lagi!"

"*Huss*, kalian jangan *ngomong* sembarangan. Jangan-jangan ini pertanda buruk," kata seorang tua

"Sudahlah, biarkan saja. Apa juga guna Semar si buruk rupa itu."

Setelah pembicaraan yang *ngedumel*, bersesak-sesak *ngremeng* itu, akhirnya satu persatu penduduk masuk rumah mereka. Mematikan lampu dan tertidur.

***

Bagaimana nasib Arjuna? Kesatria, lembut pemberani itu kehilangan tempat mencari petunjuk. Semar yang ditunggu petuah-petuahnya hilang bagai ditelan bumi. Bagong, Gareng, Petruk, hanya bisa berkali-kali minta gending pada sinden, yang suaranya semakin serak. Kalut dan bingung, para sinden beberapa kali merapikan sanggul untuk menenangkan diri. Lihatlah, Arjuna sang Kesatria berdiri lusuh, tanpa daya.

Serba kacau. *Goro-goro* yang ditunggu-tunggu gagal dimulai. Kesatria sudah siap, dalang sudah mengambil nafas panjang untuk mengeluarkan suluk andalan, tapi Semar hilang tiba-tiba. Semar kau dimana?

***

" Ada perlu apa kau menghadap, wahai Ki Lurah Semar, wahai Hyang Badranaya?"

"Beribu-ribu kesalahan mohon dimaafkan. Hamba bosan jadi wayang, wahai Hyang Guru."

Batara Guru, yang menerima kehadiran Semar dan mendengarkan keluhannya hanya tersenyum. Namun, seluruh Kayangan Jongring Saloko, gempar. Para dewa kaget, bidadara dan bidadari termenung menghentikan tugas hariannya. Sementara itu, Batara Guru hanya terdiam.

"Terus kau minta jadi apa wahai Hyang Ismaya, wahai Lurah Semar dari Padukuhan Klampis Ireng?" jawab Batara Guru dengan senyum.

Semar sang dewa yang bentuknya samar, tidak laki-laki tidak perempuan itu terdiam sejenak. Tampak tangannya mengaruk-garuk pantat.

"Hamba minta Arjuna dan para Pandawa kalah dalam peperangan."

"Wee lha dallah, mengada-ada saja kau ini." sahut Batara Narada yang terduduk sambil minum teh.

"Terserah Kakang Narada. saya hanya minta persetujuan Hyang Guru," jawab Semar ketus

Batara Guru mengeleng-gelengkan kepala. Sepertinya sedang berpikir, mempertimbangkan permintaan Semar. Para dewa yang sejak awal sibuk dengan urusan masing-masing di berbagai sudut Kayangan Jongring Saloko, kini semuanya berkumpul, duduk bersila mengelilingi *pisowanan*, tempat Batara Guru menerima tamu.

Sementara di Kayangan Jongring Saloko semua dewa termanggu menunggu jawaban Batara Guru atas pertanyaan semar, di bumi kelir masih terkembang. Arjuna masih berpacak tangan. Dalang merapal mantra memanggil Semar. Beberapa *penabuh* gamelan sudah *ngorok*. Sinden mulai melepas sanggul. Para penonton tidak tersisa satu pun. Semua telah pulang ke rumah, tertidur pulas dan *ngorok*.

Batara Guru merapikan selendang sutranya. Memantapkan cara duduk di atas singgasana. Dan mulai bersabda.

"Ki Lurah Semar, gerangan apa kiranya yang membuat kau memohon seperti itu?"

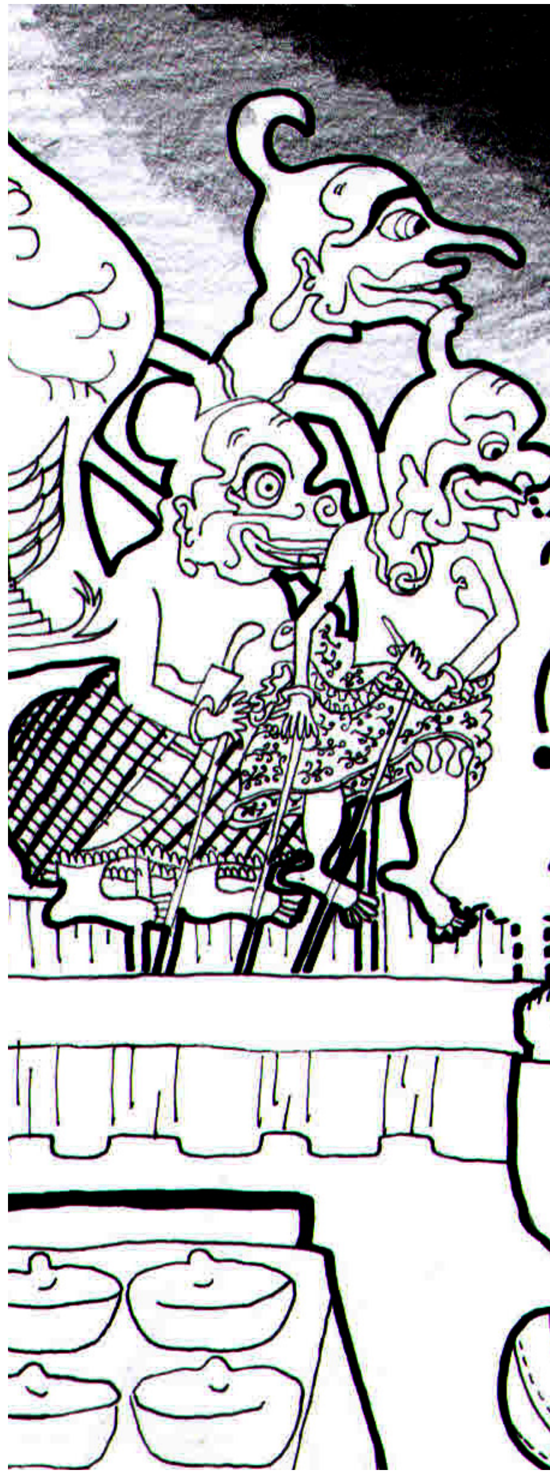
"Beribu salah mohon dimaafkan, wahai Hyang Guru. Hamba sudah bosan kiranya menasehati para kesatria, biarlah lakon wayang berlangsung tanpa penguasa, biarlah para kurawa hidup tanpa musuh, biarlah setiap wayang menentukan kuasannya sendiri. Kalau hamba tetap jadi wayang berarti tetap akan ada *goro-goro*, tetap akan ada perang. Bukankah begitu wahai Hyang Guru, Wahai Hyang Jagadnata?"

"Wee lha dallah, apa kau ini ketularan paham demokrasi yang sedang dipuja-puja itu Kakang Semar, rakyat yang berkuasa dan bebas menentukan nasibnya sendiri?" timpal Bethara Narada.

"Terserahlah apa itu namanya, wahai Kakang Narada, yang jelas aku ini sudah bosan jadi wayang."

"Wah, wah, gawat ini. Kita para dewa jangan-jangan nati juga ikut pensiun jadi wayang," jawab Batara Narada, sambil mengelus perutnya yang buncit.

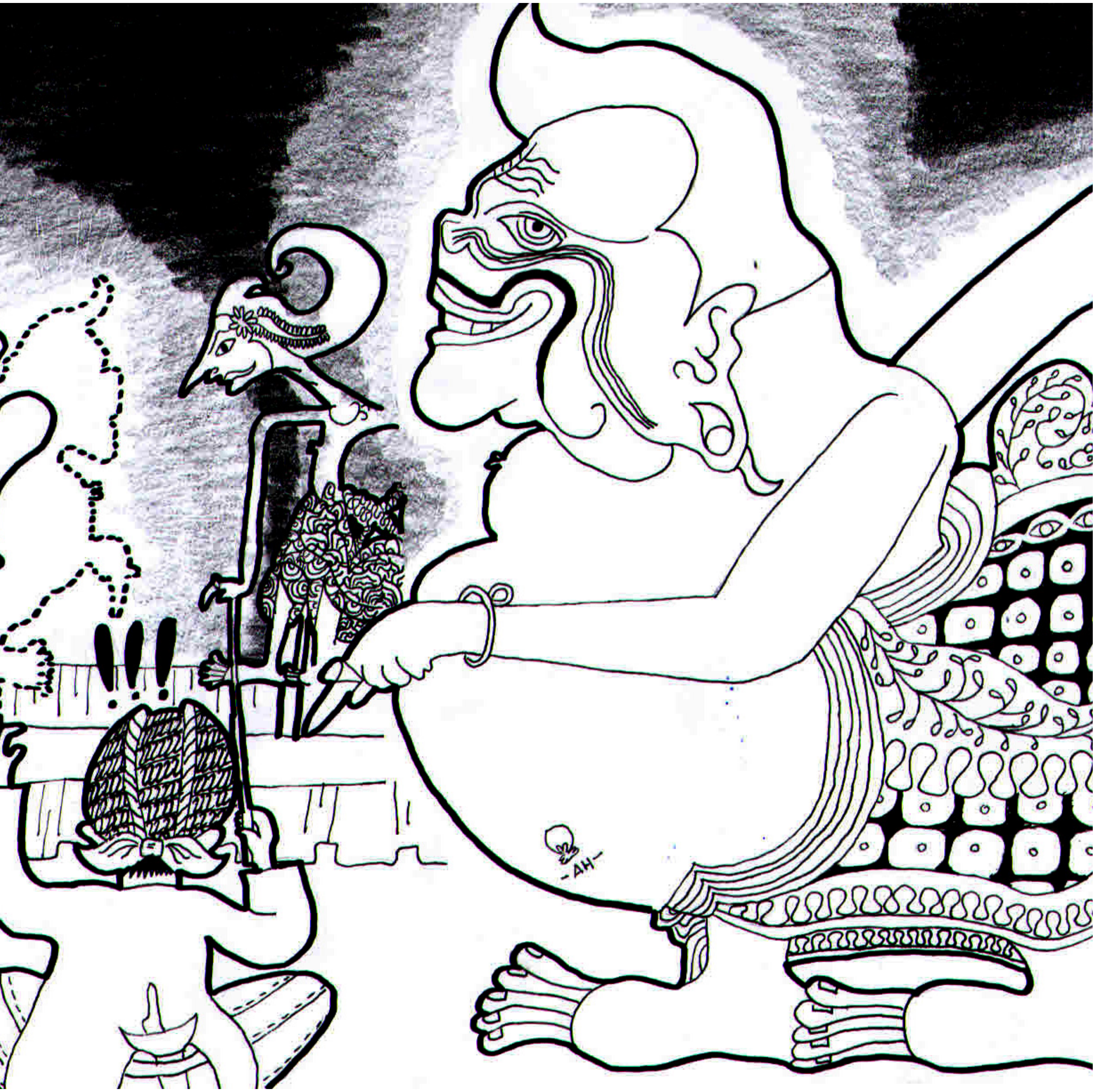
Sang Hyang Guru menyandarkan bahu pada kursi tahtanya. Lembu Andhini melenguh panjang. Lenguhannya merdu, indah, bukan seperti sapi biasa suaranya seperti dalang bersuluk.



"Oooongggggg......Henggggggg"

***

"Wahai Ki Lurah Semar, jika memang itu permintaanmu, kau salah alamat. Ajukanlah permintaanmu pada dalang yang sedang merapal mantra di bumi sana. Asal kau tahu, aku pun wayang yang dia



mainkan. Kita yang berada di kayangan ini, kejadian yang terjadi sekarang ini, semuanya bukan kendaliku, wahai Ki Lurah Semar. Segalanya berjalan menurut cerita yang ada pada pikiran dalang yang kau tinggalkan. Tidak ada yang lepas dari alur ceritanya, termasuk dengan ulahmu yang menghilang tiba-tiba dari alur cerita. Sungguh ini semua bagian dari cerita dalang, yang sekarang sedang merapal mantra. Begitulah, wahai Hyang Badranaya dari Klampis Ireng"

Setelah sabda Batara Guru, tiba-tiba hening. Semar hilang dari pandangan. Dan tak ada yang tahu kelanjutan cerita.

***

***) Penulis adalah mahasiswa Jurusan Filsafat Universitas Gadjah Mada, yang juga pegiat jurnal Cogito.**



Negara, Masyarakat Sipil, dan ASEAN

Oleh Ahmad Rizky Mardhatillah Umar

Peneliti di ASEAN Studies Center, Universitas Gadjah Mada

PADA 2003, sepuluh negara anggota ASEAN berkumpul dalam Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN di Bali. Pertemuan yang hasilnya dikenal sebagai "Bali Concord II" tersebut melahirkan sebuah gagasan penting dalam politik regionalisme di Asia Tenggara: dideklarasikannya Komunitas ASEAN.

Setelah satu dekade deklarasi tersebut, perbincangan tentang Masyarakat ASEAN semakin menghangat, terutama dalam konteks Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Blueprint MEA terutama menjadi sorotan publik karena akan mentransformasikan ASEAN sebagai 'pasar dan basis produksi tunggal' dengan lingkungan ekonomi yang kompetitif dan terintegrasi di pasar global.

Meski demikian, perbincangan tentang Masyarakat ASEAN, yang bakal diinisiasi pada tahun 2015, cenderung melupakan satu entitas yang penting: masyarakat sipil. Saat hampir semua perbincangan yang muncul bertumpu pada tema-tema soal "kesiapan" atau "liberalisasi", keberadaan masyarakat sipil yang kuat dan independen mestinya juga menjadi wacana yang patut didiskusikan.

Negara dan Masyarakat Sipil di ASEAN

Mengapa membicarakan masyarakat sipil di ASEAN menjadi penting? Ada dua argumen yang bisa dikemukakan. Pertama, dalam konteks MEA akan ada kelompok-kelompok masyarakat yang harus berhadapan dengan pasar dan basis produksi tunggal yang akan dihadapi di tingkat regional. Kedua, sangat banyak persoalan di negara-negara Asia Tenggara yang berkaitan dengan sikap represif negara kepada kelompok sosial tertentu. Maka, keberadaan masyarakat sipil menjadi sangat penting sebagai penyeimbang dari kekuatan negara yang represif tersebut dan menciptakan kultur politik yang demokratis.

Kendati demikian, struktur politik yang terbangun di ASEAN selama ini ternyata masih berpusat pada "negara" sebagai aktor utama. Sejak dideklarasikan, ASEAN hanya mengakui "negara" sebagai satu-satunya entitas di ASEAN. Semua urusan yang berkaitan dengan ASEAN adalah tanggung jawab negara. Konsekuensinya, ASEAN menjadi sangat elitis dan tidak diketahui public.

Namun, Bali Concord II sedikit mengubah peta aktor yang ada. Setelah melakukan KTT di Bali tahun 2003, ASEAN memutuskan untuk membuat beberapa dokumen yang mempertegas konsep Masyarakat ASEAN. Pengesahan beberapa dokumen tersebut menjadikan masyarakat sipil punya sedikit ruang untuk terlibat di ASEAN.

Munculnya ruang-ruang tersebut, walaupun sebetulnya masih sangat terbatas, merefleksikan adanya riak dari masyarakat sipil yang mulai sadar dengan proses-proses regional yang ada. Pada 2005, beberapa organisasi masyarakat sipil yang difasilitasi Solidarity for Asian People's Advocacy dan jejaring kerjasama ASEAN-ISIS menggelar ASEAN Civil Society Conference (ACSC) untuk pertama kalinya.

ACSC diikuti oleh ratusan perwakilan organisasi masyarakat sipil yang menaruh perhatian pada proses-proses pembentukan Masyarakat ASEAN. Proses-proses yang dilakukan ACSC, pada perkembangannya, mengikuti proses yang berlangsung di ASEAN. Tuan rumah dari perhelatan forum biasanya adalah organisasi masyarakat sipil yang berasal dari negara yang menjadi Chair ASEAN.

Munculnya ACSC juga diikuti oleh pelobian yang berlangsung di sekitar Komisi HAM ASEAN. Proses lobi yang dilakukan kepada perwakilan negara tersebut kemudian membuahkan hasil dengan duduknya dua orang perwakilan dari organisasi non-pemerintahan (Non-Governmental Organization/NGO). Walaupun keduanya berhasil mewakili NGO di Komisi HAM ASEAN tersebut, posisi mereka harus berhadapan dengan negara. Sebagai contoh, dalam beberapa agenda HAM ASEAN di Laos, Sripapha tidak diperbolehkan oleh pemerintahnya untuk menggunakan kata-kata "HAM" atau "Demokrasi". Klimaksnya, dalam pembahasan tentang Deklarasi HAM ASEAN pada tahun 2012, mereka juga harus berhadapan dengan negara yang berkeinginan menjadikan agenda HAM harus 'sesuai dengan hukum di negara masing-masing'. Pada titik ini, negara kemudian berhasil mengokupasi deklarasi yang kemudian dianggap 'kontroversial' tersebut.

Prospek Pasca-2015

Dengan demikian, kita dapat melihat bahwa keterlibatan masyarakat sipil di ASEAN akan bergantung pada dua hal: Pertama, "posisi" dari negara-negara yang ada di ASEAN, apakah mereka demokratis atau otoritarian. Kedua, desain institusional yang ada di ASEAN. Dalam isu HAM, NGO akan dengan mudah mengadvokasikan kepentingannya karena adanya Komisi HAM. Akan tetapi, di isu seperti buruh migran atau penggusuran lahan nyaris tidak ada tempat bagi NGO untuk bernegosiasi di ASEAN karena tidak adanya wadah institusional.

Lantas, bagaimana prospek keterlibatan masyarakat sipil di ASEAN? Berkaca pada pengalaman yang ada di kasus HAM, penting bagi aktivis masyarakat sipil di Indonesia untuk memperjuangkan mekanisme institusional di ASEAN guna mengadvokasikan kepentingannya. Mekanisme ini bisa berupa wadah atau konsultasi-konsultasi formal dengan segenap pemangku kepentingan, yang tentu akan melibatkan NGO di dalamnya.



Akar Sosiologis Geng Pelajar

Oleh Derajad S. Widhyharto

Dosen Jurusan Sosiologi, Fisipol, UGM.
Peneliti, Youth Studies Centre (YouSure), Fisipol, UGM

Masyarakat kita telah dikenalkan dengan budaya kekerasan yang panjang, sejak perjuangan kemerdekaan sampai dengan reformasi saat ini. Dengan kata lain, kekerasan sering kita saksikan, dengar, rasakan dan lakukan dalam kehidupan sosial kita.

Secara sosiologis kekerasan di atas dimaknai dalam dua aspek: kekerasan terlembaga dan kekerasan tidak terlembaga. Kekerasan terlembaga artinya kekerasan yang dianggap menjadi bagian dari nilai dan norma masyarakat. Misalnya, pendidik diperbolehkan menghukum peserta didiknya yang melanggar nilai dan norma dengan kekerasan, sebab dianggap menjadi bagian dari pembinaan mental.

Sementara itu, aspek kekerasan tidak terlembaga merujuk pada cara berpikir dan ketidakpahaman individu dan masyarakat terhadap informasi tertentu yang telah menciptakan kebencian maupun kekerasan pada individu dan kelompok sosial lain. Kekerasan ini bersifat laten, tahan lama, dan bermuatan doktrin-doktrin kekerasan yang tak terlihat. Adapun bentuk kekerasan ini seperti kekerasan oral atau verbal, dan bullying.

Selanjutnya, kedua aspek kekerasan tersebut tereproduksi melalui perbedaan dan kesenjangan di rumah dan sekolah. Kondisi ini menciptakan keyakinan baru bahwa kekerasan merupakan jalan keluar berbagai perbedaan nilai, norma, pengetahuan, status, dan peran yang tidak pasti. Pada level inilah praktik kekerasan merujuk pada perbedaan dan kesenjangan nilai, norma, pengetahuan, status dan peran kedua institusi pembelajaran sosial tersebut.

Pelajar atau kaum muda merupakan bagian anggota masyarakat yang terlibat sebagai kontestasi pertarungan nilai, norma, pengetahuan, status dan peran sosial di lingkungannya. Ada tiga faktor kritis yang dianggap dapat mereproduksi penerimaan pelajar terhadap tradisi kekerasan (nglitih). Pertama, gagalnya beradaptasi dengan nilai, norma, pengetahuan, status dan peran di rumah maupun sekolah. Kedua, perbedaan dan kesenjangan menciptakan kebingungan baru terhadap institusi rumah dan sekolah dianggap monoton tidak sesuai dengan karakter muda pelajar. Ketiga, dominasi nilai tanda daripada nilai guna menjadi titik kritis berikutnya yang menjadikan pelajar cenderung mereproduksi kekerasan sebagai gaya hidup kaum muda kota serta konsumsi atas simbol modernitas dan solidaritas.

Lalu sikap yang harus diambil jika pelajar terlibat dalam geng, merujuk pada dua pendekatan. Pertama, pelajar dan kaum muda merupakan istilah sosial yang digunakan untuk menjelaskan peran manusia sebagai agen transisi. Konsep ini yang kemudian digunakan untuk mengajak orang tua dan pendidik bekerja sama dalam menghadapi efek negatif geng pelajar. Kedua, mengkomunikasikan bersama kegiatan rumah dan sekolah sehingga orang tua dan pendidik bekerja sama menjalankan agenda pendidikan. Dengan begitu, hubungan pendidik-orang tua dan peserta didik bukan dalam hubungan bisnis. Ketiga, menguatkan hak dan kewajiban dalam keluarga maupun sekolah, dengan cara membuat "kontrak belajar". Hal itu dapat diwujudkan dalam bentuk menyepakati sanksi, membuat mekanisme pengawasan-evaluasi, dan menyepakati bentuk rehabilitasi di dalam maupun di luar sekolah.

Wawasan pendidikan kita telah berhasil mengajak untuk menghafal kondisi sosial, budaya, dan keyakinan. Sebaliknya, kondisi itu gagal mengajak untuk memahami perbedaan sosial, budaya, dan keyakinan itu sendiri. Oleh sebab itu, memenjarakan dan menghukum geng pelajar dengan kekerasan tak akan menyelesaikan masalah. Sebaliknya, mereka justru akan menstimulasi modus kekerasan baru.

Selanjutnya, nglitih yang dianggap sebagai budaya tidak dapat dihilangkan dalam waktu sekejap. Perlu upaya sistematis untuk memutus rantai regenerasi nglitih tersebut dengan melakukan tiga pendekatan: input, proses, dan output. Pendekatan input berarti sudah saatnya sekolah tidak hanya mengukur penerimaan siswanya dari ukuran angka atau huruf semata. Para siswa tersebut diukur pula dari sisi kemandirian sosial sebagai pelajar, seperti kemampuan beradaptasi dan kemampuan mereka menyelesaikan masalah personal maupun social.

Pendekatan proses berarti proses belajar tidak melulu merespon materi pelajaran, tapi juga mengajak mereka memahami risiko sosial-budaya di sekolah dan rumah. Caranya, mengajak semua pihak untuk saling mengawasi apa yang terjadi di sekolah dan rumah. Dengan demikian, setiap gejala dapat diprediksi dan "gerakan kekerasan" akan dapat dipantau dan diantisipasi–mengingat orang tua, pendidik, karyawan dan pelajar menjadi satu kesatuan dari proses pendidikan yang berlangsung.

Pendekatan output berarti memastikan bahwa pelajar mempunyai konsistensi terhadap rencana belajar. Intinya bukan berarti mencari cara agar pelajar selalu sibuk belajar. Namun, pelajar mendapat pelajaran dari proses belajar yang dialaminya. Untuk mencapai luaran tersebut orang tua dan sekolah bekerjasama untuk memastikan pelajar mendapat proses belajar yang sesuai dengan kebutuhan pelajar sebagai kaum muda.



Foto: Aliftya/BALAIRUNG

Langen Mandra Wanara di Tangan Juwaraya

Keistimewaan Yogyakarta sedang dalam kontroversi. Ramai sekali terdengar keributan soal penguasaan tanah. Namun di sudut Yogyakarta yang sepi, seorang seniman berjuang mempertahankan kelompok kesenian Langen Mandra Wanara terakhir di kota budaya ini.

Oleh Dessy Widya Astuti

"Heh kera sapa ran ira? Wani-wani mapage yuda mami!" Prahasta menantang Anila begitu lantang. Keduanya pun beradu kesaktian. Mereka saling sepak, saling terjang dan saling hunus senjata andalan.

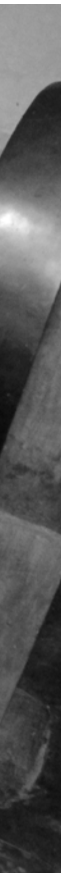
Naas bagi Prahasta. Tak seberapa lama, Anila berhasil menimpanya dengan tugu batu. Konon, tugu itu adalah jelmaan Dewi Windradi, ibu Sugriwa si Raja Kera yang dikutuk suaminya karena dituding menjalin hubungan gelap dengan Btara Surya. Gugurlah Prahasta seketika. Sang Senapati yang telah memilih tujuan perangnya sendiri, menemui ajal.

Juwaraya menceritakan cuplikan adegan lakon Langen Mandra Wanara tersebut saat ditemui di rumahnya yang sekaligus menjadi sanggar latihan. Seperangkat peralatan pertunjukkan wayang memenuhi rumah joglonya. Semua peralatan tersebut tertata rapi dan terawat beserta naskah pertunjukkan wayangnya,, termasuk wayang Langen Mandra Wanara.

Dalang yang memiliki tiga anak ini juga mengisahkan cerita yang biasanya dibawakan wayang Langen Mandra Wanara bermacam-macam. Salah satunya cerita perang Langen yang menceritakan raksasa melawan Kera Prabu dan bala tentara untuk merebut Dewi Tara. "Kisah perang ini sering disebut pertunjukkan Subali di pewayangan," tuturnya.

Kisah perang pada cerita Langen tersebut dipelajari Juwaraya saat tergabung dalam Persatuan Perdalangan Indonesia wilayah Bantul sejak 1996. Ia merupakan anggota dari angkatan keempat, kini delapan angkatan telah tergabung. Awalnya, Juwaraya mengenal kesenian Langen Mandra Wanara dari ayahnya, Djojowiyana yang seorang dalang di Dusun Sembungan, Kasihan, Bantul, Yogyakarta.

Ayahnya memberi nama Juwaraya dengan mengambbil dari hari kelahirannya, Juni, Ruwah, dan Rabu. Kecintaannya pada dunia pewayangan dan perdalangan diwarisinya dari sang ayah. Sedari kecil ia melihat ayahnya yang seniman Langen Mandra Wanara dengan antusias. Hal ini kemudian mendorongnya untuk



mempelajari Langen Mandra Wanara dengan serius. Pada usia 13 tahun, ia pertama kali pentas kesenian Langen Mandra Wanara di desanya.

Rambutnya yang mulai memutih tidak meyurutkan semangatnya untuk meneruskan tradisi kebudayaan asli Jawa, Langen Mandra Wanara. Setidaknya setahun sekali pria yang usianya lebih dari setengah abad ini rutin mementaskan pertunjukkan seni tersebut di Dusun Sembungan. Ia menceritakan, beberapa tahun silam masih banyak kelompok kesenian di Yogyakarta yang membawakan Langen Mandra Wanara. "Sekarang Langen Mandra Wanara dari Sembungan ini menjadi satu-satunya di DIY," ujar Juwaraya. Hal ini dikarenakan tidak mudah menjadi aktor Langen Mandra Wanara yang harus luwes menari dan piawai menyanyi (nembang).

Langen Mandra Wanara, opera Jawa yang sekilas mirip dengan Wayang Wong Mataraman yang biasa pentas di lingkungan Kraton memiliki ciri khas tersendiri. Dalam pementasan Langen Mandra Wanara, aktor menari dengan beksan jengkeng atau posisi setengah jongkok. Lagu yang menjadi dialog antar pemain dinamakan macapat yang diiringi gamelan jawa lengkap dengan nada pelog dan slendro. Pertunjukan biasanya dilakukan pada waktu malam hari selama kurang lebih tujuh jam. Sebelum permainan dimulai biasanya dibuka dengan tetabuhan dan tari-tarian. Selain itu, ciri khas Langen Mandra Wanara terlihat dari penggunaan topeng yang hanya menutup separuh wajah. Dari segi cerita, pertunjukkan ini diambil dari epos Ramayana khusus fragmen Wanara. Lebih lanjut, pria kelahiran Bantul ini mengisahkan Langen Mandra Wanara menjadi kesenian wayang khas Yogyakarta yang mengkombinasikan tarian, nyayian, drama dan gamelan.

Almarhum K.P.H. Yudanegara III menciptakan Langen Mandra Wanara pada tahun 1890. Ia kemudian dikenal sebagai Patih Kasultanan Kanjeng Pangeran Dipati Aryo Danurejo VII. Dilihat dari asal katanya, Langen Mandra Wanara berasal dari Bahasa Jawa. Langen yang berarti bersenang-senang, mandra yang berarti banyak dan wanara yang berarti kera. Langen Mandra Wanara dapat diartikan sebuah seni pertunjukkan yang banyak menggunakan peran kera.

Dalam perkembangannya, Langen Mandra Wanara sempat mengalami kemunduran pasca meletus G30S. Kemudian pada Orde Baru wayang ini mulai diangkat lagi ke masyarakat. Sekitar tahun 1967 wayang Langen Mandra Wanara pentas pertama kali di Sembungan. "Pementasan ini digagas oleh Raden Mas Untung yang tinggal di Dusun Sembungan," kenang Juwaraya.

Semenjak pementasan tersebut kesenian ini terus hidup bersama masyarakat Dusun Sembungan. Ia juga menceritakan, Langen Mandra Wanara ini hidup atas dukungan masyarakat Sembungan. Melalui kesenian ini warga jadi bersatu. Ia menjelaskan Langen Mandra Wanara melibatkan banyak orang dalam tiap pertunjukan, setidaknya 45 orang dari pelbagai usia berada di belakang kesusksesan tiap pementasan. Para pendukung ini terdiri dari pria dan wanita, yaitu 30 orang sebagai pemain, 13 orang sebagai weranggana (penabuh gamelan) dan satu orang sebagai dalang. Tak mengherankan, sampai saat ini kesenian yang telah berumur 124 tahun ini masih tetap bertahan di Dusun Sembungan.

Untuk melestarikan kesenian tersebut, pensiunan PNS di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan DIY ini merelakan rumah joglonya dijadikan sebagai tempat latihan dan dipenuhi peralatan pertunjukan. Satu set gamelan, nada slendro dan pelog tersusun rapi di joglo rumahnya. Awal mulanya, ia membeli instrumen gamelan perunggu nada Slendro dan nada Pelog satu per satu hingga mendekati komplit. Di antara gamelannya, juga terdapat dua set wayang purwo yang digunakan untuk membina dalang cilik. Lengkap dengan gebyoknya. Untuk urusan kostum, ia turun tangan sendiri untuk pengadaannya bagi para pemain Langen Mandra Wanara.

Pertunjukkan Langen Mandra Wanara yang digawangi Juawaraya ini telah banyak menggelar pementasan di berbagai tempat. Di antaranya pernah tampil di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), TVRI, dan Jogja TV. Namun secara rutin, Langen Mandra Wanara pentas dalam acara di Festival Kesenian Yogyakarta, Taman Budaya Yogyakarta, Kraton Yogyakarta atau Dinas Kebudayaan. Baginya, penampilan di TMII memiliki kesan yang amat mendalam karena komunitasnya mewakili Daerah Istimewa Yogyakarta. Apalagi, sebelum pementasan pun harus melalui rangkaian seleksi yang cukup ketat. "Ada kebanggan tersendiri saat bisa pentas mewakili daerah asal," ujar Juwaraya.

Atas kecintaannya pada dunia pewayangan, ia berinisiatif untuk mendirikan komunitas Bodronoyo pada tahun 2009. Komunitas ini merupakan komunitas dalang anak yang berusia sekitar 7 sampai 15 tahun. "Wayang yang dibawakan komunitas ini bentuknya adalah wayang kulit atau purwo, jadi berbeda dengan Langen Mandra Wanara, " tutur Juwaraya.

Anak-anak yang tergabung dalam komunitas Badronoyo merupakan sedikit anak yang masih tertarik mempelajari wayang dan melestarikannya. Mereka datang latihan ke Juwaraya atas kemauannya sendiri, bukan karena ajakan atau paksaan orang tua. "Tidak ada seorang anak pun yang datang atas paksaan orang tuanya," terangnya.

Kemampuan anak-anak didik Juwaraya sudah diakui secara luas. Mereka pernah tampil dalam berbagai kesempatan, seperti dies natalis UMY hingga mengisi acara televisi, Laptop Si Unyil di Trans 7. Bahkan, tidak jarang menjuarai berbagai kompetisi dalang anak tingkat provinsi. Seperti belum lama ini, komunitas Badronoyo mewakili Yogyakarta ke Jakarta.

Setiap pertunjukkan yang diadakan, Juwaraya tak pernah mematok tarif karena komunitas Langen Mandra Wanara yang dipimpinnya bersifat semi komersil. "Saya tidak pernah patok tarif, asal kebutuhan pemain wayang dapat terpenuhi selama pentas itu sudah cukup," jelasnya. Juwaraya menuturkan bahwa dirinya sangat senang bisa menggeluti dunia perdalangan, karena dapat turut melestarikan kebudayaan Jawa. "Sukanya jadi dalang bisa dikenal dan dikenang, tapi dukanya kadang kurang dana," tutupnya. Kini, dengan keberadaan dana keistimewaan memberinya harapan untuk terus melestarikan kebudayaan yang hampir punah ini.

Di Balik Praktik Politik Lokal

Oleh Sofiyah Angrang K



Foto:Nurrokhman/BALAIRUNG

Peta politik setelah era desentralisasi ternyata memberi efek yang berbeda di tiap daerah. Melalui dua kasus itu baik di Tuban maupun Makasar semakin mengukuhkan bahwa tiap daerah punya konstelasi politik yang berbeda sesuai kondisi sosio, ekonomi dan kultural masyarakat setempat.

Munculnya Undang-Undang (UU) No. 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah ternyata mengubah peta perpolitikkan di Indonesia. Akibat dari UU itu sistem perpolitikan di Indonesia berubah dari sentralisasi menjadi desentralisasi. Artinya, adanya pelimpahan kewenangan yang lebih besar kepada daerah menyangkut aspek pengambilan keputusan, termasuk penetapan standar dan berbagai peraturan. Kebijakan ini mulai diberlakukan pada 1999 lewat UU No 22 Tahun 1999 yang kemudian direvisi menjadi UU No. 32 Tahun 2004 sebagai jawaban atas kehendak rakyat. Dalam UU No. 22 Tahun1999, penyelenggaraan pemerintahan daerah otonom oleh pemerintah dan DPRD hanya berdasar asas desentralisasi. Sedangkan dalam UU No.32 Tahun2004, penyelenggaraan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) dan DPRD menganut asas otonomi serta tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya.

Adanya UU Otonomi Daerah itu ternyata turut memberi peran bagi perubahan peta perpolitikan Indonesia. Sebelum adanya otonomi daerah, politik yang dikembangkan sangat sentralistik. Semua urusan politik diatur hanya terpusat di Jakarta. Hal ini mengakibatkan ketiadaan ruang prakarsa dan kreatifitas dalam memberikan kontribusi pembangunan di di daerah. Singkatnya, sejak saat itu studi terkait Politik Indonesia tidak hanya menyasar politik di tingkat nasional tetapi juga merambah lokal.

Dalam perjalananya sistem desentralisasi tidak selalu berjalan mulus hingga muncul berbagai permasalahan. Seperti pertama, adanya saling melempar tanggungjawab dalam megatasi persoalan daerah. Kedua, masalah anggaran daerah yang tidak mencukupi dan menyebabkan pembangunan menjadi terhambat. Ketiga, kurangnya transparansi dalam penyusunan Aanggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta



banyaknya keinginan yang bertabrakan antara masyarakat dan kepentingan elit. Keempat, kepentingan elit lokal menjadi lebih jelas dalam memanfaatkan otonomi daerah sebagai momentum untuk mensukseskan kepentingan politiknya dan mengembangkan sentimen (putra daaerah) dalam pilkada.

Persoalan tersebut menimbulkan pertanyaan. Apakah otonomi daerah sudah benar-benar berjalan maksimal? Sedangkan dalam prakteknya masih banyak permasalahan terutama dalam segi perkembangan politik lokal. Dalam perkembangannya, dunia politik saat

Judul Buku	:	Perempuan-perempuan Mahabharata
Penulis	:	Kavita A. Sharma
Penerjemah	:	Dewita Kusuma Hakimi, Ining Isaiyas
Penerbit	:	Kepustakaan Populer Gramedia
Tebal Buku	:	xvii + 178 halaman
Tahun Terbit	:	2013

ini penuh dengan intrik-intrik kotor. Realitanya, dunia politik memberi kesempatan kepada mereka guna memperoleh dan mempertahankan kekuasaan. Tidak hanya itu, dunia politik menjadi arena perebutan kekuasaan.

***

Pada 2011 lalu, Hilmi Mochtar seorang dosen ilmu politik di Universitas Brawijaya Malang menerbitkan buku yang berjudul

Politik Lokal dan Industrialisasi: Politik Mobilisasi Dukungan Pembangunan Industri Semen Tuban. Mochtar mengatakan, di dalam era reformasi dengan pemerintahan daerah yang otonom, permasalahan yang muncul seringkali bersifat dinamis dan kompleks. Melalui buku ini Mochtar ingin memotret sekaligus menjelaskan berbagai kelompok masyarakat yang menjadi sasaran mobilisasi dukungan dan sumber kuasa bagi elite politik, birokrasi dan kelompok kepentingan di Tuban.

Tujuan penulisan buku tersebut ialah untuk menjelaskan fenomena politik lokal dan industrialisasi di Indonesia melalui desa Tuban. Menurutnya dalam tataran grassroots, kehidupan masyarakat Indonesia sehari-hari dipengaruhi oleh dua hal yang berbeda. Di satu sisi, mereka dipengaruhi kebijakan-kebijakan di tingkat nasional yang jauh dari kehidupan keseharian. Di sisi lain, kehidupan mereka secara langsung dipengaruhi oleh berbagai peristiwa lokal mulai dari masalah lalu lintas kota yang sering macet, sampah yang menumpuk, penggusuran hunian illegal hingga polusi yang menyesakkan dada karena sebuah industri tertentu.

Melihat keadaan tersebut, menurut Mochtar harus ada pemahaman politik lokal terhadap masyarakat melalui kajian ilmu politik yang menggunakan batasan. Terdapat empat batasan yang ia usulkan. Pertama, pemerintah daerah sebagai subordinat pemerintahan pusat. Contohnya regulasi yang dibuat oleh pemerintah daerah harus mengacu pada regulasi yang telah ditetapkan pemerintah pusat. Kedua, kemampuan ekonomi lokal. Kepentingan ekonomi pemerintah daerah direpresentasikan lewat struktur pajak, aktivitas bisnis daerah dan program-program ekonomi utama. Ketiga, mobilitas warga masyarakat. Mobiltas warga ini terkait dengan interaksi anggota masyarakat, hubungannya dengan pekerjaan sampai hubungan antara satu keluarga dengan keluarga lainnya Keempat, interaksi antar pemerintah daerah. Interaksi ini berkenaan dengan pola pengaturan yang berbeda antarpemerintah daerah. Misalnya aktivitas dan interaksi pemerintah kota metropolitan (seperti DKI Jakarta dan Surabaya) akan berbeda dengan pemerintah daerah urban (seperti Indramayu atau Mojokerto).

Merujuk pada empat batasan yang diajukan oleh Mochtar, ini ia mengkaji mobilisasi warga yang dilakukan oleh Pemda. Secara khusus ia memilih kebijakkan Pemda yang terdapat dalam kasus industrialisasi semen di Tuban. Lewat buku ini ia menyelidiki dengan cara melibatkan data penelitian yang berkaitan dengan mobilisasi yang diterapkan pemerintah pada setiap tahap Proyek Industri Semen Tuban (PIST). Bahwa terdapat dua model mobilisasi yang berbeda. Pertama, mobilisasi langsung yang didominasi oleh institusi militer dan institusi birokrasi pemerintah, penerapan mobilisasi langsung mengakibatkan timbulnya krisis politik dan keresahan sosial. Kedua, model mobilisasi tak langsung yang menggunakan lembaga social dan 'struktur ekonomi', penerapan mobilisasi tak langsung mengakibatkan friksi internal birokrasi pemerintah dan eskalasi konflik kepentingan antara Negara, PIST dan masyarakat.

Akan tetapi, mobilisasi langsung dan tidak langsung ini gagal memperoleh dukungan rakyat. Hal ini dikarenakan pemerintah mengabaikan rakyat dalam pengambilan kepustusan dan menggunakan kekerasan dalam implementasi kebijakan. Kekerasan tersebut ditandai dengan hasil kebijakan pemerintah mendzolimi rakyat. Contohnya seperti halnya krisis ekonomi yang menimpa rakyat dan lain-lainnya.

Dua tahun setelah Mochtar, Rahmad M. Arsyad hadir dengan pemikiran yang hampir sama. Pemikirannya tertuang dalam buku yang berjudul Perang Kota: Studi Politik Lokal dan Kontestasi Elite Boneka. Meskipun juga membahas politik lokal, Arsyad memberi fokus kajian yang berbeda. Dalam tulisannya, Arsyad mengacu pada Kota Makasar sebagai objek kajiannya. Hal ini dikarenakan Makasar adalah pintu utama dalam dinamika politik di lawasan timur Indonesia, khususnya Sulawesi. Selain itu, Makasar merupakan kota dengan pertumbuhan ekonomi yang begitu cepat. Serta menjadi simbol keberagaman dari berbagai identitas kultural baik yang berada di kepulauan Sulawesi maupun pulau-pulau lainnya di kawasan timur Indonesia.

Terdapat fenomena poltitik lokal yang menarik di Makasar terkait pemilu dalam buku yang diterbitkan oleh Arsyad. Pertama, pemilu mampu menghadirkan calon sampai sepuluh pasang. Kedua, ada banyak konstalasi politik yang berubah dari formasi politik awal yang diprediksikan oleh para akademisi, pengamat, termasuk para politisi yang membuat pemilihan walikota Makasar menjadi suatu yang sulit diramalkan. Ketiga, adanya fenomena pertarungan tiga elite yang menjadi kunci di berbagai peristiwa politik yang terjadi dibalik arena perang Makasar. Keempat, hasil riset terkait kronik persoalan warga kota Makasar yang ditasbihkan menjadi Kota Dunia dengan menguraikan indeks kepuasan warga kota atas kinerja pemerintah dalam menghadirkan kualitas kehidupan kota yang layak dan nyaman.

Selanjutnya, buku ini mencoba menguraikan perspektif elektoral dalam menyikapi pertarungan politik yang begitu gaduh dan ramai. Termasuk memberikan pemetaan dari tipologi pemilih Makasar secara periodik dari April sampai sebelum September 2013 yang direkam dalam serangkaian survei yang dilakukan Indonesia Development Engineering Consultant (IDEC). Sedangkan pada bagian enam, mencoba untuk membukukan peristiwa saling serang lewat media massa dengan menggunakan pendekatan framing. Hasil studi politik ini menjadi penting untuk melihat bingkai peristiwa dibalik kontestasi politik yang terjadi. Sementara itu pada bagian tujuh, mencoba menguraikan sosok dua calon perempuan yang juga turut meramaikan ajang pemilihan walikota Makasar. Dalam hal ini, mengkaji kondisi dilematis antara keadilan gender dan kapasitas calon perempuan.

***

Melalui dua buku ini, Mochtar dan Arsyad sama-sama mencoba menguak keburukan dari aplikasi politik lokal di Indonesia. Keburukan ini yang pada akhirnya memerosotkan karakter bangsa. Keduanya sama-sama ingin memberi pemahaman kepada pembaca khususnya masyarakat umum, bahwa realitas politik lokal di Indonesia saat ini sangat mengkhawatirkan untuk kemajuan regenerasi bangsa.

Mochtar, dalam bukunya menerapkan alur yang sistematis ketika



Foto:Nurrokhman/BALAIRUNG

Judul Buku	:	Perempuan dalam Dunia Kakawin
Penulis	:	Helen Creese
Penerjemah	:	Ida Bagus Putra Yadnya
Penerbit	:	Pustaka Larasan
Tebal Buku	:	xiv + 316 halaman
Tahun Terbit	:	2012

menjelaskan realitas politik dalam mobilisasi pembangunan industri semen di Tuban. Pertama-tama, Mochtar membahas konsep mobilisasi sebagai fenomena politik. Kemudian menjelaskan tentang deskripsi seting politik mobilisasi dukungan di Kabupaten Tuban. Dimulai dari segi geografis, ekonomi, masyarakat, politik, hubungan pemerintah daerah dan rakyat, dan beberapa faktor yang menyebabkan ketimpangan. Selanjutnya Mochtar mulai menguatkan tulisannya dengan membahas proyek PIST sebagai arena "politik mobilisasi dukungan" serta konflik politik yang menyertainya. Sebagai poin utama, Mochtar menambah uraian dalam tulisannya tentang isu politik lokal dan mobilisasi dukungan beserta dampakya bagi dinamika politik masayarakat Tuban.

Berbeda dengan Mochtar, Arsyad mengguanakan alur kronologis-faktual. Ia hanya berusaha mengungkap keadaan politik di Makasar pada saat Pemilihan Wali Kota. Dalam hal ini, Arsyad tidak mejelaskan secara teoritik terlebih dahulu konsep politik lokal yang dimaksudnya. Arsyad tidak juga menjelaskan deskripsi umum masyarakat Makasar. Buku ini diterbitkan dari berbagai hasil riset yang telah dilakukannya di Makasar dan dibagi menjadi sembilan sub-bab. Arsyad mencoba memberikan pembelajaran terhadap masyarakat tentang sebuah peristiwa politik lokal dalam pemilihan walikota Makasar 2013. Harapannya masyarakat mampu menjadikan pelajaran dan cermin dalam membaca serta menilai politik di Indonesia. Bahwa saat ini, bangsa kita mengalami penurunan kualitas dalam aplikasi politiknya.

Kedua buku ini sangat tepat bagi pembaca baik akademisi, mahasiswa maupun masyarakat yang ingin mengetahui dinamika politik lokal di Indonesia. Sebagai salah satu contohnya adalah politik lokal pada pembangunan semen di Tuban dan pemilihan walikota di Makasar. Pemahaman yang diperoleh dari buku ini adalah mampu mendorong kesadaran berpolitik yang 'seharusnya' bukan 'seadanya'. Baik karya Mochtar maupun karya Arsyad, jika dipamahami dengan tepat, akan mampu menjadi tuntunan untuk mengawal perjalanan politik di Indonesia.



Foto: Nawang/BALAIRUNG

Ironi Seniman Jathilan

Berawal dari semakin terpinggirkannya kesenian Jathilan oleh derasnya budaya asing, sebuah film berjudul Broto Laras diproduksi. Film ini berkisah tentang kehidupan seorang pelaku kesenian Jathilan yang kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Untuk sekedar membiayai les anaknya, sang seniman bahkan harus menjual alat peralatan yang biasa ia gunakan untuk jathil. "Ini tentu menunjukkan sebuah ironi terhadap nasib kebudayaan kita," ujar Abdul Kholiq, budayawan sekaligus pembicara dalam screening dan diskusi Broto Laras di STIE YKPN, Rabu (21/1).

Dalam pemutaran film tersebut, Waris Lakek juga menambahkan apabila Jathilan tidak didukung, kesenian ini akan semakin tergerus dan dapat hilang. "Kita harus bangga pada tradisi kita, budaya adalah kekuatan bangsa kita," pungkasnya.**(Budi Triwibowo Yuli W)**

Demografi Pengaruhi Sikap Intoleran



Foto:Dokumentasi Pribadi

Banyaknya pendatang menyebabkan tingginya perbedaan yang tumbuh di Yogyakarta. "Perkembangan penduduk ini mempengaruhi timbulnya permasalahan intoleransi," ujar Direktur Institut Dialog Antariman di Indonesia Interfidei (Institut Dian Interfidei), Elga Sarapung, dalam diskusi "Dampak Perubahan Demografi Masyarakat Yogyakarta terhadap Dinamika Perbedaan" di Universitas Kristen Duta Wacana, Senin (19/01).

Menurut Ari Sujito dari Sosiologi UGM, perbedaan yang meliputi suku, ras, dan agama ini riskan memicu sentimen masyarakat. Guna mencegah timbulnya masalah perbedaan itu, demografi dipakai kepolisian untuk mempelajari daerah yang rawan kasus. "Selanjutnya kami melakukan pembinaan terhadap daerah tersebut," ungkap Direktur Intelkam Polda DIY, Kombes Pol. Amran Ambulembang. Namun, tidak hanya kepolisian saja yang harus melakukan tindakan preventif tersebut. "Diperlukan kepekaan dan peran masyarakat daerah itu sendiri," tegas pembicara dari Antropologi UGM, Agus Indiyanto. **[I Nyoman Agus]**

Sidang Kriminalisasi Warga



Foto: Ryma/BALAIRUNG

Sidang kasus pengrusakan alat reklame yang dituduhkan kepada AK dan RA kembali digelar di Pengadilan Negeri Sleman pada Selasa (25/11). Penahanan kedua orang tersebut berawal dari aksi yang dilakukan menolak pembangunan Apartemen Uttara.

Dony Hendrocahyono, S.H., M.H. menyatakan kasus ini adalah bentuk kriminalisasi, yaitu perbuatan yang tidak termasuk hukum pidana, tapi dipaksakan sedemikian rupa menjadi pidana. "Padahal yang mereka lakukan adalah mencopot spanduk dan itu bagian dari aksi," ujar advokat dari Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama itu.

Kriminalisasi tersebut, menurut Dony, penuh dengan keganjilan. Sebab, yang dilakukan warga adalah melakukan aksi karena menganggap pembangunan tersebut tidak memiliki izin. "Kalau dalam bahasa hukum, ini namanya *error in causa*. Sudah tahu salah, tapi masih menantang-nantang," pungkasnya. **[Ervina Lutfikasari]**

Melihat Keseharian dalam Film



Foto:Nindias/BALAIRUNG

Para mahasiswa angkatan 2012 Jurusan Televisi Fakultas Media Rekam Institut Seni Yogyakarta (ISI) mengadakan pemutaran film pada Sabtu (17/1) malam. Acara yang bertajuk "Bangun Tidur: Membuka Mata Rekam Cerita" ini berlangsung di Gedung Societeit, Kompleks Taman Budaya Yogyakarta. Terdapat lima film yang diputar, yakni "Manuk" buatan Ghalif Putra Sadewa, "Surat" dengan sutradara Eky Agung Wibowo, "Baju Lebaran" produksi Gelora Yudhaswara, "Ideal" buatan Muhammad Fajruchi K.A, dan "Tanya Satu Atap" yang disutradai M. Rizky Kurnia. Ridho Afwan Rahman, ketua pelaksana, mengatakan film yang diputar bertemakan keseharian. Menurutnya, keseharian dialami oleh siapapun mulai pagi hingga malam hari. Sementara itu, Ogie Evanthe, koordinator bagian hubungan masyarakat, menuturkan film-film tersebut merupakan hasil pembelajaran mahasiswa yang ikut mata kuliah Produksi Televisi. "Acara ini diadakan untuk membuktikan karya-karya anak ISI pada masyarakat luas selama proses belajar sampai semester 5," imbuhnya. **[Nindias Nur Khalika]**

Harapan Kapitan

Oleh Penginterupsi

Laki-laki berkulit hitam itu memiliki sorotan mata yang tajam. Tubuhnya perkasa dan dikenal mempunyai kesaktian. Sejak Sultan Hamengkubuwono III naik tahta menggantikan ayahnya, ia diangkat pula menjadi Bupati Nayoko. Kedudukannya yang setingkat menteri menyebabkan masyarakat segan padanya. Apalagi sebelumnya ia sempat menjabat sebagai Lurahing Pacino atau Kapitan yang dipercaya memimpin masyarakat Tionghoa di Yogyakarta. Sesekali laki-laki yang bernama Tan Jin Sing ini dipanggil Kanjeng Raden Tumenggung (KRT) Secodinigrat, nama gelar kebangsawanan pemberian Sultan Hamengkubuwono III.

Suatu hari, Tan Jing Sing duduk merenung di kediamannya. Pandangannya menatap langit. Ibu jari tangan kanan sibuk mengelus punggung tangan kirinya. Pagi itu, matahari belum terlalu tinggi. Cericit burung gereja terdengar sangat jelas di telinganya. Suasana seperti ini, batin Tan Jin Sing, enak dilalui sambil merenung. Sejurus kemudian, tatapannya beralih ke sudut-sudut bagian rumah. Ukiran bergaya Eropa dan Cina berpadu menghiasi beberapa sisi bangunan. Apiknya lekukan garis dalam pahatan menyenangkan hati Tan Jin Sing.

Lama-lama konsentrasinya mulai memudar meninggalkan ruang pikiran yang kosong. Ingatan Tan Jin Sing melayang jauh. Ia merasakan dirinya sedang melawan waktu agar sampai di masa silam. Bayangan orang, tempat, dan rumah muncul sekejab ketika matanya terpejam. Sebermula suasana gelap. Lama kelamaan terlihat bayangan sepasang manusia ketika suasana beralih terang berlatar langit biru. Sosok yang pertama tampil menyerupai Raden Ayu Patrawijaya dan Oei The Long, ibu serta ayah tiri Tan Jin Sing. Ia melihat mereka saling tersenyum satu sama lain sambil sesekali menatap ke arahnya. Ketika itu, mereka baru saja menikah. Senyuman orang tuanya membuat Tan Jin Sing kecil gembira karena ketiganya bisa tinggal bersama dalam satu atap. Tiap harinya ia tidak perlu lagi mengunjungi rumah Oei The Long hanya untuk menjenguknya.



Tiba-tiba, Raden Ayu Patrawijaya berikut Oei The Long menghilang. Sekelabat Sultan Hamengkubuwono III muncul. Langit biru turut berubah hitam seperti semula. Kali ini Tan Jin Sing tidak bisa melihat muka Sultan Hamengkubuwono III. Dalam diam, ia menunggu kata-kata yang bakal keluar dari mulut sultan. Tak berapa lama kemudian sultan menitahkan Tan Jin Sing menjadi Bupati Nayoko Keraton Yogyakarta.

Secepat ia pergi, selekas itu pula Tan Jin Sing merasakan rohnya kembali ke badan. Setelah matanya terbuka, ia mendapati dirinya duduk di rumah dengan suasana yang tak berbeda dari sebelumnya. Hanya saja, matahari yang mulai merangkak naik membuat embun pagi menguap. Tan Jin Sing menggerakkan ibu jari tangan kanannya lagi, mengelus punggung tangan kirinya. Ia merasakan waktu telah berlalu sekian lama. Rupanya banyak kejadian yang telah dialami, pikirnya. Di antara memori tadi, sebagian membuatnya bahagia, sisanya menyisakan kesedihan, namun ada juga yang membuatnya bersemangat. “Aku akan melaksanakan tugasku lebih baik mulai saat ini. Rumah ini menjadi saksi bisunya,” gumam Tan Jin Sing.

Beberapa ratus tahun berlalu, tepatnya tahun 2014, rumah Tan Jin Sing hanya tersisa tembok sepanjang 15 meter dengan *gebyok* kayu berukir ornamen Tionghoa bercampur Eropa. Ironisnya, bangunan yang terletak di kawasan Ketandan tersebut hendak dirobohkan untuk lahan parkir hotel. Rencana ini ternyata diketahui oleh arwah Tan Jin Sing. Jelas ia menolak rencana tersebut karena bangunan itu telah menjadi saksi hidupnya. Meski begitu, Tan Jin Sing sedih sebab ia tidak bisa melakukan apa-apa. Berhari-hari Tan Jin Sing memberitahu para pekerja hotel itu tapi tak seorang pun peduli. Suatu saat, ia mendengar bahwa ada sekelompok orang yang berpikiran sama dengannya. Mereka menyebut rumahnya sebagai cagar budaya sehingga tidak boleh dihancurkan. Mereka juga mengatakan kalau pariwisata di Yogyakarta harus berkelanjutan.

Upaya orang-orang itu menjadi harapan baru bagi Tan Jin Sing. Kata demi kata dalam doa Tan Jin Sing menjadi bukti harapan tersebut. Ia berdoa dan terus berdoa.

SUDUT

+ Pembangunan hotel seharusnya berkelanjutan
- Berkelanjutan buat siapa?
+ Yogyakarta menjadi sasaran investasi pengusaha
- Rakyat harusnya dibuat sejahtera juga



A GOOD PRODUCT SELLS ITSELF

provide better idea, not ads

Sorry, Yogyakarta...

UNDER
CONSTRUCTION



Completed 75%
Loading ...